PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2025



Ir. H. MUHAMMAD NOOR RIFANI, S.H., S.T., M.T.

BUPATI TABALONG

HABIB M. TAUFANI ALKAF, S.Kom., M.M.

WAKIL BUPATI TABALONG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan ini merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Laporan ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, sebagai bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran serta masyarakat. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tabalong.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tabalong, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sepanjang tahun 2025.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi peningkatan kinerja pemerintahan daerah di masa mendatang. Semoga dengan laporan ini, kita dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong yang lebih maju dan sejahtera.

Tanjung, Maret 2026

BUPATI TABALONG

Ir. H. MUHAMMAD NOOR RIFANI, S.H., S.T., M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1. Latar Belakang I-1

1.1 Penjelasan Umum I-1

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah I-1

b. Data Geografis Wilayah I-1

c. Jumlah Penduduk I-3

d. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa I-5

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah I-5

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah I-10

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah I-26

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah I-26

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah I-27

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah I-30

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan I-32

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal I-35

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **II-1**

2.1 Capaian Kinerja Makro II-1

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan II-2

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil II-2

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-14

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah II-16
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja II-16
b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja II-18
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya II-20
d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah II-23
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai II-25
f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja II-39

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN III-1

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota III-1
3.1.1 Target Kinerja III-1
3.1.2 Realisasi III-1
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota III-1
3.2.1 Target Kinerja III-1
3.2.2 Realisasi III-1
3.3 Permasalahan dan Kendala III-2
3.4 Saran dan Tindak Lanjut III-2

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL IV-1

4.1 Urusan Pendidikan IV-1
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-1
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah IV-2
4.1.3 Realisasi IV-3
4.1.4 Alokasi Anggaran IV-4
4.1.5 Dukungan Personil IV-4

4.1.6 Permasalahan dan Solusi.....IV-5
4.2 Urusan Kesehatan IV-5
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar.....IV-5
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah IV-6
4.2.3 Realisasi IV-7
4.2.4 Alokasi Anggaran.....IV-9
4.2.5 Dukungan Personil IV-9
4.2.6 Permasalahan dan Solusi.....IV-10
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....IV-11
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar.....IV-11
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah IV-12
4.3.3 Realisasi IV-12
4.3.4 Alokasi Anggaran.....IV-20
4.3.5 Dukungan Personil IV-21
4.3.6 Permasalahan dan Solusi.....IV-22
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....IV-22
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar.....IV-22
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah IV-23
4.4.3 Realisasi IV-23
4.4.4 Alokasi Anggaran.....IV-23
4.4.5 Dukungan Personil IV-24
4.4.6 Permasalahan dan Solusi.....IV-24
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....IV-25
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar.....IV-25
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah IV-26
4.5.3 Realisasi IV-29
4.5.4 Alokasi Anggaran.....IV-33
4.5.5 Dukungan Personil IV-33

4.5.6 Permasalahan dan Solusi.....IV-34
4.6 Urusan Sosial IV-35
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar.....IV-35
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah IV-35
4.6.3 Realisasi IV-36
4.6.4 Alokasi Anggaran.....IV-38
4.6.5 Dukungan Personil IV-39
4.6.6 Permasalahan dan Solusi.....IV-39
4.7 Program dan Kegiatan.....IV-39
4.7.1 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan IV-39
4.7.2 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan IV-42
4.7.3 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum.....IV-43
4.7.4 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat.....IV-46
4.7.5 Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....IV-47
4.7.6 Program dan Kegiatan Urusan Sosial IV-51

BAB V PENUTUP.....V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Tabalong (2025).....I-3
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Tabalong (2021-2025).....I-4
Tabel 1.3 Tingkat Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Tabalong (2021-2025).....I-4
Tabel 1.4 Luas Wilayah, Persentase, dan Jumlah Kelurahan/Desa per Kecamatan di Kabupaten Tabalong I-5
Tabel 1.5 Daftar Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Beserta Dasar Hukumnya I-5
Tabel 1.6 Jumlah ASN per Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong Berdasarkan Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang (2025) I-7
Tabel 1.7 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 .....I-10
Tabel 1.8 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah TA 2025.....I-18
Tabel 1.9 Realisasi Anggaran Menurut Program TA 2025.....I-20
Tabel 1.10 Penjabaran Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati ke dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong ...I-30
Tabel 1.11 Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Urusan Pemerintahan Kabupaten Tabalong.....I-33
Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tabalong (2024-2025).....II-1
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....II-2
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Fungsi Penunjang.....II-14
Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....II-17
Tabel 2.5 Capaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Terhadap Target

Tahun 2025 ..... II-18
Tabel 2.6 Capaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 ..... II-20
Tabel 2.7 Capaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD II-23
Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tabalong III-1
Tabel 3.2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten Tabalong III-2
Tabel 4.1 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota..... IV-2
Tabel 4.2 Capaian Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 ..... IV-3
Tabel 4.3 Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan APBD-P TA. 2025 ..... IV-4
Tabel 4.4 Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Golongan..... IV-4
Tabel 4.5 Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Pendidikan IV-4
Tabel 4.6 Target Capaian Kinerja SPM Kesehatan Kabupaten Tabalong IV-6
Tabel 4.7 Capaian Pelaksanaan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan IV-7
Tabel 4.8 Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan IV-8
Tabel 4.9 Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan IV-9
Tabel 4.10 Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan IV-10
Tabel 4.11 Target Capaian untuk SPM Urusan Pekerjaan Umum 2025..... IV-12
Tabel 4.12 Capaian Layanan Air Minum IV-12
Tabel 4.13 Capaian Layanan Air Limbah Domestik..... IV-15
Tabel 4.14 Rekapitulasi Layanan Air Minum dan Layanan Air Limbah Domestik..... IV-17
Tabel 4.15 Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 ..... IV-21

Tabel 4.16 Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman IV-22
Tabel 4.17 Batas Waktu Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....IV-23
Tabel 4.18 Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025.....IV-23
Tabel 4.19 Alokasi Anggaran Kegiatan Terkait SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 .....IV-24
Tabel 4.20 Jumlah Pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kepangkatan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 .....IV-24
Tabel 4.21 Jumlah Pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 .....IV-24
Tabel 4.22 Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025 – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....IV-26
Tabel 4.23 Target Pelayanan Informasi Rawan Bencana.....IV-27
Tabel 4.24 Program dan Kegiatan tahun 2025 .....IV-27
Tabel 4.25 Capaian SPM 2025 – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....IV-29
Tabel 4.26 Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025.....IV-33
Tabel 4.27 Dukungan Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2025 .....IV-33
Tabel 4.28 Dukungan Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.....IV-34
Tabel 4.29 Permasalahan dan Solusi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2025 .....IV-34
Tabel 4.30 Pemenuhan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Tabalong.....IV-35
Tabel 4.31 Anggaran dan Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong IV-38

Tabel 4.32 Data Personil pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong IV-39
Tabel 4.33 Realisasi Program Kegiatan Penunjang SPM Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2025.....IV-40
Tabel 4.34 Realisasi Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2025 .....IV-43
Tabel 4.35 Realisasi Pelayanan Dasar Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong Tahun 2025.....IV-46
Tabel 4.36 Program dan Kegiatan Penerapan SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 .....IV-47
Tabel 4.37 Program, Kegiatan, Target, dan Capaian SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 .....IV-48
Tabel 4.38 Program, Kegiatan, Target dan Capaian Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar.....IV-51

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah;

Kabupaten Tabalong terbentuk secara sah dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756). Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 Tanggal 14 juni 1965, yang mendorong daerah pesiapan Tingkat II Tabalong ditingkatkan lagi menjadi Daerah Otonomi Tingkat II Tabalong yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah, yang menjalankan roda Pemerintahan sendiri baik eksekutif maupun Legislatif.

b. Data Geografis Wilayah;

Kabupaten Tabalong dengan ibukota Tanjung berada di wilayah utara Provinsi Kalimantan Selatan, secara geografis terletak antara 115°9' - 115°47' Bujur Timur dan 1°18' - 2°25' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Provinsi Kalimantan Timur
Sebelah timur : Provinsi Kalimatan Timur
Sebelah selatan : Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sebelah barat : Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara administratif, Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah sebesar 347.677,93 ha, yang terbagi atas 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 121 desa. Kabupaten ini terletak strategis dalam jalur “segitiga emas” yang menghubungkan tiga provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, memberikan akses yang baik dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan regional.

Wilayah Kabupaten Tabalong memiliki karakteristik topografi yang beragam. Bagian utara dari Kabupaten Tabalong berupa dataran tinggi dan bergunung-gunung dengan Pegunungan Meratus yang membentang dari utara ke selatan di bagian timur. Pegunungan ini membentuk pemandangan alam yang indah dan memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata dan sumber daya alam. Di bagian tengah wilayah, terdapat dataran yang bergelombang, yang berpotensi untuk pertanian dan perkebunan. Sementara itu, bagian selatan wilayah Kabupaten Tabalong didominasi oleh dataran rendah dan rawa, yang cocok untuk pengembangan pertanian lahan basah dan sektor perikanan.

Kabupaten Tabalong memiliki iklim tropis dengan musim hujan yang berlangsung dari Oktober hingga April dan musim kemarau yang terjadi antara Mei hingga September. Suhu udara pada musim kemarau berkisar antara 31°C hingga 37°C, sementara pada musim hujan, suhu udara berkisar antara 25°C hingga 30°C. Rata-rata curah hujan tahunan di Kabupaten Tabalong berada pada kisaran 2.000 hingga 3.000 mm, mendukung pertumbuhan tanaman tropis yang melimpah di sebagian besar wilayahnya.

Jenis tanah yang dominan di Kabupaten Tabalong adalah Podsolik merah kuning, yang mencakup sekitar 43,17% dari total luas wilayah. Tanah ini sangat cocok untuk budidaya tanaman pangan lahan kering, perkebunan, dan kehutanan berbasis agroforestri, meskipun memiliki kekurangan dalam hal kesuburan yang dapat berkurang akibat erosi dan pencucian. Tanah dengan tipe ini umumnya membutuhkan pengelolaan yang hati-hati agar dapat mempertahankan kualitasnya, terutama dalam menjaga keseimbangan unsur hara.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tabalong (97,8%) memiliki kedalaman tanah lebih dari 90 cm, yang ideal untuk pertanian. Tanah di wilayah ini memiliki tekstur halus, mendukung drainase yang baik, dan sekitar 95,51% wilayah tidak pernah tergenang. Hanya 2,14% wilayah yang tergenang secara periodik, sementara 2,35% tergenang terus-menerus, yang lebih cocok untuk kegiatan perikanan dan sawah.

Wilayah Kabupaten Tabalong memiliki ketinggian yang bervariasi. Sebagian besar wilayah dengan ketinggian 25-100 m dpl, mencakup 156.282 ha atau sekitar 43,5% dari total luas wilayah. Wilayah ini sangat cocok untuk pertanian tropis dan perkebunan. Sementara itu, wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 m dpl merupakan yang paling kecil, hanya mencakup 2.923 ha atau sekitar 0,80% dari total wilayah, yang sebagian besar digunakan sebagai kawasan lindung. Sebaran ketinggian lainnya adalah 0-7 m dpl (7.062 ha atau 1,92%), 7-25 m dpl (11.688 ha atau 3,18%), 100-500 m dpl (82.277 ha atau 22,39%), dan 500-1.000 m dpl (107.233 ha atau 29,18%).

Kabupaten Tabalong memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian dan kehutanan. Sebanyak 25,77% dari total luas wilayah (sekitar 94.703 ha) dapat dimanfaatkan untuk budidaya lahan basah seperti perkebunan dan sawah, sementara 62.836 ha cocok untuk budidaya tanaman pangan lahan kering. Perkebunan menjadi salah satu sektor utama dengan area seluas 90.762 ha yang cocok untuk tanaman seperti kelapa sawit, karet, dan lainnya. Wilayah hutan terdiri dari 37.590 ha untuk hutan produksi dan 46.750 ha untuk hutan lindung, yang berfungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam.

Tanah di Kabupaten Tabalong umumnya bertekstur halus dan memiliki kemampuan drainase yang sangat baik. Sebanyak 98,75% wilayah memiliki tanah bertekstur halus, yang ideal untuk pertanian. Dalam hal pengelolaan lahan, sekitar 41,55% dari total wilayah (147.156 ha) telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti perkebunan, kebun rakyat, ladang, kolam, dan pemukiman. Namun, sekitar 58,45% wilayah lainnya (206.968 ha) masih belum dimanfaatkan dan terdiri dari hutan negara, padang rumput, rawa, serta lahan terlantar, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Wilayah yang belum dimanfaatkan ini dapat menjadi sasaran untuk pengembangan pertanian dan kehutanan yang lebih intensif.

Kabupaten Tabalong dibagi menjadi enam kategori WTU berdasarkan kondisi geomorfologi dan ketinggian tempat. Di antaranya, WTU terbatas I (ketinggian <7 m dpl) cocok untuk perikanan dan persawahan; WTU utama Ia dan Ib (ketinggian 7-25 m dpl) cocok untuk perikanan dan sawah; WTU utama Ic (ketinggian 25-100 m dpl) cocok untuk perkebunan, agroforestri, dan pertanian lahan kering; WTU utama Id (ketinggian 100-500 m dpl) cocok untuk perkebunan dan agroforestri; WTU utama II (ketinggian 500-1.000 m dpl) lebih cocok sebagai kawasan lindung; serta WTU terbatas II (ketinggian >1.000 m dpl) yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung. Pengelolaan wilayah berdasarkan pola WTU ini dapat mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

c. Jumlah Penduduk;

Jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Tabalong bervariasi, pada tahun 2025, total jumlah penduduk mencapai 269.405 jiwa. Kecamatan Murung Pudak menjadi wilayah dengan penduduk terbanyak, mencapai 60.089 jiwa, sementara Kecamatan Muara Harus memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 7.286 jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Tabalong (2025)

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2	3
1.	Banua Lawas	21.503
2.	Kelua	26.139
3.	Tanta	24.837
4.	Tanjung	37.919
5.	Haruai	24.821
6.	Murung Pudak	60.089
7.	Muara Uya	25.164
8.	Muara Harus	7.286
9.	Pugaan	7.917
10.	Upau	7.952
11.	Jaro	16.100
12.	Bintang Ara	9.678
	Jumlah	**269.405**

Sumber : DKB I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong, 2025

Dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Tabalong menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 245.765 jiwa dan terus bertambah hingga mencapai 269.405 jiwa pada tahun 2025. Kenaikan jumlah penduduk ini terjadi di seluruh kecamatan, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kecamatan Murung Pudak.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk
per Kecamatan di Kabupaten Tabalong (2020-2025)

No.	Kecamatan	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Banua Lawas	20.018	20.319	20.763	21.112	21.220	21.503
2.	Kelua	24.396	24.816	25.324	25.702	25.818	26.139
3.	Tanta	21.073	21.947	22.875	23.614	24.013	24.837
4.	Tanjung	35.786	36.472	37.059	37.367	37.577	37.919
5.	Haruai	23.418	23.829	24.366	24.486	24.567	24.821
6.	Murung Pudak	52.794	54.471	56.235	57.721	58.451	60.089
7.	Muara Uya	23.084	23.735	24.319	24.668	24.771	25.164
8.	Muara Harus	6.828	7.007	7.138	7.188	7.209	7.286
9.	Pugaan	7.379	7.510	7.728	7.811	7.819	7.917
10.	Upau	7.278	7.400	7.664	7.752	7.776	7.952
11.	Jaro	14.717	15.228	15.676	15.731	15.835	16.100
12.	Bintang Ara	8.994	9.170	9.378	9.479	9.638	9.678
	Kab. Tabalong	**245.765**	**251.904**	**258.525**	**262.631**	**264.694**	**269.405**

Sumber : DKB I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong, 2025

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tabalong selama periode 2020-2025 menunjukkan variasi antar kecamatan. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan penduduk kabupaten berada pada kisaran 7,74% per tahun. Kecamatan Tanta mencatatkan pertumbuhan tertinggi, sementara Kecamatan Bintan Ara mengalami sedikit penurunan pada periode 2024-2025.

Tabel 1.3 Tingkat Pertumbuhan Penduduk
per Kecamatan di Kabupaten Tabalong (2020-2025)

No	Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk					
		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Banua Lawas	0,0150	0,0219	0,0168	0,022	0,14	0,0431
2.	Kelua	0,0172	0,0205	0,0149	-0,020	0,13	0,0325
3.	Tanta	0,0415	0,0423	0,0323	0,050	0,69	0,1712
4.	Tanjung	0,0192	0,0161	0,0083	0,014	0,24	0,0595
5.	Haruai	0,0176	0,0225	0,0049	0,008	0,12	0,0346
6.	Murung Pudak	0,0318	0,0324	0,0264	0,039	0,52	0,1299
7.	Muara Uya	0,0282	0,0246	0,0144	0,019	0,2	0,0572
8.	Muara Harus	0,0262	0,0187	0,0070	0,010	0,24	0,0604
9.	Pugaan	0,0178	0,0290	0,0107	0,012	0,34	0,1012
10.	Upau	0,0168	0,0357	0,0115	0,015	0,44	0,1038
11.	Jaro	0,0347	0,0294	0,0035	0,010	0,13	0,0415
12.	Bintang Ara	0,0196	0,0227	0,0108	0,028	-0,03	0,0297
	Kab. Tabalong	**0,0250**	**0,0263**	**0,0159**	**0,020**	**0,3**	**0,0774**

Sumber : DKB I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong, 2025 (diolah)

d. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa;

Kabupaten Tabalong memiliki luas 394.600 hektare yang terbagi dalam 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 121 desa. Kecamatan terluas adalah Bintang Ara (31,42% dari total luas), sedangkan yang terkecil adalah Muara Harus (0,77%). Kecamatan dengan kelurahan meliputi Kelua (1), Murung Pudak (5), dan Tanjung (4), sementara kecamatan lainnya hanya terdiri dari desa. Tabel berikut merinci luas wilayah, persentase, serta jumlah kelurahan dan desa di masing-masing kecamatan.

Tabel 1.4 Luas Wilayah, Persentase, dan
Jumlah Kelurahan/Desa per Kecamatan di Kabupaten Tabalong

No.	Kecamatan	Luas (Ha)*	Persentase thd luas kabupaten (%)	Kelurahan	Desa
1	2	3	4	5	6
1.	Banua Lawas	15.235,68	4,38	-	15
2.	Kelua	5.336,03	1,53	1	11
3.	Tanta	14.984,12	4,31	-	14
4.	Tanjung	19.562,42	5,63	4	11
5.	Haruai	27.207,06	7,83	-	13
6.	Murung Pudak	17.257,30	4,96	5	5
7.	Muara Uya	87.324,47	25,12	-	14
8.	Muara Harus	2.680,70	0,77	-	7
9.	Pugaan	3.168,35	0,91	-	7
10.	Upau	18.275,16	5,26	-	6
11.	Jaro	27.395,49	7,88	-	9
12.	Bintang Ara	109.251,16	31,42	-	9
	Jumlah	**347.677,93**	**100**	**10**	**121**

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tabalong, 2025

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah;

Tabel berikut menyajikan daftar perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di Kabupaten Tabalong beserta dasar hukum pembentukannya. Regulasi utama yang menjadi dasar penyusunan struktur ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016.

Tabel 1.5 Daftar Perangkat Daerah
Kabupaten Tabalong Beserta Dasar Hukumnya

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong	
3.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	
4.	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	
6.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	
7.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	2	3
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	
10.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Tabalong	
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	
15.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	
16.	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	
17.	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	
19.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	
20.	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	
21.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	
25.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	
28.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	
29.	RSUD H. Badaruddin Kasim	
30.	Kecamatan Banua Lawas	
31.	Kecamatan Bintang Ara	
32.	Kecamatan Haruai	
33.	Kecamatan Jaro	
34.	Kecamatan Kelua	
35.	Kecamatan Muara Harus	
36.	Kecamatan Muara Uya	
37.	Kecamatan Murung Pudak	
38.	Kecamatan Pugaan	
39.	Kecamatan Tanjung	
40.	Kecamatan Tanta	
41.	Kecamatan Upau	

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tabalong, 2025

Distribusi sumber daya manusia aparatur merupakan indikator penting dalam menilai kesiapan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Tabel 1.6 di bawah ini menyajikan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong tahun 2025 yang tersebar di 41 Perangkat Daerah. Data

ini merinci komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang dikelompokkan lebih lanjut ke dalam kategori jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana.

Secara keseluruhan, total kekuatan aparatur di Kabupaten Tabalong tercatat sebanyak 5.494 personil. Porsi terbesar terkonsentrasi pada sektor pelayanan dasar, yaitu bidang pendidikan dan kesehatan, yang didominasi oleh tenaga fungsional. Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya konsentrasi jumlah personil yang signifikan pada sektor-sektor pelayanan dasar, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan, yang mencerminkan prioritas pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga medis. Informasi ini menjadi acuan penting dalam memetakan kekuatan sumber daya manusia aparatur guna mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten Tabalong. Rincian persebaran jumlah ASN tersebut dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 1.6 Jumlah ASN per Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong Berdasarkan Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang (2025)

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	PNS			PPPK		Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	Fungsional	Pelaksana	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	5.03 Kepegawaian 5.04 Pendidikan Dan Pelatihan	6	17	7	3	0	33
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	7	6	5	1	4	23
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5	0	6	2	15	28
4	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	5.02 Keuangan	14	1	12	3	10	40
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	5.02 Keuangan	17	7	10	5	10	49
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	5.01 Perencanaan 5.05 Penelitian Dan Pengembangan	9	10	18	3	9	49
7	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	8	3	6	1	8	26
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan	8	8	6	1	15	38

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	PNS			PPPK		Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	Fungsional	Pelaksana	
		Dan Pencatatan Sipil						
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	10	466	54	200	87	817
10	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan 3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	17	50	15	34	9	125
11	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika 2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	8	15	4	3	11	41
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	20	15	28	2	22	87
13	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	17	6	41	4	18	86
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	20	13	26	1	14	74
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6	7	7	0	6	26
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Tabalong	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.14 Urusan Pemerintahan	9	7	5	1	6	28

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	PNS			PPPK		Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	Fungsional	Pelaksana	
		Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	7	7	7	2	12	35
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	16	1588	66	1063	54	2787
19	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	16	5	22	0	10	53
20	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	12	6	6	5	10	39
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	8	7	10	2	7	34
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	7	8	8	3	14	40
23	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7	2	8	1	15	33
24	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	8	8	8	3	6	33
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	6.01 Inspektorat Daerah	7	40	4	1	3	55
26	RSUD H. Badaruddin Kasim	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	14	183	30	34	4	265
27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	15	13	6	2	40	76
28	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	4.01 Sekretariat Daerah	20	38	49	7	21	135
29	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong	4.02 Sekretariat DPRD	4	6	15	2	6	33

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	PNS			PPPK		Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	Fungsional	Pelaksana	
30	Kecamatan Banua Lawas	7.01 Kecamatan	8	0	8	0	2	18
31	Kecamatan Bintang Ara	7.01 Kecamatan	8	1	3	0	2	14
32	Kecamatan Haruai	7.01 Kecamatan	7	0	6	0	2	15
33	Kecamatan Jaro	7.01 Kecamatan	7	1	7	0	2	17
34	Kecamatan Kelua	7.01 Kecamatan	12	2	8	0	3	25
35	Kecamatan Muara Harus	7.01 Kecamatan	8	0	7	0	3	18
36	Kecamatan Muara Uya	7.01 Kecamatan	8	1	5	0	2	16
37	Kecamatan Murung Pudak	7.01 Kecamatan	32	0	10	0	23	65
38	Kecamatan Pugaan	7.01 Kecamatan	8	0	6	0	2	16
39	Kecamatan Tanjung	7.01 Kecamatan	26	1	17	0	22	66
40	Kecamatan Tanta	7.01 Kecamatan	8	1	10	0	2	21
41	Kecamatan Upau	7.01 Kecamatan	8	0	2	0	5	15
	Jumlah		**462**	**2549**	**578**	**1389**	**516**	**5494**

Sumber : BKPSDM Kab.Tabalong, 2025 (diolah)

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Tabel 1.7 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
4	**PENDAPATAN DAERAH**	2.966.241.185.578,85	3.460.327.150.427,10
4.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	92.306.929.135,85	89.243.671.956,09
4.1.01	**PENDIDIKAN**	100.000.000,00	94.500.000,00
4.1.01.1-01.2-22.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	94.500.000,00
4.1.02	**KESEHATAN**	91.468.429.135,85	88.045.743.120,09
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	75.000.000,00	53.200.000,00
4.1.02.1-02.0-00.0-00.02	RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM	72.495.456.757,00	68.627.177.871,70
	UPTD PUSKESMAS TANJUNG	809.350.000,00	872.253.590,01
	UPTD PUSKESMAS HIKUN	1.630.000.000,00	1.732.320.171,00
	UPTD PUSKESMAS MURUNG PUDAK	1.276.620.000,00	1.445.800.805,60
	UPTD PUSKESMAS MABUUN	1.518.000.000,00	1.532.853.860,78
	UPTD PUSKESMAS TANTA	1.285.500.000,00	1.284.394.204,01
	UPTD PUSKESMAS MUARA HARUS	460.200.000,00	493.249.192,33
	UPTD PUSKESMAS KELUA	2.527.695.048,85	2.481.274.945,80
	UPTD PUSKESMAS MUNGKUR AGUNG	659.301.766,00	590.631.911,72
	UPTD PUSKESMAS PUGAAN	550.025.660,00	655.558.816,81
	UPTD PUSKESMAS BANUA LAWAS	1.358.145.300,00	1.429.700.066,80
	UPTD PUSKESMAS BINTANG ARA	513.600.000,00	498.221.097,01
	UPTD PUSKESMAS PANAAN	153.591.200,00	184.006.632,58
	UPTD PUSKESMAS HARUAI	1.657.000.000,00	1.749.006.181,00
	UPTD PUSKESMAS UPAU	421.962.999,00	452.849.395,39
	UPTD PUSKESMAS RIBANG	329.224.244,00	327.250.483,47
	UPTD PUSKESMAS MUARA UYA	2.264.317.267,00	1.924.380.810,73
	UPTD PUSKESMAS WIRANG	619.438.894,00	664.913.770,58
	UPTD PUSKESMAS JARO	864.000.000,00	1.046.699.312,77
4.1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	738.500.000,00	1.103.428.836,00
4.1.03.1-03.0-00.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	738.500.000,00	1.103.428.836,00
4.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	6.872.362.417,00	6.682.128.919,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
4.2.07	**TENAGA KERJA**	562.000.000,00	454.644.278,00
4.2.07.2-07.0-00.0-00.01	DINAS TENAGA KERJA	562.000.000,00	454.644.278,00
4.2.09	**PANGAN**	366.400.000,00	430.574.000,00
4.2.09.2-09.3-25.3-27.01	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	366.400.000,00	430.574.000,00
4.2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**	1.185.000.000,00	1.429.790.800,00
4.2.11.2-11.0-00.0-00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.185.000.000,00	1.429.790.800,00
4.2.15	**PERHUBUNGAN**	1.790.000.000,00	1.942.983.841,00
4.2.15.2-15.0-00.0-00.01	DINAS PERHUBUNGAN	1.790.000.000,00	1.942.983.841,00
4.2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	2.828.962.417,00	2.201.626.000,00
4.2.17.2-17.3-31.3-30.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.828.962.417,00	2.201.626.000,00
4.2.19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	140.000.000,00	222.510.000,00
4.2.19.2-19.3-26.0-00.01	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	140.000.000,00	222.510.000,00
4.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	10.500.000,00	10.640.000,00
4.3.27	**PERTANIAN**	10.500.000,00	10.640.000,00
4.3.27.3-27.0-00.0-00.02	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	10.500.000,00	10.640.000,00
4.4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	433.239.500,00	572.800.000,00
4.4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	433.239.500,00	572.800.000,00
4.4.01.4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	433.239.500,00	572.800.000,00
4.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	2.866.618.154.526,00	3.363.817.909.552,01
4.5.02	**KEUANGAN**	2.866.618.154.526,00	3.363.817.909.552,01
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.517.527.369.526,00	2.969.730.447.772,01
4.5.02.5-02.0-00.0-00.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	349.090.785.000,00	394.087.461.780,00
5	**BELANJA DAERAH**	3.598.148.471.731,19	3.034.189.656.706,97
5.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	2.136.673.432.611,00	1.802.245.602.295,08
5.1.01	**PENDIDIKAN**	595.083.934.923,00	510.310.461.870,97
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	595.083.934.923,00	510.310.461.870,97
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	509.241.269.173,00	429.334.113.759,00
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	413.136.309.497,00	343.391.519.178,00
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.360.543.429,00	75.802.332.333,00
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	10.744.416.247,00	10.140.262.248,00
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2	BELANJA MODAL	85.842.665.750,00	80.976.348.111,97
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	5.289.455.000,00	3.263.324.164,00
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.201.935.067,00	16.055.754.439,00
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.305.845.975,00	57.653.757.044,97
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.195.429.708,00	3.180.592.464,00
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	850.000.000,00	822.920.000,00
5.1.02	**KESEHATAN**	467.730.217.358,00	410.264.397.408,56
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	**DINAS KESEHATAN**	285.427.550.339,00	248.520.047.868,56
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	228.526.179.030,00	198.597.520.708,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	116.768.245.105,00	100.537.702.298,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.257.933.925,00	96.559.818.410,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	56.901.371.309,00	49.922.527.160,56
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	1.600.000.000,00	73.352.130,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.654.316.302,00	7.912.037.460,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.411.555.007,00	40.703.637.570,56
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan,	1.150.000.000,00	1.148.000.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
	dan Irigasi		
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	85.500.000,00	85.500.000,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02	**RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM**	182.302.667.019,00	161.744.349.540,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	145.246.782.214,00	129.119.807.491,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	60.767.059.000,00	53.994.144.387,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.479.723.214,00	75.125.663.104,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	37.055.884.805,00	32.624.542.049,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.059.894.235,00	27.926.943.359,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.790.036.000,00	4.532.637.150,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	62.730.540,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	105.954.570,00	102.231.000,00
5.1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	791.776.897.186,00	661.010.543.473,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	791.776.897.186,00	661.010.543.473,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	145.916.085.226,00	112.949.323.334,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	13.737.896.000,00	11.217.121.750,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.178.189.226,00	101.732.201.584,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	645.860.811.960,00	548.061.220.139,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.054.619.740,00	7.269.970.253,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.173.582.838,00	45.572.186.458,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	567.482.609.382,00	495.073.708.928,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	145.354.500,00
5.1.04	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	207.384.184.726,00	167.402.263.151,55
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	207.384.184.726,00	167.402.263.151,55
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.1	BELANJA OPERASI	56.632.974.630,00	43.853.212.620,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.1.01	Belanja Pegawai	7.679.818.000,00	5.472.879.303,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.198.156.630,00	37.625.333.317,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.1.05	Belanja Hibah	755.000.000,00	755.000.000,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.2	BELANJA MODAL	150.751.210.096,00	123.549.050.531,55
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.2.01	Belanja Modal Tanah	21.785.000.000,00	17.586.033.093,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	385.311.863,00	354.127.860,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.536.498.233,00	105.565.108.778,55
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	44.400.000,00	43.780.800,00
5.1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	54.874.639.269,00	34.221.452.871,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**	35.774.108.734,00	22.926.931.165,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	25.498.462.844,00	16.273.256.477,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	12.438.435.000,00	8.795.827.774,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.060.027.844,00	7.477.428.703,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	10.275.645.890,00	6.653.674.688,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.860.788.510,00	6.583.147.708,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.317.107.380,00	9.698.980,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	97.750.000,00	60.828.000,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	19.100.530.535,00	11.294.521.706,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	15.729.029.167,00	8.124.505.847,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	7.856.582.000,00	3.044.742.782,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.872.447.167,00	5.079.763.065,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	3.371.501.368,00	3.170.015.859,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.01	Belanja Modal Tanah	166.170.000,00	0,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.199.781.368,00	3.165.020.859,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.550.000,00	4.995.000,00
5.1.06	**SOSIAL**	50.609.823.121,00	44.127.914.987,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01	**DINAS SOSIAL**	50.609.823.121,00	44.127.914.987,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	49.915.650.886,00	43.545.525.364,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	7.031.154.000,00	4.368.640.816,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.052.166.021,00	27.964.775.548,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.832.330.865,00	11.212.109.000,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	694.172.235,00	582.389.623,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	510.867.617,00	399.854.257,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	183.304.618,00	182.535.366,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
5.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	439.398.914.095,99	354.121.783.610,93
5.2.07	**TENAGA KERJA**	30.205.354.160,00	24.761.585.105,00
5.2.07.2-07.0-00.0-00.01	**DINAS TENAGA KERJA**	30.205.354.160,00	24.761.585.105,00
5.2.07.2-07.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	28.938.489.973,00	23.588.409.472,00
5.2.07.2-07.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	7.306.326.000,00	5.287.447.944,00
5.2.07.2-07.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.632.163.973,00	18.300.961.528,00
5.2.07.2-07.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.266.864.187,00	1.173.175.633,00
5.2.07.2-07.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.108.564.187,00	1.028.989.519,00
5.2.07.2-07.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.000.000,00	0,00
5.2.07.2-07.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5.2.07.2-07.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	144.300.000,00	144.186.114,00
5.2.08	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	17.023.423.246,00	14.371.945.913,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	17.023.423.246,00	14.371.945.913,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	16.764.909.062,00	14.172.876.505,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.476.223.000,00	5.209.067.737,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.288.686.062,00	8.963.808.768,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2	BELANJA MODAL	258.514.184,00	199.069.408,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.964.184,00	179.150.902,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.550.000,00	19.918.506,00
5.2.09	**PANGAN**	85.563.481.510,00	72.194.884.085,89
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01	**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	85.563.481.510,00	72.194.884.085,89
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.1	BELANJA OPERASI	57.481.746.830,89	48.704.471.043,00
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.1.01	Belanja Pegawai	25.485.515.000,00	21.688.156.978,00
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.936.231.830,89	27.016.314.065,00
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.1.04	Belanja Subsidi	60.000.000,00	0,00
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.2	BELANJA MODAL	28.081.734.679,11	23.490.413.042,89
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.080.942.468,11	2.806.723.971,00
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.902.876.423,00	6.289.050.559,00
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan,	16.097.915.788,00	14.394.638.512,89

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
	dan Irigasi		
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00
5.2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**	69.829.178.664,00	59.529.808.934,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	69.829.178.664,00	59.529.808.934,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	54.266.101.829,00	45.446.865.732,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	13.416.975.000,00	10.832.800.511,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.849.126.829,00	34.614.065.221,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	15.563.076.835,00	14.082.943.202,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	3.495.894.315,00	3.192.485.442,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.258.099.980,00	6.286.435.002,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.801.505.000,00	4.596.522.758,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.577.540,00	7.500.000,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00
5.2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	21.589.526.789,00	15.819.141.081,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	21.589.526.789,00	15.819.141.081,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	14.649.611.593,00	10.925.928.501,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	8.580.163.000,00	6.308.846.973,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.069.448.593,00	4.617.081.528,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	6.939.915.196,00	4.893.212.580,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.305.548.256,00	3.910.547.747,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.544.366.940,00	906.049.836,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	90.000.000,00	76.614.997,00
5.2.13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	31.060.982.507,00	28.208.541.938,00
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	31.060.982.507,00	28.208.541.938,00
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	30.898.026.822,00	28.070.335.838,00
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.348.107.000,00	4.720.045.826,00
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.549.919.822,00	23.350.290.012,00
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	162.955.685,00	138.206.100,00
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.955.685,00	138.206.100,00
5.2.15	**PERHUBUNGAN**	55.771.665.578,00	47.369.025.620,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01	**DINAS PERHUBUNGAN**	55.771.665.578,00	47.369.025.620,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	30.526.920.651,20	24.061.234.385,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	9.200.918.000,00	7.716.119.414,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.326.002.651,20	16.345.114.971,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	25.244.744.926,80	23.307.791.235,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.692.188.351,00	13.306.045.018,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.292.549.359,80	7.959.155.545,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.260.007.216,00	2.042.590.672,00
5.2.16	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	32.999.362.026,00	26.816.944.462,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	32.999.362.026,00	26.816.944.462,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1	BELANJA OPERASI	28.509.324.525,00	22.681.763.081,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.01	Belanja Pegawai	8.391.571.000,00	6.157.344.692,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.617.753.525,00	13.024.418.389,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.05	Belanja Hibah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2	BELANJA MODAL	4.490.037.501,00	4.135.181.381,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.472.537.501,00	4.135.181.381,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.03	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.500.000,00	0,00
5.2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN**	49.569.332.558,00	39.763.657.594,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
	MENENGAH		
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	49.569.332.558,00	39.763.657.594,00
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1	BELANJA OPERASI	29.034.310.919,00	23.301.073.353,00
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.01	Belanja Pegawai	15.111.323.000,00	12.194.275.786,00
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.922.987.919,00	11.106.797.567,00
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2	BELANJA MODAL	20.535.021.639,00	16.462.584.241,00
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	733.629.390,00	643.249.147,00
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.758.674.433,00	15.819.335.094,00
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	42.717.816,00	0,00
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00
5.2.18	**PENANAMAN MODAL**	14.422.134.855,00	11.610.499.359,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	14.422.134.855,00	11.610.499.359,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	13.436.734.338,00	10.743.897.609,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.811.465.000,00	5.212.502.741,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.625.269.338,00	5.531.394.868,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	985.400.517,00	866.601.750,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	866.782.288,00	751.468.178,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	44.648.572,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.622.729,00	11.433.000,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	59.995.500,00	59.052.000,00
5.2.19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	55.454.725.550,00	34.707.042.571,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**	55.454.725.550,00	34.707.042.571,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	41.484.576.432,00	33.100.712.156,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.091.024.000,00	4.112.004.682,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.770.948.032,00	14.366.103.074,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	14.622.604.400,00	14.622.604.400,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.2	BELANJA MODAL	13.970.149.118,00	1.606.330.415,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	1.409.501.410,00	1.224.303.762,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.374.708,00	80.142.000,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.434.273.000,00	301.884.653,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.2.04	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000,00	0,00
5.2.23	**PERPUSTAKAAN**	16.276.781.799,00	14.384.998.801,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	16.276.781.799,00	14.384.998.801,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	11.983.671.840,00	10.251.776.117,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.881.434.000,00	5.715.247.838,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.102.237.840,00	4.536.528.279,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2	BELANJA MODAL	4.293.109.959,00	4.133.222.684,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.818.721.959,00	3.671.296.768,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.388.000,00	82.568.016,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	337.500.000,00	327.580.400,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	53.500.000,00	51.777.500,00
5.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	57.634.300.242,00	50.128.611.509,00
5.3.27	**PERTANIAN**	57.634.300.242,00	50.128.611.509,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02	**DINAS PERKEBUNAN DAN**	57.634.300.242,00	50.128.611.509,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
	PETERNAKAN		
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	24.390.308.102,00	20.496.981.642,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	8.485.061.000,00	6.411.312.094,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.905.247.102,00	14.085.669.548,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	33.243.992.140,00	29.631.629.867,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	647.882.057,00	555.975.955,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.664.167.083,00	10.045.163.588,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.798.743.000,00	18.931.689.224,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5.4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	222.529.218.163,00	172.399.628.370,00
5.4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	121.324.984.628,00	103.490.382.588,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	121.324.984.628,00	103.490.382.588,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	116.085.316.843,00	98.368.483.933,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	28.659.427.000,00	25.256.459.429,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.363.416.843,00	61.749.551.504,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	12.062.473.000,00	11.362.473.000,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	5.239.667.785,00	5.121.898.655,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.964.177.785,00	4.880.038.510,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	39.885.145,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	235.490.000,00	201.975.000,00
5.4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	101.204.233.535,00	68.909.245.782,00
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	**SEKRETARIAT DPRD**	101.204.233.535,00	68.909.245.782,00
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	90.998.148.681,00	61.090.037.404,00
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	31.602.986.068,00	27.152.316.159,00
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.145.162.613,00	33.687.721.245,00
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	10.206.084.854,00	7.819.208.378,00
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.493.343.694,00	7.804.880.028,00
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	697.621.000,00	0,00
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.120.160,00	14.328.350,00
5.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	517.336.735.012,19	467.612.499.018,00
5.5.01	**PERENCANAAN**	22.862.312.167,00	18.789.563.708,00
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	22.862.312.167,00	18.789.563.708,00
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	21.997.588.424,00	17.961.850.858,00
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	9.960.840.000,00	7.644.760.700,00
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.036.748.424,00	10.317.090.158,00
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2	BELANJA MODAL	864.723.743,00	827.712.850,00
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	724.723.743,00	689.046.100,00
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	140.000.000,00	138.666.750,00
5.5.02	**KEUANGAN**	473.162.289.990,19	430.531.767.257,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	446.337.020.976,19	409.400.284.181,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	29.001.117.543,00	17.460.177.242,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	11.354.899.000,00	8.045.079.682,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.267.355.565,00	6.536.254.622,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.03	Belanja Bunga	6.346.580.000,00	2.857.617.938,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.04	Belanja Subsidi	1.032.282.978,00	21.225.000,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	34.281.928.416,00	29.861.744.640,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.928.088.416,00	29.648.386.640,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.500.000,00	27.456.000,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	326.340.000,00	185.902.000,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.800.494.017,19	1.480.000.000,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.800.494.017,19	1.480.000.000,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4	BELANJA TRANSFER	370.253.481.000,00	360.598.362.299,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.446.400.000,00	20.446.400.000,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	349.807.081.000,00	340.151.962.299,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	26.825.269.014,00	21.131.483.076,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	26.162.113.639,00	20.532.567.604,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	15.898.605.000,00	12.514.075.716,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.263.508.639,00	8.018.491.888,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	663.155.375,00	598.915.472,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	375.980.375,00	350.168.246,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	171.675.000,00	135.105.426,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	115.500.000,00	113.641.800,00
5.5.03	**KEPEGAWAIAN**	21.312.132.855,00	18.291.168.053,00
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	21.312.132.855,00	18.291.168.053,00
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	20.428.834.677,00	17.508.191.054,00
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.306.286.000,00	5.640.750.845,00
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.122.548.677,00	11.867.440.209,00
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	883.298.178,00	782.976.999,00
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	865.116.358,00	766.104.999,00
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.181.820,00	16.872.000,00
5.6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	26.635.536.080,00	17.570.967.962,00
5.6.01	**INSPEKTORAT**	26.635.536.080,00	17.570.967.962,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	**INSPEKTORAT**	26.635.536.080,00	17.570.967.962,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	26.367.598.412,00	17.362.620.962,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	14.167.910.000,00	12.538.687.462,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.199.688.412,00	4.823.933.500,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	267.937.668,00	208.347.000,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267.937.668,00	208.347.000,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5.7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	101.110.637.851,00	87.189.685.547,00
5.7.01	**KECAMATAN**	101.110.637.851,00	87.189.685.547,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	**KECAMATAN TANJUNG**	23.882.907.779,00	20.732.583.424,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	22.281.240.933,00	19.257.809.968,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	10.660.872.000,00	8.480.808.449,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.620.368.933,00	10.777.001.519,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.601.666.846,0	1.474.773.456,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.457.471.846,00	1.337.302.947,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	**KECAMATAN MURUNG PUDAK**	22.755.748.978,00	18.703.304.640,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	21.344.161.930,00	17.548.973.196,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	11.168.044.000,00	8.756.319.768,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.176.117.930,00	8.792.653.428,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	1.411.587.048,00	1.154.331.444,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	735.225.606,00	682.420.431,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	676.361.442,00	471.911.013,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	**KECAMATAN TANTA**	5.702.567.480,00	4.991.630.137,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	5.033.031.251,00	4.454.887.690,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	3.590.718.000,00	3.102.083.434,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.442.313.251,00	1.352.804.256,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	669.536.229,00	536.742.447,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.910.229,00	69.084.180,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	594.626.000,00	467.658.267,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	**KECAMATAN MUARA HARUS**	5.360.869.974,00	4.713.234.063,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	5.151.098.925,00	4.526.348.108,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	3.196.398.000,00	2.666.440.080,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.954.700.925,00	1.859.908.028,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2	BELANJA MODAL	209.771.049,00	186.885.955,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209.771.049,00	186.885.955,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	**KECAMATAN BANUA LAWAS**	4.823.522.239,00	4.005.673.306,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	BELANJA OPERASI	4.726.362.984,00	3.914.612.456,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	3.413.391.000,00	2.715.611.879,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.312.971.984,00	1.199.000.577,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2	BELANJA MODAL	97.159.255,	91.060.850,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.159.255,	91.060.850,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	**KECAMATAN KELUA**	7.766.266.291,00	7.031.754.958,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1	BELANJA OPERASI	7.031.754.958,00	6.423.322.408,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	4.419.078.000,00	4.048.428.778,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.729.446.838,00	2.374.893.630,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2	BELANJA MODAL	617.741.453,00	608.432.550,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	412.786.853,00	403.477.950,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	**KECAMATAN PUGAAN**	4.606.900.203,00	3.510.941.765,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1	BELANJA OPERASI	4.468.107.012,00	3.407.824.985,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01	Belanja Pegawai	3.271.789.000,00	2.395.812.670,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.196.318.012,00	1.012.012.315,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2	BELANJA MODAL	138.793.191,00	103.116.780,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.793.191,00	103.116.780,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08	**KECAMATAN JARO**	4.199.509.724,00	3.828.190.189,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1	BELANJA OPERASI	4.100.020.372,00	3.729.370.189,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.01	Belanja Pegawai	3.049.339.000,00	2.783.828.771,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.681.372,00	945.541.418,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2	BELANJA MODAL	99.489.352,00	98.820.000,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.489.352,00	98.820.000,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09	**KECAMATAN MUARA UYA**	6.485.841.559,00	5.920.388.200,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1	BELANJA OPERASI	5.436.373.138,00	4.921.715.213,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.01	Belanja Pegawai	2.990.563.995,00	2.621.233.884,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.445.809.143,00	2.300.481.329,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2	BELANJA MODAL	1.049.468.421,00	998.672.987,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	549.090.221,00	505.719.560,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10	**KECAMATAN HARUAI**	4.621.863.623,00	4.281.327.254,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1	BELANJA OPERASI	3.993.622.341,00	3.689.347.389,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.01	Belanja Pegawai	2.665.587.000,00	2.515.640.005,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.328.035.341,00	1.173.707.384,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2	BELANJA MODAL	628.241.282,00	591.979.865,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	503.744.799,00	468.795.501,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11	**KECAMATAN UPAU**	6.969.194.161,00	6.122.290.322,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1	BELANJA OPERASI	6.793.628.955,00	5.950.657.822,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.01	Belanja Pegawai	2.965.491.000,00	2.375.316.938,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.828.137.955,00	3.575.340.884,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2	BELANJA MODAL	175.565.206,00	171.632.500,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.292.440,00	139.360.500,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.272.766,00	32.272.000,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12	**KECAMATAN BINTANG ARA**	**3.935.445.840,00**	**3.348.367.289,00**
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1	BELANJA OPERASI	3.927.120.840,00	3.340.375.289,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.01	Belanja Pegawai	2.829.836.000,00	2.399.664.685,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.097.284.840,00	940.710.604,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2	BELANJA MODAL	8.325.000,00	7.992.000,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.325.000,00	7.992.000,00
5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	25.676.398.558,00	22.413.155.075,00
5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25.676.398.558,00	22.413.155.075,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25.676.398.558,00	22.413.155.075,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	24.897.441.817,00	21.778.506.945,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.293.990.000,00	4.311.781.970,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.222.811.817,00	6.086.084.975,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	11.380.640.000,00	11.380.640.000,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	778.956.741,00	634.648.130,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	778.956.741,00	634.648.130,00

Sumber : BPKAD Kab. Tabalong, 31 Desember 2025 (Unaudited)

Tabel 1.8 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah TA 2025

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.966.241.185.578,85**	**3.460.327.150.427,10**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**290.230.809.786,85**	**325.790.441.551,10**
4.1.01	**Pajak Daerah**	135.211.500.000,00	141.544.529.056,00
4.1.02	**Retribusi Daerah**	24.797.637.145,00	52.332.280.865,00
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	14.564.005.726,00	14.541.441.024,00
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	115.657.666.915,85	117.372.190.606,10
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.462.131.090.792,00**	**2.883.146.934.641,00**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	2.304.519.129.065,00	2.727.542.758.899,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	157.611.961.727,00	155.604.175.742,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**213.879.285.000,00**	**251.389.774.235,00**
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	213.879.285.000,00	251.389.774.235,00
5	**BELANJA DAERAH**	**3.598.148.471.731,19**	**3.034.189.656.706,97**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.009.412.619.642,09**	**1.650.571.271.749,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	945.467.653.665,00	780.352.852.808,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	988.858.638.487,09	802.616.487.355,00
5.1.03	**Belanja Bunga**	6.346.580.000,00	2.857.617.938,00
5.1.04	**Belanja Subsidi**	1.092.282.978,00	21.225.000,00
5.1.05	**Belanja Hibah**	54.815.133.647,00	53.510.979.648,00
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	12.832.330.865,00	11.212.109.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.205.681.877.071,91**	**1.021.540.022.658,97**
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	33.746.020.725,00	25.339.498.591,00
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	179.233.090.337,11	156.235.924.190,00
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	248.680.289.767,80	196.588.948.341,53
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	737.669.805.759,00	637.430.921.255,44
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	3.863.344.983,00	3.751.644.214,00
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	2.489.325.500,00	2.193.086.067,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**12.800.494.017,19**	**1.480.000.000,00**
5.3.01	**Belanja Tidak Terduga**	12.800.494.017,19	1.480.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**370.253.481.000,00**	**360.598.362.299,00**
5.4.01	**Belanja Bagi Hasil**	20.446.400.000,00	20.446.400.000,00
5.4.02	**Belanja Bantuan Keuangan**	349.807.081.000,00	340.151.962.299,00

Sumber : BPKAD Kab. Tabalong, 31 Desember 2025 (Unaudited)

Tabel 1.9 Realisasi Anggaran Menurut Program TA 2025

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	419.257.115.768,00	348.622.213.737,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	159.828.571.480,00	150.205.833.560,97
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.744.353.203,00	4.394.465.516,00
2	KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	292.445.022.811,00	257.012.127.301,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	170.993.925.340,00	150.250.173.753,56
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.334.318.400,00	2.279.582.961,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	290.777.880,00	93.568.700,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	666.172.927,00	629.944.693,00
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.479.785.634,00	20.998.556.641,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.148.466.447,00	14.830.973.058,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	50.047.829.464,00	43.275.579.621,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	6.321.377.400,00	2.051.792.325,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	114.220.043.625,00	64.199.467.902,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	574.697.482.709,00	511.994.440.894,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	777.029.107,00	586.991.235,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.084.882.800,00	3.557.241.891,00
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.423.720.983,00	9.712.082.179,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.110.365.000,00	693.189.132,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	19.960.211.225,00	19.078.822.674,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.618.900.000,00	1.618.900.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	149.738.618.018,00	118.295.786.756,55
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.160.412.924,00	19.781.646.798,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.795.006.629,00	1.901.319.971,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	8.863.051.335,00	6.713.833.016,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	8.056.168.381,00	5.824.653.086,00
6	SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.998.794.117,25	6.877.689.540,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.375.384.120,00	3.735.122.418,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.096.869.147,00	3.519.035.637,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	30.307.052.039,00	28.361.509.932,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	496.952.799,25	352.285.561,00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.334.770.898,50	1.282.271.899,00
7	TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.596.258.476,00	7.165.191.236,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	224.160.893,00	172.939.930,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	6.157.260.738,00	5.551.572.898,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	8.603.990.153,00	7.720.012.676,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	5.623.683.900,00	4.151.868.365,00
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.860.210.294,00	6.862.914.027,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	826.559.115,00	760.051.600,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	422.551.373,00	365.737.473,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	294.266.461,00	277.874.747,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	141.435.371,00	130.400.828,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	418.602.704,00	369.535.851,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	422.457.259,00	392.827.330,00
9	PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.827.932.650,99	32.015.215.821,93
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	2.359.703.709,00	2.179.023.946,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	994.538.065,00	658.534.647,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	331.647.107,00	286.230.276,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	167.649.308,00	123.707.428,00
10	PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	40.860.500,00	34.803.500,00
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	22.387.219.000,00	17.909.722.910,00
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	104.290.000,00	58.956.000,00
11	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.378.053.617	27.517.888.909

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	2	3	4	5
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.272.688.000	921.537.715
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	5.136.374.473	4.388.495.920
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	9.930.401.624	8.358.671.841
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	483.812.237	376.420.407
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	248.374.260	225.944.907
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	144.888.400	137.181.100
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	339.761.979	299.401.240
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	98.726.500	66.431.160
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	19.796.097.574	17.237.835.735
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.868.745.941,00	12.519.605.524,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.344.160.930,00	1.171.349.472,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	198.744.016,00	170.836.222,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.011.008.902,00	1.812.332.863,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	166.867.000,00	145.017.000,00
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.233.003.372,00	6.320.107.245,00
		PROGRAM PENATAAN DESA	17.913.101.797,00	17.831.070.514,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	227.122.695,00	163.421.000,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.776.832.024,00	2.400.562.877,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.910.922.619,00	1.493.380.302,00
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	489.725.817,00	462.885.941,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.520.349.852,00	3.148.997.116,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.627.265.000,00	1.600.721.000,00
15	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.072.735.363,00	19.075.425.108,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	31.698.930.215,00	28.293.600.512,00
16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.986.533.640	8.289.433.552

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	2	3	4	5
		KABUPATEN/KOTA		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8.722.082.496	8.308.188.325
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	11.359.854.570	9.576.032.912
17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.775.597.245	18.065.702.606
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	64.431.000	64.425.900
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	73.450.263	66.475.838
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	361.414.380	328.859.293
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	217.300.000	217.299.500
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	537.449.529	388.876.702
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	750.938.203	583.418.568
18	PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.490.606.402,00	8.980.350.894,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	573.872.000,00	569.471.682,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.041.204.528,00	1.022.372.448,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	659.569.080,00	449.282.846,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	279.793.898,00	226.008.990,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	377.088.947,00	363.012.499,00
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.099.215.151,00	7.460.376.419,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.821.886.827,00	2.353.393.522,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	35.846.087.062,00	20.161.320.464,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00
20	STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	564.247.920,00	381.339.200,00
21	PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	366.643.400,00	261.950.473,00
22	KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7.644.311.070,00	6.745.410.491,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	609.583.402,00	342.538.566,00
23	PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.821.315.427,00	10.081.782.032,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3.293.372.316,00	3.205.308.971,00
24	KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	775.446.255,00	715.162.952,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	386.647.801,00	382.744.846,00
25	KELAUTAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	458.458.847,00	440.194.170,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.195.669.813,00	4.018.794.063,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER	172.628.029,00	131.590.264,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	2	3	4	5
		DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.827.031.013,00	1.712.073.152,00
26	PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.817.697.454,00	931.926.570,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.335.662.234,00	2.295.592.417,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	329.176.822,00	299.433.179,00
27	PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	26.198.352.646,21	22.781.438.647,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	44.403.195.194,50	39.709.255.486,96
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.069.067.051,00	1.855.717.963,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.475.604.403,80	2.303.807.379,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.877.286.228,50	12.411.587.349,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.839.017.686,00	1.696.325.022,00
28	PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	15.475.080,00	8.025.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	21.518.359.703,00	17.448.086.945,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	361.439.388,00	244.345.689,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	84.522.728,00	13.835.131,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	116.403.975,00	83.240.410,00
29	PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.647.164.964,00	2.225.350.214,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	16.217.400,00	11.021.718,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	29.168.700,00	14.694.080,00
30	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.757.666.248,00	54.879.157.965,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	53.913.979.113,00	44.369.996.152,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.653.339.267,00	4.241.228.471,00
31	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.733.115.563,00	45.061.466.933,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	44.471.117.972,00	23.847.778.849,00
32	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.119.415.112,00	11.330.276.015,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.807.399.173,00	1.104.145.212,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.796.856.085,00	2.724.062.151,00
33	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	72.032.212.986,00	57.399.441.185,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	392.299.924.054,19	366.321.187.267,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.401.800.200,00	1.536.175.494,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.428.352.750,00	5.274.963.311,00
34	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.357.509.318,00	9.148.527.835,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.762.881.548,00	5.782.290.118,00
35	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.191.741.989,00	3.360.350.100,00
36	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.138.641.797,00	3.631.080.330,00
37	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.592.681.983,00	15.756.170.537,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.081.047.180,00	1.365.710.554,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	961.806.917,00	449.086.871,00
38	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.314.472.071	63.355.074.453
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.676.840.407	15.659.839.882
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.303.490.875	3.992.515.652
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.518.599.645	2.378.077.537
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	774.651.201	586.852.483
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	722.583.652	647.787.614
39	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	11.456.643.512	10.718.189.190
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.451.116.212	6.965.350.478
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.087.202.300	1.653.568.107
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.721.680.430	1.680.330.110
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.287.273.570	932.617.340
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	672.482.534	463.099.850

Sumber : BPKAD Kab. Tabalong, 31 Desember 2025 (Unaudited)

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;

Permasalahan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong merupakan gambaran atas berbagai tantangan utama yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil kajian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029, permasalahan strategis yang dihadapi meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pemerataan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Adapun permasalahan strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

   Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari masih adanya ketimpangan sosial ekonomi, angka kemiskinan yang relatif tinggi, serta belum meratanya akses terhadap sumber daya ekonomi. Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Selain itu, terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya daya serap tenaga kerja turut mempengaruhi peningkatan taraf hidup masyarakat.
2. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

   Kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam mendukung kemajuan daerah. Pemerataan akses pendidikan, tingkat literasi masyarakat, serta kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pembangunan keluarga sejahtera juga masih memerlukan perhatian agar dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan produktif.
3. Belum Optimalnya Penguatan Ekonomi Daerah dan Sektor-Sektor Unggulan

   Struktur ekonomi Kabupaten Tabalong masih bergantung pada sektor-sektor tertentu dan belum sepenuhnya bertransformasi menuju ekonomi yang inovatif dan berkelanjutan. Sektor pertanian, perikanan, industri kecil dan menengah, serta pariwisata memiliki potensi besar, namun belum dikelola secara optimal. Investasi daerah masih perlu diperkuat melalui penyediaan infrastruktur ekonomi yang memadai dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, kontribusi sektor perdagangan dan UMKM terhadap perekonomian daerah masih dapat ditingkatkan melalui digitalisasi dan penguatan kapasitas pelaku usaha lokal.
4. Belum Meratanya dan Belum Berkualitasnya Infrastruktur Dasar dan Wilayah

   Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan listrik, air bersih, serta perumahan dan kawasan permukiman masih

menghadapi kendala pemerataan dan kualitas. Keterbatasan sarana dan prasarana dasar di beberapa wilayah menyebabkan rendahnya konektivitas dan distribusi layanan publik. Tata kelola pertanahan yang belum optimal juga berdampak terhadap efisiensi pembangunan wilayah dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang. Kondisi ini menjadi penghambat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

5. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik

   Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu diperkuat, terutama dalam hal tata kelola birokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta penerapan sistem digitalisasi layanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif dan aman. Reformasi birokrasi yang berorientasi pada kinerja serta peningkatan kapasitas aparatur perlu terus didorong untuk menciptakan pemerintahan yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penguatan daya saing desa menjadi bagian penting dalam meningkatkan kontribusi wilayah perdesaan terhadap pembangunan daerah.

6. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Meningkatnya Risiko Bencana

   Permasalahan lingkungan hidup menjadi perhatian penting mengingat adanya peningkatan degradasi lingkungan, perubahan tata guna lahan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, serta meningkatnya frekuensi bencana alam. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan dan mengancam keberlanjutan pembangunan. Diperlukan penguatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konservasi lingkungan, serta penguatan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana untuk mewujudkan daerah yang tangguh dan berketahanan.

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah;

Visi dan misi Kepala Daerah merupakan arah dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan pembangunan daerah selama periode tahun 2025–2029. Visi dan misi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah agar pelaksanaannya terarah, terukur, dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

1. Visi Kepala Daerah

   Visi RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai keadaan dan kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2029 sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan selama lima tahun. Visi ini menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan, utamanya Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.

   Visi Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029 disusun selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong periode 2025–2029, serta merupakan penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2005–2025, yaitu:

“TABALONG TERDEPAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

Visi RPJPD tersebut mencerminkan cita-cita Kabupaten Tabalong untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang semakin baik, maju, dan berdaya saing tinggi. Kemajuan yang dicapai diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai daerah dengan daya ungkit tinggi terhadap keberhasilan pembangunan di Kalimantan Selatan, khususnya dalam perannya sebagai Gerbang Logistik Kalimantan serta daerah penyangga yang strategis bagi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dengan memedomani arah pembangunan jangka panjang tersebut, maka ditetapkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029, yaitu:

“MENUJU TABALONG SMaRT (SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS, DAN TERDEPAN)”

Makna dari pernyataan visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Kabupaten Tabalong Sejahtera
  Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil.
- Kabupaten Tabalong Maju
  Menunjukkan tekad Kabupaten Tabalong untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.
- Kabupaten Tabalong Religius
  Menunjukkan komitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam seluruh aspek kehidupan.
- Kabupaten Tabalong Terdepan
  Menggambarkan tekad untuk menjadi pelopor dan unggul dalam berbagai bidang, baik pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, visi “MENUJU TABALONG SMaRT” merupakan cita-cita untuk membangun daerah yang sejahtera, berkemajuan, berlandaskan nilai-nilai religius, dan menjadi yang terdepan dalam inovasi serta pelayanan publik yang berkualitas.

2. Misi Kepala Daerah

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan empat (4) misi pembangunan daerah yang menjadi arah kebijakan dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Tabalong selama periode 2025–2029, yaitu sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Upaya ini ditujukan untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Tabalong yang hidup berkualitas, menikmati stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperoleh akses terhadap layanan dasar dan peluang pengembangan diri.
Langkah-langkah pelaksanaannya antara lain:
a) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perluasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja;
c) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat; dan
d) Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk penguatan UMKM dan sektor pertanian.

Misi 2: Mendorong Kemajuan Daerah
Misi ini diarahkan untuk mempercepat kemajuan Kabupaten Tabalong melalui pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang berdaya saing tinggi.
Langkah-langkah pelaksanaannya antara lain:
a) Meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan potensi lokal, inovasi, serta memperluas jejaring kerja sama regional dan nasional;
b) Membangun infrastruktur yang modern dan memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
c) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari; dan
d) Memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

Misi 3: Mengembangkan Kehidupan yang Religius
Misi ini berfokus pada pembentukan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan.
Langkah-langkah pelaksanaannya antara lain:
a) Menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat serta mendorong kerukunan antarumat beragama;
b) Meningkatkan kemajuan dan pelestarian budaya lokal sebagai identitas daerah; dan
c) Meningkatkan pengarusutamaan gender, perlindungan anak, serta pembangunan kepemudaan.

Misi 4: Menjadi Daerah yang Terdepan
Misi ini bertujuan menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai wilayah yang unggul dan inovatif dalam berbagai aspek pembangunan, baik di tingkat regional maupun nasional.
Langkah-langkah pelaksanaannya antara lain:
a) Menjadi pionir dalam inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi daerah berbasis sistem meritokrasi; dan
b) Berkomitmen memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan standar

tinggi dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah;

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dengan visi "MENUJU TABALONG SMaRT (SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS DAN TERDEPAN)". Program prioritas pembangunan dirumuskan ke dalam empat misi pembangunan yang dijabarkan lebih lanjut dalam program prioritas perangkat daerah.

Secara khusus, Pemerintah Kabupaten Tabalong memiliki 7 (tujuh) program prioritas utama Bupati dan Wakil Bupati sebagai janji kepada masyarakat. Ketujuh program prioritas ini kemudian diintegrasikan dan dijabarkan ke dalam program-program teknis dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Integrasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati ke dalam RPJMD Sebagai bentuk komitmen politik dan fokus pembangunan, ketujuh program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dijabarkan ke dalam program-program perangkat daerah yang relevan. Penjabaran tersebut dimuat dalam tabel berikut:

Tabel 1.10 Penjabaran Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati ke dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
SATU DESA SATU WIFI GRATIS	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.13.02 Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
SATU DESA SATU DA'I	4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
TABALONG PASTI SEHAT	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
	2.07.05 Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
	1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
MENCETAK 15.000 TENAGA TERAMPIL	2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
	3.25.06 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKP2TPH
	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP2TPH
	3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKP2TPH
	3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	Disbunnak
	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
1.000 BEASISWA SARJANA	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
JALAN DAN JEMBATAN MANTAP	1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.27.03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas KP2TPH dan Disbunnak
KREDIT MODAL UNTUK UMKM DAN PETANI	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	2.17.08 Program Pengembangan UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD

Sumber : RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Seluruh program prioritas, termasuk yang merupakan penjabaran dari janji politik Bupati dan Wakil Bupati, dirangkum dalam kerangka logis RPJMD yang terstruktur berdasarkan Misi, Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Indikator Kinerja. Secara keseluruhan, Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030 dikelompokkan ke dalam empat misi sebagai berikut:

Misi I: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
Misi ini difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya kemiskinan dan pengangguran, serta menguatnya perekonomian daerah yang inklusif. Program-program unggulan dalam misi ini antara lain:

- Bidang Pendidikan: Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Bidang Kesehatan: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan (penanganan stunting, AKI), Program Sediaan Farmasi, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- Bidang Sosial & Tenaga Kerja: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja ("Mencetak 15.000 Tenaga Terampil").
- Bidang Perekonomian: Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM ("Kredit Modal untuk UMKM dan Petani"), Program Penyediaan Sarana/Prasarana Pertanian dan Perikanan.
- Bidang Infrastruktur Dasar: Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ("Tabalong Pasti Sehat"), Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Misi II: Mendorong Kemajuan Daerah
Misi ini bertujuan mewujudkan wilayah yang berkembang seimbang dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas infrastruktur, pembangunan desa, serta kualitas lingkungan hidup.

- Bidang Infrastruktur: Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ("Jalan dan Jembatan Mantap"), Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Bidang Pemberdayaan Desa: Program Penataan Desa ("Satu Desa Satu Wifi Gratis"), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (seluruh kecamatan).
- Bidang Lingkungan Hidup & Bencana: Program Pengelolaan Persampahan, Program Penanggulangan Bencana.

Misi III: Mengembangkan Kehidupan yang Religius
Misi ini diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia, hidup harmonis, serta memajukan kebudayaan dan kesetaraan gender.

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ("Satu Desa Satu Da'i").
- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP dan Kecamatan).
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Misi IV: Menjadi Daerah yang Terdepan
Misi ini memfokuskan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan inovatif, serta pelayanan publik yang berkualitas.

- Bidang Tata Kelola Pemerintahan: Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Kepegawaian Daerah.
- Bidang Pelayanan Publik: Program Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Program Penyediaan Layanan Administrasi Kecamatan.
- Bidang Inovasi dan Teknologi: Program Pengelolaan Aplikasi Informatika ("Satu Desa Satu Wifi Gratis"), Program Riset dan Inovasi Daerah.

Dengan demikian, seluruh program prioritas pembangunan daerah Tahun 2025, baik yang berasal dari komitmen politik kepala daerah maupun hasil cascading RPJMD, telah terintegrasi dalam satu kerangka perencanaan yang komprehensif untuk mewujudkan visi Tabalong SMaRT.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Pembangunan daerah merupakan upaya sistematis dan terencana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proses perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan,

yang mencakup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan RKPD (P-RKPD). Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di berbagai sektor pemerintahan.

Tabel berikut menyajikan jumlah program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dan P-RKPD, serta alokasi pagu anggaran yang disediakan untuk masing-masing urusan pemerintahan. Secara umum, terdapat peningkatan jumlah kegiatan dan sub-kegiatan dalam P-RKPD dibandingkan dengan RKPD awal.

Beberapa urusan pemerintahan yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan umum dan penataan ruang. Hal ini menunjukkan prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Selain itu, sektor pertanian, perdagangan, dan perindustrian juga mendapatkan perhatian guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Total pagu anggaran yang dialokasikan dalam RKPD sebesar Rp2.854.501.325.821,00 mengalami peningkatan signifikan dalam P-RKPD menjadi Rp3.385.093.531.991,63. Peningkatan ini menunjukkan adanya tambahan sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung realisasi program dan kegiatan pembangunan daerah.

Tabel 1.11 Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Urusan Pemerintahan Kabupaten Tabalong

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	
		RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3	3	12	13	69	71	470.968.734.599,00	583.610.505.991,00
2	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	20	21	76	81	373.400.673.156,00	436.067.041.453,00
3	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	9	22	19	77	77	449.559.617.240,00	657.167.643.721,54
4	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	5	9	10	20	21	152.177.155.779,00	160.269.716.629,00
5	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	4	15	15	63	62	54.877.466.117,00	54.849.639.269,00
6	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	6	16	16	36	35	47.614.529.830,00	51.167.040.339,50
7	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	5	15	16	29	30	20.039.620.428,00	28.236.562.954,00
8	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	7	7	19	21	31	34	10.248.766.867,00	11.268.061.537,00

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	
		RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ANAK								
9	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	6	13	13	25	24	43.026.366.719,00	43.716.938.847,00
10	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3	3	3	3	3	3	29.418.893.000,00	21.964.327.500,00
11	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	10	16	16	33	32	70.250.000.000,00	69.969.279.664,00
12	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	17	17	45	44	38.026.326.564,00	19.077.985.271,00
13	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	9	8	30	29	18.974.204.219,00	27.926.982.507,00
14	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	8	8	12	26	2.107.559.772,00	5.637.340.669,00
15	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	2	17	16	42	41	48.971.792.500,00	55.558.196.176,06
16	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	10	10	38	36	23.789.510.110,00	32.071.270.706,00
17	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6	6	11	10	21	20	18.957.224.435,00	24.351.631.633,00
18	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	13	12	33	32	12.666.397.566,00	14.422.134.855,00
19	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	4	15	15	38	35	33.091.328.908,00	49.948.540.064,00
20	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	5	4	712.498.420,00	564.247.920,00
21	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	2	1	5	3	729.567.400,00	366.643.400,00
22	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2	2	4	3	4	4	8.300.393.410,00	8.254.220.472,00
23	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	2	9	9	43	43	10.782.184.243,00	15.114.694.743,00
24	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	2	7	7	9	9	2.664.231.952,00	1.162.103.656,00
25	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	4	5	5	9	9	5.369.490.987,00	4.159.231.893,00
26	3.26 URUSAN	3	3	4	4	8	8	6.501.008.242,00	4.782.591.510,00

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	
		RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
27	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	18	18	49	49	70.032.026.457,00	84.498.342.610,30
28	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	5	10	10	15	15	21.843.246.741,00	21.776.446.858,07
29	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	3	3	5	5	1.587.422.194,00	2.901.137.296,00
30	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	3	3	19	18	54	53	87.134.536.687,00	116.464.594.444,00
31	4.02 SEKRETARIAT DPRD	2	2	17	17	62	60	88.669.624.339,00	101.116.980.253,00
32	5.01 PERENCANAAN	3	3	15	15	56	55	18.965.163.262,00	18.630.650.555,00
33	5.02 KEUANGAN	4	4	14	13	79	80	467.699.849.122,00	489.085.880.594,00
34	5.03 KEPEGAWAIAN	2	2	11	10	38	37	13.667.173.897,00	16.822.766.251,10
35	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	3	3	3	3	4.591.353.707,00	4.254.630.989,00
36	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	3	3	8	8	3.597.466.050,00	4.138.641.797,00
37	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	3	3	10	10	27	27	20.727.936.634,00	26.634.486.080,00
38	7.01 KECAMATAN	6	6	17	17	57	51	89.485.807.523,00	101.099.997.967,00
39	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	12	12	30	29	13.274.176.745,00	15.209.927.345,00
	Jumlah	**156**	**157**	**444**	**438**	**1.287**	**1.285**	**2.854.501.325.821,00**	**3.385.093.531.991,63**

Sumber : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kab. Tabalong Tahun 2025

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Tabalong senantiasa berupaya untuk mengatasi berbagai dinamika lingkungan strategis, baik yang bersifat mendukung maupun yang menjadi hambatan. Upaya-upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan alternatif solusi terbaik yang dinamis dan adaptif terhadap setiap permasalahan yang timbul, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Pilihan strategi dan kebijakan untuk mencapai pemenuhan keenam SPM di Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

Penerapan SPM ini merupakan implementasi konkret dari visi "MENUJU TABALONG SMaRT (SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS DAN TERDEPAN)" dan misi-misi pembangunan daerah, serta didukung oleh kebijakan penganggaran daerah yang tertuang dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tabalong Tahun 2025, yang mengarahkan belanja daerah pada pemenuhan pelayanan dasar secara memadai, yang mengarahkan belanja daerah pada pemenuhan pelayanan dasar secara memadai, berbasis prinsip money follow program, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan kepada masyarakat.

Dalam KUA Perubahan Tahun 2025, ditegaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pemenuhan SPM melalui alokasi anggaran yang proporsional, antara lain:

- Pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah;
- Dukungan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40%;
- Penguatan alokasi dana desa minimal 10% dari dana perimbangan;
- Pengendalian belanja pegawai maksimal 30%;
- Serta mendorong kolaborasi pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan/atau swasta.

Dengan dukungan kebijakan tersebut, strategi dan program pencapaian SPM di Kabupaten Tabalong diarahkan sebagai berikut:

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

   Strategi pencapaian SPM Bidang Pendidikan difokuskan pada peningkatan pengelolaan lembaga pendidikan di semua jenjang, yang sejalan dengan Misi I: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat. Arah kebijakan ini mendukung visi "SEJAHTERA" dengan memastikan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Tabalong. Dukungan KUA Perubahan 2025 diwujudkan melalui kebijakan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah, sehingga program-program peningkatan kualitas pendidikan dapat terlaksana secara optimal.

   Strategi pencapaian SPM Bidang Pendidikan difokuskan pada:

   a) Peningkatan pengelolaan Lembaga Pendidikan PAUD.
   b) Peningkatan pengelolaan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar.
   c) Peningkatan pengelolaan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
   d) Peningkatan pengelolaan Lembaga Pendidikan Kesetaraan.
   e) Pemerataan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

   Strategi pencapaian SPM Bidang Kesehatan melalui peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif dari ibu hamil hingga lansia merupakan implementasi langsung dari program prioritas "TABALONG PASTI SEHAT" yang merupakan turunan dari Misi I: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera. Kebijakan ini mendukung terwujudnya visi "SEJAHTERA" melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan KUA Perubahan 2025 mendukung melalui penguatan belanja pelayanan dasar serta pengendalian belanja pegawai agar lebih optimal dalam mendukung layanan kesehatan yang langsung dirasakan masyarakat.

   Strategi pencapaian SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan melalui:

   a) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil.
   b) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin.
   c) Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir.
   d) Peningkatan pelayanan kesehatan balita.
   e) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
   f) Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif.
   g) Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
   h) Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
   i) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.
   j) Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa

(ODGJ) Berat.
k) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis.
l) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Strategi pembangunan infrastruktur air bersih dan ketahanan pangan mendukung Misi II: Mendorong Kemajuan Daerah dengan mewujudkan wilayah yang berkembang seimbang. Program ini juga berkontribusi pada visi "MAJU" melalui pengembangan infrastruktur dasar yang berkualitas. Strategi pembangunan infrastruktur air bersih dan ketahanan pangan didukung secara kuat melalui kebijakan KUA Perubahan 2025 yang mengalokasikan minimal 40% belanja daerah untuk infrastruktur pelayanan publik.

Strategi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

a) Melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung penyediaan air bersih, ketahanan pangan, serta fasilitas pelayanan publik lainnya.

4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Strategi peningkatan kualitas perumahan dan permukiman sejalan dengan Misi II: Mendorong Kemajuan Daerah dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak. Kebijakan ini mendukung visi "MAJU" melalui penataan lingkungan permukiman yang berkualitas. Strategi peningkatan kualitas perumahan dan permukiman juga didukung oleh arah kebijakan belanja infrastruktur serta kolaborasi pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan/atau swasta.

Strategi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi:

a) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi korban pasca bencana.
b) Pengembangan fasilitas rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena program relokasi pemerintah.

5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Strategi penguatan koordinasi dan penanganan kebencanaan merupakan implementasi dari Misi III: Mengembangkan Kehidupan yang Religius dengan menciptakan masyarakat yang hidup dalam harmoni. Kebijakan ini juga mendukung visi "RELIGIUS" melalui terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum. Strategi penguatan koordinasi dan penanganan kebencanaan diperkuat melalui asumsi KUA Perubahan 2025 terkait stabilitas ketenteraman dan keamanan daerah agar aktivitas sosial ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Strategi pencapaian SPM pada urusan ini adalah:

a) Peningkatan kerjasama, sinergitas, dan koordinasi antar SKPD penyelenggara 6 (enam) urusan wajib dasar.

b) Peningkatan penyajian data warga negara yang terdampak penegakan Perda/Perkada yang akuntabel.
c) Penyediaan data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam dokumen sah (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi).
d) Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai kebencanaan kepada masyarakat.

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Strategi penanggulangan kemiskinan melalui program perlindungan sosial secara langsung mendukung Misi I: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan merupakan bagian dari komitmen visi "SEJAHTERA". Program-program sosial ini juga mencerminkan nilai-nilai "RELIGIUS" melalui kepedulian terhadap kelompok rentan. Strategi penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial didukung oleh kebijakan penganggaran yang berorientasi pada program prioritas dan keberpihakan kepada masyarakat, sesuai prinsip money follow program.
Berdasarkan strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, pencapaian SPM Bidang Sosial diinstumentasikan melalui program strategis:

a) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
b) Program Rehabilitasi Sosial.
c) Program Penanganan Bencana.

Secara keseluruhan, penerapan SPM di Kabupaten Tabalong tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban normatif, tetapi merupakan strategi sistematis yang terintegrasi dengan kebijakan penganggaran daerah melalui KUA Perubahan Tahun 2025. Sinergi antara perencanaan dan penganggaran ini memastikan bahwa setiap target SPM didukung oleh alokasi sumber daya yang memadai, sehingga mampu mewujudkan Tabalong yang SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS, dan TERDEPAN.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Tabalong (2024-2025)

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia	75,97	76,94	1,28
2.	Angka Kemiskinan	5,64	4,67	-17,20
3.	Angka Pengangguran	3,44	3,48	1,16
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,87	4,69	-3,70
5.	PDRB per kapita Atas dasar harga berlaku (ADHB)	122.312.888,43	126.520.241,12	3,44
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,30	0,31	3,33

Sumber : BPS Tabalong, 2025

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabalong tahun 2025 yang mencapai 76,94 (tumbuh 1,28%) merupakan hasil dari transformasi layanan publik yang menyentuh akar rumput. Pada dimensi kesehatan, peningkatan Usia Harapan Hidup didorong oleh inovasi layanan homecare bagi lansia, operasional Smart Hospital, serta penguatan peran bidan dan kader posyandu dalam menekan angka kematian ibu. Di sektor pendidikan, peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dipacu oleh kebijakan strategis seperti rencana pembangunan Sekolah Rakyat seluas 6,9 Ha, dukungan anggaran Rp53 miliar untuk relokasi sekolah, serta program beasiswa "1.000 Sarjana". Efektivitas bantuan pendidikan juga terlihat dari penyaluran beasiswa SD-SMP

langsung ke rekening siswa serta penguatan dana BOS-P bagi 15 lembaga pendidikan nonformal (Paket A, B, dan C) guna memastikan keberlanjutan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan manusia ini berimplikasi positif pada penurunan Angka Kemiskinan yang sangat signifikan, dari 5,64% menjadi 4,67%. Kualitas penurunan ini ditandai dengan merosotnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 0,953 ke 0,22 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,199 ke 0,02. Data ini mengonfirmasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin kini semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan di antara mereka semakin menyusut. Meskipun Garis Kemiskinan naik menjadi Rp646.864, daya beli masyarakat tetap tangguh yang dibuktikan dengan tingginya minat beli emas serta keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi melalui operasi pasar dan pasar murah.

Pada aspek ekonomi, meskipun Pertumbuhan Ekonomi melambat menjadi 4,69% akibat lesunya sektor pertambangan (tumbuh hanya 0,87%) karena penurunan harga batu bara global, struktur ekonomi Tabalong menunjukkan tren kemandirian yang menggembirakan. Sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh impresif 12,68% berkat kehadiran Kota Cinema Mall dan program 1 Desa 1 Wifi. Selain itu, sektor Industri Pengolahan (9,56%) dan Pertanian (8,31%) menunjukkan performa kuat melalui peningkatan produksi karet dan sawit. Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memberikan multiplier effect yang nyata, memicu pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,22% seiring hadirnya berbagai jenama restoran nasional di Tabalong.

Namun, laporan ini mencatat tantangan pada Angka Pengangguran (TPT) yang naik tipis menjadi 3,48%. Hal ini dipengaruhi oleh deflasi harga karet yang memicu pekerja wanita berhenti menyadap, efisiensi di subkontraktor tambang, serta banyaknya usia produktif yang memilih melanjutkan kuliah berkat beasiswa daerah. Terakhir, Gini Ratio yang meningkat menjadi 0,31 menunjukkan tantangan dalam pemerataan pendapatan. Kenaikan ini terjadi karena keuntungan dari sektor bernilai tambah tinggi seperti pertambangan dan jasa perkotaan lebih banyak dinikmati kelompok menengah-atas, sementara pekerja di sektor pertanian dan informal mengalami pertumbuhan pendapatan yang lebih lambat. Fenomena ini menegaskan bahwa meskipun penduduk miskin berhasil ditekan, kesenjangan antara kelompok atas dan bawah cenderung melebar seiring dengan dominasi sektor padat modal.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.a.1	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	97,7925418	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.a.2		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	89,9022055		-
1.a.3		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100		-
1.a.4		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	66,302521		-
1.a.5		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	60,2919708		-
1.b.1	Kesehatan	Persentase kematian ibu	0,196915	Dinas Kesehatan	-
1.b.10		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	96,3460319		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar belum optimal karena masih rendahnya kesadaran penderita untuk rutin memeriksakan kesehatan dan memantau tekanan darah secara berkala.
1.b.11		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100		-
1.b.12		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100		-
1.b.13		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	55,7444953		Persentase pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar belum optimal karena terbatasnya alat pemeriksaan sampel TBC serta keterlambatan pengentrian data kasus ke dalam aplikasi SITB.
1.b.14		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100		-
1.b.2		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	7,6767092		-
1.b.3		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	87,9405108		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar belum optimal karena sebagian ibu hamil belum mencapai kunjungan K6 serta keterbatasan layanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					USG di beberapa puskesmas akibat alat rusak dan tenaga dokter terlatih yang tidak tersedia.
1.b.4		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	98,5127708		Persentase persalinan di fasilitas kesehatan sesuai standar belum optimal karena masih terdapat persalinan yang ditolong dukun kampung serta persalinan yang dilakukan di rumah.
1.b.5		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	97,7741935		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar belum optimal karena jumlah kelahiran hidup pada tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
1.b.6		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	77,5612822		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar belum optimal karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membawa anak ke puskesmas guna mendapatkan pelayanan SDIDTK.
1.b.7		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	98,3815799		Persentase pelayanan kesehatan peserta didik belum optimal karena saat pelaksanaan penjaringan kesehatan di sekolah masih terdapat siswa yang tidak hadir akibat sakit, izin, kegiatan sekolah/keagamaan, atau berdekatan dengan jadwal ulangan.
1.b.8		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	90,2958746		Persentase pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar belum optimal karena keterbatasan alat pemeriksaan sampel TBC serta keterlambatan pengentrian data ke dalam aplikasi SITB.
1.b.9		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,9894737		-
1.c.1	Pekerjaan Umum	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	61,6766827	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
1.c.10		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan	80,7692308		-

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota			
1.c.2		Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	65,8665995		Dinas PUPR Kabupaten Tabalong berhasil mencapai 101% target kinerja tahun 2025 dengan realisasi jalan mantap sebesar 65,87%, sebagai bagian dari strategi bertahap menuju target 100% pada tahun 2029.
1.c.3		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	86,8369184		-
1.c.4		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	94,7255149		-
1.c.5		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	-		Berdasarkan Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015, pengelolaan wilayah sungai dan pantai merupakan wewenang Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Kabupaten tidak memiliki legalitas untuk melakukan pengelolaan maupun pendataan teknis di wilayah tersebut.
1.c.6		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	100		Berdasarkan Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015, pengelolaan wilayah sungai dan pantai merupakan wewenang Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Kabupaten tidak memiliki legalitas untuk melakukan pengelolaan maupun pendataan teknis di wilayah tersebut.
1.c.7		Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100		Realisasi 2024 sebesar 618 merupakan akumulasi IMB dan PBG periode 2017–2024, sedangkan realisasi 2026 sebesar 416 merupakan akumulasi PBG saja periode 2022–2025.
1.c.8		Persentase Persetujuan	100		-

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah			
1.c.9		Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	79,1304348		-
1.d.1	Perumahan & Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
1.d.2		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	71,317165		Rendahnya capaian pengurangan kawasan kumuh (di luar target) disebabkan efisiensi anggaran Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan fisik di Kecamatan Tanta dikurangi atau ditunda.
1.d.3		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	100		-
1.d.4		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100		-
1.e.1	Trantibumlinmas	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
1.e.2		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
1.e.3		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100		-
1.e.4		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	80,6074359	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Partisipasi masyarakat masih cenderung reaktif setelah bencana terjadi dan belum proaktif dalam mengikuti kegiatan edukasi serta simulasi kesiapsiagaan secara berkelanjutan.
1.e.5		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100		-
1.e.6		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Waktu tanggap pemadam kebakaran melebihi standar karena jumlah petugas, armada, dan pos pemadam belum sebanding dengan luas wilayah layanan, sehingga jangkauan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					pelayanan belum optimal.
1.f.1	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
1.f.2		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100		-
1.f.3		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100		-
1.f.4		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100		-
1.f.5		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100		-
1.f.6		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	92,3163683		
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	Dinas Tenaga Kerja	-
2.a.2		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	100		-
2.a.3		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	100		-
2.b.1	Pemberdayaan Perempuan	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
2.b.2		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100		-
2.c.1	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah	714,1452849	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	-

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Kabupaten/Kota			
2.d.1	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	68,2057143	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendahnya capaian disebabkan pengajuan Hak Pakai baru dapat dilakukan setelah proses ganti rugi atau peralihan hak selesai; jika terjadi pada triwulan III/IV, sertifikasi biasanya diproses tahun berikutnya karena lamanya pendaftaran di Kantor Pertanahan.
2.d.2		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	23,5014163		Sesuai Perbup Tabalong No. 69 Tahun 2021, tanggung jawab pemenuhan data dukung IKK Penataan Ruang (2.d.2 & 2.d.3) berada pada Dinas PUPR, sehingga Disperkim tidak dapat melakukan intervensi.
2.d.3		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	75		-
2.e.1	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	87,5	Dinas Lingkungan Hidup	-
2.e.2		Persentase jumlah sampah yang tertangani	66,1284891		Penurunan persentase penanganan sampah 2025 terjadi karena kenaikan estimasi potensi timbulan berdasarkan kajian terbaru, bukan karena berkurangnya volume sampah yang ditangani.
2.f.1	Adminduk	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	99,4454235	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Surat Menteri Dalam Negeri tidak memperkenankan pemberian data kependudukan secara by name by address, sehingga SKPD tidak dapat melengkapi data dukung IKK-LPPD sesuai dengan rincian yang diminta.
2.f.2		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	83,7370922		Surat Menteri Dalam Negeri tidak memperkenankan pemberian data kependudukan secara by name by address, sehingga SKPD tidak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					dapat melengkapi data dukung IKK-LPPD sesuai dengan rincian yang diminta.
2.f.3		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100		-
2.f.4		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	98,5678427		-
2.f.5		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100		Surat Menteri Dalam Negeri tidak memperkenankan pemberian data kependudukan secara by name by address, sehingga SKPD tidak dapat melengkapi data dukung IKK-LPPD sesuai dengan rincian yang diminta.
2.f.6		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100		Surat Menteri Dalam Negeri tidak memperkenankan pemberian data kependudukan secara by name by address, sehingga SKPD tidak dapat melengkapi data dukung IKK-LPPD sesuai dengan rincian yang diminta.
2.f.7		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100		Surat Menteri Dalam Negeri tidak memperkenankan pemberian data kependudukan secara by name by address, sehingga SKPD tidak dapat melengkapi data dukung IKK-LPPD sesuai dengan rincian yang diminta.
2.g.1	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
2.g.2		Persentase peningkatan status desa mandiri	50		-
2.g.3		Persentase fasilitasi kerja sama desa	100		-
2.h.1	Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
2.h.2		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	79,3295108		Capaian mCPR belum 100% karena tidak semua PUS menggunakan kontrasepsi modern akibat faktor kebutuhan, akses, preferensi, dan sosial budaya; namun capaian 79,33% telah melampaui target provinsi 61,8%.
2.h.3		Persentase kebutuhan	36,1904762		Capaian unmet need

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)			Kabupaten Tabalong sebesar 3,80% lebih baik dibanding target provinsi 10,50%, sehingga melampaui target dengan realisasi mencapai 276,32% dari target yang ditetapkan.
2.i.1	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,875	Dinas Perhubungan	-
2.i.2		Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,5136351		-
2.i.3		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	100		-
2.j.1	Kominfo	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
2.j.2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	86,2068966		-
2.j.3		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	91,1162731		-
2.k.1	Koperasi & UMKM	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	16,9819649	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-
2.k.2		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	25,5069088		-
2.l.1	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	62,2936197	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Capaian 62,29% merupakan kinerja yang cukup baik, mengingat sebagai perbandingan pertumbuhan ekonomi saja umumnya ditargetkan sekitar 8% per tahun.
2.l.2		Realisasi total terhadap target investasi	54,1760349		Terdapat ketidaksinkronan target investasi 2025, di mana Pemkab Tabalong menetapkan Rp1,2 triliun, sedangkan BKPM/Pemprov Rp3,2 triliun, tanpa pelibatan kabupaten/kota dalam penetapannya.
2.m.1	Pemuda & Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	100	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2.m.2		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,0969671		-
2.m.3		Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	14,2857143		Ketatnya kriteria seleksi provinsi yang hanya memprioritaskan peraih medali emas, ditambah dengan terbatasnya jumlah nomor pertandingan pada cabang olahraga kategori POPNAS yang mengakibatkan minimnya jumlah atlet yang terserap ke pemusatan latihan.
2.m.4		Persentase jumlah atlet berprestasi	100		-
2.n	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	95,7670107		-
2.o	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	39,9782135	Dinas Komunikasi dan Informatika	Capaian bidang persandian rendah karena manajemen risiko keamanan informasi belum diterapkan secara terstruktur dan terdokumentasi, serta sejumlah kebijakan teknis penting masih dalam tahap penyusunan dan belum diimplementasikan.
2.p.1	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	100		-
2.p.2		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	18,5098515	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2.q.1	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	56,69		Tahun 2025 terjadi perubahan formulasi TKM sesuai Perpusnas RI No.9/2025, sehingga perlu penyesuaian responden dan mekanisme survei, sementara waktu pelaksanaan terbatas sehingga perlu persiapan lebih optimal.
2.q.2		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	28,82	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tahun 2025 terjadi perubahan formulasi IPLM sesuai Perpusnas No.7/2025, pengumpulan data singkat dan persiapan terbatas, sementara penghitungan oleh Perpusnas; meski

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					rendah, IPLM Tabalong tertinggi di Kalsel.
2.r	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	100		-
3.a.1	Kelautan & Perikanan	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	100	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	-
3.a.2		Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	44,66		-
3.b.1	Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	99,8042794	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-
3.b.2		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	96,4028777		-
3.b.3		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	6,3454663		-
3.c.1	Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	17,4989962	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	-
3.c.2		Peningkatan produksi hortikultura	0,1907884		-
3.c.3		Peningkatan produksi komoditas peternakan	4,3610417		-
3.c.4		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	100		-
3.f	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	28,5359185	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	kemungkinan disebabkan menurunnya jumlah UTTP yang ditera ulang oleh pemilik, sidang tera yang baru hanya menjangkau 5 dari 28 pasar rakyat karena keterbatasan anggaran sehingga belum optimalnya sosialisasi metrologi legal oleh pengawas perdagangan.
3.g.1	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja	69,26		-

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota			
3.g.2		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	15,1351351		Rendahnya kepatuhan pelaporan SIINAS disebabkan oleh keterbatasan literasi digital, kendala teknis akses akun dan internet, serta prioritas pelaku usaha yang lebih fokus pada produksi dibanding administrasi.
3.g.3		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	1,8143261		-
3.g.4		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	10,5730227		-

Sumber : Seluruh Perangkat Daerah yang Tercantum, 2025

Tabel 2.2 menyajikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja pemerintah daerah yang diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, serta urusan pilihan di Kabupaten Tabalong tahun 2025. Secara umum, sektor pelayanan dasar menunjukkan performa yang sangat stabil, terutama pada urusan Sosial, Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibumlinmas), serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mayoritas indikatornya berhasil mencapai angka 100%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjamin kebutuhan dasar kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan anak terlantar, serta efektivitas penegakan regulasi daerah melalui Satpol PP dan BPBD. Di sektor Pendidikan, partisipasi anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan juga menunjukkan angka yang sangat tinggi, meskipun terdapat catatan penting pada aspek infrastruktur fisik sekolah yang masih berada di kisaran 60%.

Pada sektor Kesehatan dan Pekerjaan Umum, tabel ini menunjukkan capaian yang sangat baik namun disertai dengan catatan evaluatif yang transparan. Urusan kesehatan berhasil mencatatkan pelayanan standar maksimal (100%) untuk penderita diabetes melitus, gangguan jiwa berat, dan risiko HIV, namun pelayanan bagi penderita Tuberkulosis (TBC) dan ibu hamil masih menghadapi kendala teknis pada ketersediaan alat medis serta kedisiplinan pengentrian data. Sementara itu, di bidang infrastruktur, Dinas PUPR berhasil melampaui target tahunan untuk kemantapan jalan sebesar 65,87% sebagai bagian dari rencana strategis jangka panjang. Namun,

pengelolaan kawasan rawan banjir tercatat sebagai kewenangan pemerintah pusat sesuai regulasi terbaru, sehingga pemerintah kabupaten fokus pada optimalisasi layanan air limbah domestik yang telah mencapai 94,73%.

Pada kelompok urusan wajib non-pelayanan dasar dan urusan pilihan, dinamika capaian kinerja dipengaruhi oleh faktor eksternal dan regulasi pusat. Sektor Administrasi Kependudukan menunjukkan performa unggul dengan rata-rata capaian di atas 98%, meski terdapat kendala teknis terkait akses data by name by address dari kementerian terkait. Di sisi lain, sektor ekonomi seperti Koperasi, UMKM, dan Perindustrian menghadapi tantangan literasi digital yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pelaporan melalui sistem informasi nasional (SIINAS). Sektor Pertanian juga mencatatkan penurunan pada produksi hortikultura akibat faktor cuaca ekstrem yang memicu gagal panen. Sebagai instrumen evaluasi, tabel ini memberikan dasar yang kuat bagi tiap Perangkat Daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran dan strategi di tahun mendatang, khususnya pada penguatan mitigasi bencana, peningkatan kompetensi tenaga teknis, serta percepatan transformasi digital di sektor pelayanan publik.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Fungsi Penunjang

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4.a.1	Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	-
4.b.1	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	23,0920235	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-
4.b.2		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	9,4154942		-
4.b.3		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	83,5662877		-
4.b.4		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	54,4869161		-
4.c	Kepegawaian	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak	77,3623042	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sebagian ASN masih berpendidikan di bawah Diploma I (D1) sehingga berpotensi memengaruhi kualitas

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		termasuk guru dan tenaga kesehatan)			kinerja, kompetensi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.
4.d	Litbang	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	-
4.e.1	Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	5	Inspektorat Daerah	-
4.e.2		Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	5		-
4.e.3		Manajemen risiko Indeks	4		-
4.e.4		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	87,2101637		-
4.f.1	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-
4.f.2		Pemanfaatan sistem pengadaan	27,85		-
4.f.3		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	23,33		-
4.g.1	Hub. Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-
4.g.2		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	33,3333333	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	Rendahnya penetapan Raperda 2025 disebabkan pembahasan belum tuntas sesuai rencana, penyesuaian jadwal dengan DPRD, relatif lamanya proses fasilitasi dan harmonisasi, beberapa usulan di akhir tahun, serta perubahan prioritas kebijakan daerah.
4.h	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	94,03	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	Nilai yang tercantum merupakan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 sesuai Surat Ombudsman RI Nomor 252/2024, sedangkan Tahun 2025 Kabupaten Tabalong tidak menjadi lokus penilaian.

Sumber : Seluruh Perangkat Daerah yang Tercantum, 2025

Analisis terhadap capaian kinerja pada aspek fungsi penunjang pemerintahan Kabupaten Tabalong tahun 2025 menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi pada instrumen perencanaan, pengawasan, dan inovasi daerah. Keberhasilan mencapai angka sempurna 100% pada kesesuaian antara rencana kerja dengan anggaran, serta penerapan inovasi di seluruh perangkat daerah, merefleksikan kuatnya integrasi kebijakan pembangunan yang adaptif. Hal ini diperkuat dengan kualitas pengawasan internal yang sangat mumpuni, di mana maturitas SPIP dan kapabilitas APIP berada pada level maksimal (Level 5), didukung oleh manajemen risiko yang solid. Selain itu, akuntabilitas tata kelola keuangan tetap terjaga dengan realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar mencapai 83,57% dan tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK yang mencapai 87,21%, yang menunjukkan komitmen daerah terhadap kepatuhan regulasi finansial.

Meskipun fungsi-fungsi strategis berjalan optimal, hasil analisis juga memetakan beberapa area penunjang yang memerlukan akselerasi dan penguatan struktural. Pada aspek kepegawaian, terdapat catatan mengenai profil pendidikan ASN di mana sekitar 22,64% masih berpendidikan di bawah Diploma I, yang diidentifikasi dapat memengaruhi kompetensi pelayanan di masa depan. Sektor pengadaan barang dan jasa juga menunjukkan tantangan pada tingkat kematangan unit kerja (40%) serta kualifikasi SDM yang masih berada di angka 23,33%. Tantangan serupa terlihat pada fungsi legislasi daerah, dengan rendahnya persentase penetapan Raperda (33,33%) yang disebabkan oleh dinamika pembahasan, penyesuaian jadwal dengan legislatif, serta lamanya proses harmonisasi regulasi.

Secara keseluruhan, fungsi penunjang pemerintahan di Kabupaten Tabalong telah berhasil membangun fondasi yang kuat untuk mendukung keberhasilan urusan pemerintahan secara umum. Indeks penilaian pelayanan publik yang mencapai 94,03 (zona hijau) merupakan bukti nyata bahwa tata kelola administrasi internal telah berdampak positif pada kualitas layanan masyarakat. Untuk mengoptimalkan kinerja di periode mendatang, pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kualifikasi teknis SDM pengadaan, melakukan akselerasi pada proses legislasi daerah, serta terus mendorong peningkatan strata pendidikan aparatur demi mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, modern, dan akuntabel.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja;

Berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/464/2025 Tentang Penetapan Indikator sasaran Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabalong 2025-2029, telah ditetapkan 5 (lima) Tujuan, 7 (tujuh) Indikator tujuan, 15 (lima belas) sasaran dan 28 (dua puluh delapan) indikator sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

Misi 1
Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, dijabarkan kedalam 2 tujuan, 3 Indikator tujuan dan 7 sasaran, dan 14 indikator sasaran;
Misi 2
Mendorong Kemajuan Daerah, dijabarkan kedalam 1 tujuan, 2 indikator tujuan, dan 3 sasaran, dan 4 indikator sasaran;
Misi 3
Mengembangkan Kehidupan yang Religius, dijabarkan kedalam 1 Tujuan, 1 indikator tujuan,dan 3 sasaran, dan 3 indikator sasaran;
Misi 4
Menjadi Daerah yang Terdepan, dijabarkan kedalam 1 Tujuan, 1 indikator tujuan, dan 2 sasaran, dan 7 indikator sasaran.

Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	3	4	5
1.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,29
2.	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Tahun	9,62
3.	Umur Harapan Hidup (tahun)	Tahun	76,37
4.	Prevalensi Stunting	Persen	22
5.	Indeks ketahanan pangan	Indeks	86
6.	Persentase penduduk miskin (%)	Persen	5,44-4,48
7.	Indeks Gini (Indeks)	Indeks	0,273-0,263
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	3,20-2,64
9.	Persentase Penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun	Persen	21
10.	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	Persen	6,02
11.	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	Persen	7,78
12.	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%)	Persen	1,47
13.	Nilai Realisasi Investasi non Tambang (Rupiah)	Rupiah	636.846.486.990
14.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Persen	2,03
15.	Indeks Infrastruktur (Indeks)	Indeks	0,736
16.	Indeks Desa (Indeks)	Indeks	81
17.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Persen	2,36
18.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	Indeks	151,37
19.	Angka konflik bernuansa SARA	Jumlah	0
20.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)	Indeks	58.89-58,91
21.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	Indeks	0,417
22.	Indeks Integritas	Indeks	76,4
23.	Indeks SPBE (Indeks)	Indeks	4
24.	Nilai SAKIP (kategori)	Kategori	BB
25.	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	Indeks	N/A
26.	Opini BPK (opini)	Opini	WTP
27.	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	Indeks	4,51

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	3	4	5
28.	Predikat Inovasi Daerah (kategori)	Kategori	Sangat Inovatif

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2025 (diolah)

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja;

Tabel 2.5 Capaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Terhadap Target Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian (5-4)*100
1	3	4	5	6	7
1.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,29	13,18	99,17
2.	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Tahun	9,62	9,37	97,4
3.	Umur Harapan Hidup (tahun)	Tahun	76,37	74,95	98,14
4.	Prevalensi Stunting	Persen	22,00	23,1	105
5.	Indeks ketahanan pangan	Indeks	86	85,22	99,09
6.	Persentase penduduk miskin (%)	Persen	5,44-4,48	4,67	85,85
7.	Indeks Gini (Indeks)	Indeks	0,273-0,263	0,310	113,55
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	3,20-2,64	3,48	108,75
9.	Persentase Penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun	Persen	21	18,15	86,43
10.	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	Persen	6,02	6,45	107,14
11.	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	Persen	7,78	8,47	108,87
12.	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%)	Persen	1,47	1,54	104,76
13.	Nilai Realisasi Investasi non Tambang (Rupiah)	Rupiah	636.846.486.990	1.638.782.517.906	257,33
14.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Persen	2,03	-	Data dari BPS belum rilis
15.	Indeks Infrastruktur (Indeks)	Indeks	0,736	0,729	99,05
16.	Indeks Desa (Indeks)	Indeks	81	83,28	102,81
17.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Persen	2,36	2,56	108,47
18.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	Indeks	151,37	97,04	64,11
19.	Angka konflik bernuansa SARA	Jumlah	0	0	0
20.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)	Indeks	58.89-58,91	58,55	99,42

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian (5-4)*100
1	3	4	5	6	7
21.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	Indeks	0,417	0,421	100,96
22.	Indeks Integritas	Indeks	76,40	76,17	99,7
23.	Indeks SPBE (Indeks)	Indeks	4	3,7	92,5
24.	Nilai SAKIP (kategori)	Kategori	BB	B	-
25.	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	Indeks	N/A	N/A	Tidak ada penilaian dari kemenpan RB
26.	Opini BPK (opini)	Opini	WTP	WTP	-
27.	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	Indeks	4,51	4,46	98,89
28.	Predikat Inovasi Daerah (kategori)	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	-

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2025 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 2.5, analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tabalong tahun 2025 menunjukkan performa pembangunan yang beragam, dengan sejumlah indikator menunjukkan keberhasilan signifikan namun di sisi lain terdapat tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius. Keberhasilan paling mencolok terlihat pada sektor investasi non-tambang yang mencapai realisasi fantastis sebesar Rp1,64 triliun atau 257,33% dari target, mengindikasikan efektivitas kebijakan diversifikasi ekonomi daerah dan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Tabalong. Capaian ini selaras dengan peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan (107,14%) serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (108,87%) terhadap PDRB, yang menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah mulai bergeser menuju keseimbangan yang lebih sehat. Komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan juga membuahkan hasil positif dengan penurunan intensitas emisi GRK yang mencapai 108,47% melampaui target, serta capaian Indeks Desa (102,81%) yang mencerminkan pemerataan pembangunan hingga tingkat pedesaan.

Namun demikian, hasil analisis juga memberikan catatan evaluatif terhadap beberapa indikator yang menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Indeks Gini yang mencapai 113,55% (realisasi 0,310 di luar rentang target ideal 0,263-0,273) mengindikasikan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan yang signifikan di masyarakat. Hal ini diperparah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang mencapai 108,75% (realisasi 3,48% melampaui batas maksimal target 3,20%), serta Persentase Penduduk Miskin yang tercatat 4,67% berada di atas target ideal terendah (4,48%), sehingga capaian hanya 85,85%. Pada aspek kesehatan, Prevalensi Stunting yang mencapai 105% (realisasi 23,1% lebih tinggi dari target 22,0%) menunjukkan bahwa upaya intervensi gizi belum berhasil menekan angka stunting sesuai harapan. Sementara itu, Indeks Risiko Bencana (IRB) yang hanya mencapai 64,11% (realisasi 97,04 dari target 151,37) menjadi catatan kritis yang memerlukan penguatan mitigasi dan alokasi sumber daya yang lebih besar guna memastikan ketangguhan daerah terhadap potensi bencana.

Pada aspek tata kelola, meskipun pemerintah daerah berhasil mempertahankan opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan predikat Sangat Inovatif pada inovasi daerah, namun terdapat

penurunan kualitas akuntabilitas kinerja yang tercermin dari Nilai SAKIP yang turun dari kategori "BB" menjadi "B", masih di bawah target yang ditetapkan. Selain itu, Indeks SPBE yang tercatat 3,7 dari target 4 (92,5%) menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam integrasi sistem pemerintahan berbasis digital. Indikator pendidikan seperti Harapan Lama Sekolah (99,17%) dan Rata-rata Lama Sekolah (97,4%) juga masih berada di bawah target, mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan partisipasi pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi.

Secara keseluruhan, Kabupaten Tabalong telah berhasil membangun fondasi yang kuat melalui investasi dan penguatan sektor riil, namun menghadapi tantangan serius dalam aspek pemerataan kesejahteraan dan ketahanan sosial. Keberhasilan mempertahankan opini WTP dan predikat sangat inovatif menjadi modal sosial dan administratif yang penting, namun diperlukan koreksi kebijakan yang mendasar untuk mengatasi ketimpangan, pengangguran, dan stunting yang justru memburuk. Analisis ini merekomendasikan adanya fokus berkelanjutan pada program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, intervensi penciptaan lapangan kerja yang inklusif, serta penguatan sistem mitigasi bencana untuk memastikan seluruh target pembangunan jangka menengah dapat tercapai secara paripurna.

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya;

Tabel 2.6 Capaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian (5-4)/4*100
1	3	4	5	6	7
1.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	12,92	13,18	2,01
2.	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Tahun	9,15	9,37	2,4
3.	Umur Harapan Hidup (tahun)	Tahun	74,76	74,95	0,25
4.	Prevalensi Stunting	Persen	18,1	23,1	27,62
5.	Indeks ketahanan pangan	Indeks	85,94	85,22	-0,84
6.	Persentase penduduk miskin (%)	Persen	5,64	4,67	-17,2
7.	Indeks Gini (Indeks)	Indeks	0,300	0,310	3,33
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	3,44	3,48	1,16
9.	Persentase Penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun	Persen	22,07	18,15	-17,76
10.	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	Persen	5,96	6,45	8,22
11.	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	Persen	7,76	8,47	9,15
12.	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan	Persen	1,42	1,54	8,45

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian (5-4)/4*100
1	3	4	5	6	7
	dan Minum terhadap PDRB (%)				
13.	Nilai Realisasi Investasi non Tambang (Rupiah)	Rupiah	606.520.463.800	1.638.782.517.906	170,19
14.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Persen	1,76	-	Data dari BPS belum rilis
15.	Indeks Infrastruktur (Indeks)	Indeks	0,718	0,729	1,53
16.	Indeks Desa (Indeks)	Indeks	N/A	83,28	-
17.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Persen	2,34	2,56	9,4
18.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	Indeks	157,77	97,04	-38,49
19.		Indeks	74,01	77,89	5,24
20.	Angka konflik bernuansa SARA	Jumlah	0	0	0
21.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)	Indeks	58,55	58,55	0
22.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	Indeks	0,421	0,421	0
23.		Indeks	80,76	85,71	6,13
24.	Indeks Integritas	Indeks	72,87	76,17	4,53
25.	Indeks SPBE (Indeks)	Indeks	3,7	3,7	0
26.	Nilai SAKIP (kategori)	Kategori	B	B	-
27.	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	Indeks	N/A	N/A	Tidak ada penilaian dari kemenpan RB
28.	Opini BPK (opini)	Opini	WTP	WTP	-
34.	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	Indeks	4,49	4,46	-0,67
35.	Predikat Inovasi Daerah (kategori)	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	-

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2025 (diolah)

Analisis perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tabalong antara tahun 2024 dan 2025 menunjukkan dinamika yang beragam, dengan sejumlah indikator mencatatkan pertumbuhan positif signifikan namun di sisi lain terdapat beberapa parameter yang mengalami penurunan kinerja yang memerlukan perhatian serius. Keberhasilan paling mencolok terlihat pada Nilai Realisasi Investasi non Tambang yang melonjak sebesar 170,19%, dari Rp606,5 miliar di tahun 2024 menjadi Rp1,64 triliun di tahun 2025. Lonjakan ini diikuti oleh penguatan kontribusi sektor-sektor produktif terhadap PDRB, yaitu sektor industri pengolahan (8,22%), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (9,15%), serta sektor penyediaan akomodasi makan dan minum (8,45%), yang mengindikasikan bahwa struktur ekonomi daerah mulai bergeser ke arah diversifikasi yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, aspek pembangunan manusia menunjukkan perbaikan dengan peningkatan Harapan Lama Sekolah (2,01%) dan Rata-Rata Lama Sekolah (2,4%), serta keberhasilan menurunkan Persentase Penduduk Miskin secara signifikan sebesar 17,2% (dari 5,64% menjadi 4,67%) dan Persentase Penduduk NEET usia 20-24

tahun sebesar 17,76% (dari 22,07% menjadi 18,15%).

Meskipun sektor investasi dan ekonomi produktif mencatat pertumbuhan impresif, daerah masih menghadapi tantangan serius pada sejumlah indikator sosial dan kesejahteraan masyarakat. Fenomena yang paling mengkhawatirkan adalah lonjakan Prevalensi Stunting sebesar 27,62%, meningkat drastis dari 18,1% di tahun 2024 menjadi 23,1% di tahun 2025. Angka ini menjadi catatan kritis yang menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas intervensi gizi dan koordinasi lintas sektor di tingkat lapangan. Selain itu, Indeks Ketahanan Pangan mengalami penurunan tipis sebesar 0,84%, mengindikasikan adanya tekanan terhadap ketersediaan dan akses pangan masyarakat. Pada aspek ketimpangan, Indeks Gini meningkat sebesar 3,33% (dari 0,300 menjadi 0,310), menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka juga mencatat kenaikan tipis sebesar 1,16% (dari 3,44% menjadi 3,48%), meskipun penurunan NEET menunjukkan adanya perbaikan pada partisipasi angkatan kerja muda. Pada dimensi lingkungan, terjadi perbaikan yang menggembirakan dengan Penurunan Intensitas Emisi GRK yang meningkat 9,4% dan Indeks Risiko Bencana (IRB) yang mengalami penurunan signifikan sebesar 38,49% (dari 157,77 menjadi 97,04), yang menandakan peningkatan ketangguhan wilayah terhadap potensi ancaman bencana.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, Kabupaten Tabalong menunjukkan stabilitas kinerja dengan mempertahankan Opini BPK predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), predikat Sangat Inovatif pada inovasi daerah, serta kategori SAKIP "B" yang belum menunjukkan perbaikan menuju target BB. Terdapat peningkatan positif pada Indeks Integritas sebesar 4,53% (dari 72,87 menjadi 76,17), yang menunjukkan adanya perbaikan dalam budaya kerja dan integritas aparatur. Namun, Indeks SPBE stagnan di angka 3,7 tanpa pertumbuhan, sementara Indeks Pelayanan Publik mengalami penurunan tipis sebesar 0,67% (dari 4,49 menjadi 4,46). Kondisi ini mengindikasikan bahwa akselerasi transformasi digital dan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat masih memerlukan penguatan yang lebih serius. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga menunjukkan stagnansi tanpa perubahan dari tahun sebelumnya, mencerminkan belum adanya terobosan kebijakan pada dua aspek pembangunan tersebut.

Secara keseluruhan, perbandingan tahunan ini menggambarkan Kabupaten Tabalong sebagai daerah yang sedang mengalami transformasi ekonomi yang dinamis, dengan penguatan investasi dan sektor produktif yang sangat menggembirakan. Namun demikian, keberhasilan di sektor ekonomi belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata, yang tercermin dari memburuknya angka stunting, melebarnya ketimpangan, dan stagnannya beberapa indikator tata kelola. Rekomendasi utama yang perlu menjadi prioritas adalah evaluasi menyeluruh program intervensi stunting, penguatan kebijakan yang lebih inklusif untuk menekan ketimpangan, serta akselerasi transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk memastikan seluruh capaian pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara paripurna oleh seluruh lapisan masyarakat.

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah;

Tabel 2.7 Capaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (5/4*100)
1	3	4	5	6	7
1.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,34	13,18	98,80
2.	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Tahun	10,75	9,37	87,16
3.	Umur Harapan Hidup (tahun)	Tahun	76,45	74,95	98,04
4.	Prevalensi Stunting	Persen	17,00	23,1	135,88
5.	Indeks ketahanan pangan	Indeks	90	85,22	94,69
6.	Persentase penduduk miskin (%)	Persen	3,48-3,87	4,67	134,20
7.	Indeks Gini (Indeks)	Indeks	0,253 0,250	0,310	122,53
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	2,90-2,30	3,48	120,00
9.	Persentase Penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun	Persen	16	18,15	113,44
10.	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	Persen	6,26	6,45	103,04
11.	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	Persen	7,84	8,47	108,04
12.	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%)	Persen	1,72	1,54	89,53
13.	Nilai Realisasi Investasi non Tambang (Rupiah)	Rupiah	849.569.134.806	1.638.782.517.906	192,90
14.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Persen	2,53	-	Data dari BPS belum rilis
15.	Indeks Infrastruktur (Indeks)	Indeks	0,766	0,729	95,17
16.	Indeks Desa (Indeks)	Indeks	91	83,28	91,52
17.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Persen	1,87	2,56	136,90
18.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	Indeks	125,75	97,04	77,17
19.	Angka konflik bernuansa SARA	Jumlah	0	0	-
20.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)	Indeks	62,02 -62,25	58,55	94,41
21.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	Indeks	0,400	0,421	105,25
22.	Indeks Integritas	Indeks	80,30	76,17	94,86
23.	Indeks SPBE (Indeks)	Indeks	N/A	3,7	-
24.	Nilai SAKIP (kategori)	Kategori	A	B	-
25.	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	Indeks	3,5	N/A	Tidak ada penilaian dari kemenpan RB
26.	Opini BPK (opini)	Opini	WTP	WTP	-
27.	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	Indeks	4,59	4,46	97,17

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Capaian (5/4*100)
1	3	4	5	6	7
28.	Predikat Inovasi Daerah (kategori)	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	-

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2025 (diolah)

Kabupaten Tabalong tahun 2025 menunjukkan progres yang beragam dalam pencapaian target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di mana sejumlah indikator berhasil melampaui target yang ditetapkan, namun terdapat pula beberapa indikator strategis yang masih berada jauh di bawah target akhir yang dicita-citakan. Salah satu pencapaian yang paling menonjol adalah Nilai Realisasi Investasi non Tambang yang menembus angka 192,90% dari target akhir RPJMD, mencapai lebih dari Rp1,63 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp849,56 miliar. Keberhasilan ini diikuti oleh Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai 108,04% serta Kontribusi sektor Industri Pengolahan yang mencapai 103,04%, menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah telah bergeser menuju diversifikasi yang lebih seimbang dan melampaui harapan awal perencanaan. Pada dimensi lingkungan, daerah mencatatkan prestasi gemilang melalui Penurunan Intensitas Emisi GRK yang mencapai 136,90% dari target akhir RPJMD, serta Indeks Risiko Bencana (IRB) yang berhasil diturunkan hingga 77,17% dari target (indikator minus dengan realisasi lebih rendah menunjukkan perbaikan). Indikator makro pembangunan manusia seperti Harapan Lama Sekolah berada pada posisi 98,80% dan Umur Harapan Hidup mencapai 98,04% dari target akhir, menunjukkan bahwa aspek dasar pembangunan manusia berada pada jalur yang mendekati sasaran.

Namun demikian, analisis ini juga mengungkap adanya kesenjangan (gap) yang cukup lebar pada sejumlah indikator krusial yang memerlukan akselerasi dan intervensi kebijakan yang lebih serius. Pada sektor pendidikan, Rata-Rata Lama Sekolah hanya mencapai 87,16% dari target akhir RPJMD (target 10,75 tahun, realisasi 9,37 tahun), mencerminkan tantangan struktural dalam meningkatkan partisipasi pendidikan hingga jenjang menengah atas. Pada sektor sosial dan kesejahteraan, terdapat anomali yang mengkhawatirkan pada indikator Prevalensi Stunting yang mencapai 135,88% (target 17%, realisasi 23,1%), Persentase Penduduk Miskin yang mencapai 134,20% (target rentang 3,48-3,87%, realisasi 4,67%), serta Tingkat Pengangguran Terbuka yang mencapai 120,00% (target rentang 2,30-2,90%, realisasi 3,48%). Angka-angka capaian di atas 100% untuk indikator-indikator yang bersifat minus (semakin rendah semakin baik) mengindikasikan bahwa realisasi di lapangan masih lebih tinggi daripada ambang batas target maksimal yang diharapkan, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih agresif untuk menekan angka-angka tersebut agar kembali sesuai dengan arah target akhir RPJMD. Kondisi serupa juga terjadi pada Indeks Gini yang mencapai 122,53% (target 0,250-0,253, realisasi 0,310), menandakan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat justru melebar dibandingkan sasaran ideal yang ditetapkan.

Pada dimensi ekonomi makro, Indeks Ketahanan Pangan baru mencapai 94,69% dari target akhir, Indeks Infrastruktur mencapai 95,17%, serta Indeks Desa mencapai 91,52%, menunjukkan bahwa pembangunan

infrastruktur dan pemerataan pembangunan hingga tingkat desa masih memerlukan penguatan di sisa periode RPJMD. Sementara itu, pada aspek tata kelola pemerintahan, capaian Indeks Integritas berada pada 94,86% dari target akhir, Indeks Pelayanan Publik mencapai 97,17%, dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) mencapai 94,41%, yang secara umum menunjukkan progres yang mendekati target namun belum sepenuhnya tuntas. Indeks SPBE tidak memiliki target akhir RPJMD sehingga tidak dapat dibandingkan, sementara Nilai SAKIP masih berada pada kategori "B" sementara target akhir RPJMD adalah kategori "A", yang menjadi catatan penting bagi akuntabilitas kinerja instansi. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) justru menunjukkan capaian 105,25% (realisasi 0,421 melampaui target 0,400), namun karena indikator ini bersifat minus, capaian di atas 100% mengindikasikan bahwa ketimpangan gender belum menurun sesuai target.

Secara keseluruhan, Kabupaten Tabalong telah berhasil mengamankan fondasi utama pembangunan melalui lonjakan investasi non-tambang, penguatan sektor pertanian dan industri, serta keberhasilan dalam penurunan emisi GRK dan pengelolaan risiko bencana yang telah melampaui target akhir perencanaan. Namun demikian, sisa waktu periode RPJMD harus dioptimalkan untuk membenahi sektor pendidikan (terutama rata-rata lama sekolah), penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, penekanan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan pendapatan yang hingga saat ini masih menunjukkan jarak signifikan dengan target akhir. Stabilitas opini WTP dan predikat daerah yang sangat inovatif menjadi modal kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pada indikator-indikator yang masih tertinggal, guna memastikan seluruh janji politik dan target pembangunan jangka menengah dapat terpenuhi secara paripurna di akhir periode RPJMD.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai;

1. Harapan Lama Sekolah (tahun)

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

a) Penggunaan anggaran yang mampu mendukung peningkatan akses pendidikan, melalui pembiayaan program wajib belajar, bantuan pendidikan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung keberlangsungan pendidikan masyarakat.
b) Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta mendorong peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
c) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan, seperti sekolah, ruang kelas, serta fasilitas pendukung lainnya yang dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan daya tampung dan kualitas layanan pendidikan.
d) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan, melalui sinergi antara

pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam mendorong keberlanjutan pendidikan.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, diharapkan peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong dapat terus berlanjut serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

a) Penggunaan anggaran yang mampu mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan, melalui pelaksanaan program wajib belajar, bantuan pendidikan, penyediaan beasiswa, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan guna mendorong keberlanjutan pendidikan masyarakat.
b) Pemanfaatan sumber daya manusia pendidikan yang efektif, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga mampu mendorong peningkatan partisipasi dan keberlanjutan sekolah.
c) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan, seperti sekolah, ruang kelas, serta fasilitas penunjang lainnya yang dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.
d) Pelaksanaan program pendidikan yang berorientasi pada penurunan angka putus sekolah, melalui intervensi seperti pendidikan kesetaraan, program kejar paket, serta dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap melanjutkan pendidikan.
e) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pembangunan pendidikan, melalui sinergi antar perangkat daerah serta dukungan sektor lain seperti perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang turut mendorong peningkatan lama sekolah.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, diharapkan upaya peningkatan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang semakin signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing sumber daya manusia.

3. Umur Harapan Hidup (tahun)

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

a) Penggunaan anggaran yang mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui pelaksanaan program kesehatan yang berfokus pada pelayanan kesehatan dasar, pencegahan dan pengendalian penyakit, peningkatan gizi masyarakat, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.

b) Pemanfaatan sumber daya manusia kesehatan yang efektif, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya, dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menekan angka kesakitan dan kematian.
c) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
d) Pelaksanaan program kesehatan yang berorientasi promotif dan preventif, melalui edukasi pola hidup sehat, imunisasi, serta deteksi dini penyakit yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
e) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pembangunan kesehatan, melalui sinergi antar perangkat daerah serta dukungan sektor lain seperti sanitasi, air bersih, dan perlindungan sosial yang turut mempengaruhi peningkatan umur harapan hidup.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, diharapkan upaya peningkatan Umur Harapan Hidup di Kabupaten Tabalong dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang semakin signifikan terhadap Peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Prevalensi Stunting

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :
a) Penggunaan anggaran yang mampu mendukung percepatan penurunan stunting, melalui pelaksanaan program intervensi spesifik dan sensitif seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, peningkatan layanan kesehatan ibu dan balita, serta penyediaan sanitasi dan air bersih.
b) Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik tenaga kesehatan, kader posyandu, maupun tenaga pendamping keluarga, dalam melakukan pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi, serta pendampingan keluarga berisiko stunting.
c) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan dan layanan dasar, seperti puskesmas, posyandu, serta fasilitas sanitasi yang dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan akses layanan dan intervensi kepada kelompok sasaran.
d) Pelaksanaan program yang berfokus pada upaya promotif dan preventif, melalui edukasi pola asuh, perbaikan pola konsumsi gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta deteksi dini risiko stunting pada balita.
e) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam percepatan penurunan stunting, melalui sinergi lintas sektor antara perangkat daerah bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, serta dukungan pemerintah desa dalam intervensi berbasis keluarga.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, upaya

penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus dipercepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5. Indeks Ketahanan Pangan

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan sumber daya dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Tabalong dapat dikatakan cukup efisien, karena mampu menghasilkan capaian kinerja berupa nilai Indeks Ketahanan Pangan yang berada pada kategori baik. Efisiensi tersebut tercermin dari:

a) Penggunaan anggaran yang mampu mendukung peningkatan produksi dan ketersediaan pangan
b) Pemanfaatan sumber daya manusia seperti penyuluh pertanian dan kelompok tani secara efektif
c) Optimalisasi sarana dan prasarana pertanian serta distribusi pangan
d) Pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Tabalong dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna mendukung kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah.

6. Persentase Penduduk Miskin (%)

Pada indikator persentase penduduk miskin, penggunaan sumber daya dapat dikatakan cukup efisien karena capaian kinerja berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

a) Penggunaan anggaran yang mampu mendukung penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran, melalui pelaksanaan program perlindungan sosial, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
b) Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik aparatur pemerintah, tenaga pendamping sosial, maupun fasilitator pemberdayaan masyarakat, dalam mendampingi kelompok miskin dan rentan agar mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan.
c) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung ekonomi dan layanan dasar, seperti fasilitas pelatihan kerja, akses permodalan, serta infrastruktur dasar yang dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
d) Pelaksanaan program yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kemandirian ekonomi, melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan keterampilan kerja,

serta penciptaan lapangan kerja yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

e) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam penanggulangan kemiskinan, melalui sinergi lintas sektor antara perangkat daerah serta dukungan pemerintah pusat dan desa, sehingga intervensi yang dilakukan lebih efektif dan tidak tumpang tindih.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, upaya penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang semakin signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

7. Indeks Gini (Indeks)

Pada indikator Indeks Gini, capaian kinerja yang masih berada di atas target menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendapatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan program yang lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat serta perluasan kesempatan kerja agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

a) Penggunaan anggaran yang mampu mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat, melalui pelaksanaan program perlindungan sosial, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses layanan dasar bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
b) Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik aparatur pemerintah, tenaga pendamping sosial, maupun fasilitator ekonomi, dalam mengimplementasikan program yang bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan inklusivitas pembangunan.
c) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial, seperti infrastruktur dasar, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta akses terhadap layanan keuangan yang dimanfaatkan untuk mendorong pemerataan kesempatan ekonomi.
d) Pelaksanaan program yang berorientasi pada peningkatan inklusi ekonomi, melalui pengembangan UMKM, peningkatan akses terhadap lapangan kerja, serta pemberdayaan kelompok rentan agar memiliki kesempatan yang lebih setara dalam memperoleh pendapatan.
e) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pengurangan ketimpangan, melalui sinergi lintas sektor antara perangkat daerah serta dukungan pemerintah pusat dan desa, sehingga kebijakan yang diambil lebih efektif dalam menekan kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, pengendalian Indeks Gini di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus membaik serta memberikan dampak yang signifikan terhadap terciptanya

pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat.

8. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Berdasarkan analisis, penggunaan sumber daya untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 telah memberikan dampak positif, namun efisiensi penggunaannya masih dapat ditingkatkan, beberapa temuan utama terkait efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

a) Alokasi anggaran untuk pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja sudah ada, tetapi belum maksimal dalam menurunkan TPT.
b) Tenaga SDM untuk pelatihan dan pemberdayaan belum mencakup seluruh wilayah secara merata.
c) Program pemberdayaan UMKM dan sektor informal berdampak positif, tetapi akses modal dan pasar masih menjadi kendala.
d) Koordinasi antar perangkat daerah perlu diperkuat agar program ketenagakerjaan lebih efektif dan tepat sasaran.

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, pemerintah daerah perlu memperkuat program pelatihan dan pemberdayaan yang berbasis kebutuhan pasar kerja, memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi antar dinas terkait sehingga penyerapan tenaga kerja dapat lebih optimal.

9. Persentase Penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun

Pemerintah daerah juga memanfaatkan sumber daya manusia yang ada secara optimal, baik melalui peran perangkat daerah terkait, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan kerja, maupun organisasi kepemudaan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan dan kegiatan pemberdayaan pemuda turut meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran strategis ini.

Pemanfaatan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang sudah tersedia, seperti sekolah menengah kejuruan, lembaga pelatihan kerja, serta balai latihan kerja, juga berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak memerlukan pembangunan infrastruktur baru dalam skala besar.

10. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

a) Penggunaan anggaran yang mampu mendorong pengembangan industri pengolahan, melalui pelaksanaan program peningkatan nilai tambah komoditas, pengembangan kawasan industri, serta dukungan terhadap hilirisasi produk unggulan daerah.
b) Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik tenaga kerja industri maupun pelaku usaha, dalam meningkatkan kapasitas

produksi, kualitas produk, serta daya saing industri pengolahan di tingkat regional maupun nasional.

c) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung industri, seperti kawasan industri, infrastruktur transportasi, energi, serta fasilitas logistik yang dimanfaatkan untuk memperlancar proses produksi dan distribusi hasil industri.
d) Pelaksanaan program yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing industri, melalui inovasi produk, penerapan teknologi, serta peningkatan akses pasar bagi hasil industri pengolahan.
e) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pengembangan sektor industri, melalui sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, pelaku usaha, serta dukungan pemerintah pusat dalam menciptakan ekosistem industri yang kondusif.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus meningkat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

11. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

a) Penggunaan anggaran yang mampu mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, melalui pelaksanaan program peningkatan produksi, penyediaan sarana produksi, pengembangan kawasan pertanian, serta dukungan terhadap ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
b) Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik petani, nelayan, maupun penyuluh pertanian dan perikanan, dalam meningkatkan kapasitas produksi, penerapan teknologi, serta pengelolaan usaha yang lebih efisien dan produktif.
c) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung sektor primer, seperti irigasi, jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian, serta fasilitas perikanan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi hasil.
d) Pelaksanaan program yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan, melalui diversifikasi produk, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta penerapan praktik ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam.
e) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, melalui sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, pelaku usaha, serta dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat ekosistem sektor primer.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, kontribusi

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus meningkat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

12. Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%)

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

a) Penggunaan anggaran yang mampu mendorong pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui pelaksanaan program promosi daerah, pengembangan destinasi wisata, serta dukungan terhadap usaha kuliner dan perhotelan yang berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi sektor jasa.
b) Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik pelaku usaha perhotelan, restoran, maupun tenaga kerja di sektor jasa, dalam meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi produk, serta daya saing usaha di bidang akomodasi dan kuliner.
c) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas akomodasi, restoran, kawasan wisata, serta infrastruktur pendukung lainnya yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi wisatawan dan masyarakat.
d) Pelaksanaan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan daya tarik usaha, melalui peningkatan standar pelayanan, sertifikasi usaha, inovasi produk kuliner, serta penguatan branding dan promosi daerah.
e) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pengembangan sektor akomodasi dan kuliner, melalui sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, pelaku usaha, serta dukungan pemerintah pusat dalam menciptakan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus meningkat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

13. Nilai Realisasi Investasi Non-Tambang (Rupiah)

Keberhasilan pencapaian investasi non-tambang menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan dalam pengelolaan investasi, seperti pelayanan perizinan, promosi investasi, dan fasilitasi usaha, telah dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari capaian realisasi investasi yang jauh melampaui target yang ditetapkan.

14. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

Hingga periode pelaporan ini, data capaian Rasio Kewirausahaan

Tahun 2025 masih belum rilis.

15. Indeks Infrastruktur (Indeks)

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat terlihat dari optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun. Infrastruktur jalan dan transportasi yang lebih baik meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, peningkatan akses air minum dan sanitasi turut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

16. Indeks Desa (Indeks)

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam peningkatan Indeks Desa dapat dilihat dari hubungan antara alokasi anggaran pembangunan desa dengan peningkatan status perkembangan desa.

Penggunaan sumber daya dinilai cukup efisien, karena dengan dukungan anggaran pembangunan desa, pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pembangunan desa serta memperbaiki akses masyarakat desa terhadap layanan dasar.

Selain itu, pemanfaatan Dana Desa dari pemerintah pusat dan dukungan APBD daerah juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan desa. Namun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya masih perlu ditingkatkan melalui:

a) penguatan perencanaan pembangunan desa
b) peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa
c) optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi desa.

17. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

a) Penggunaan anggaran yang mampu mendukung program mitigasi perubahan iklim, melalui pelaksanaan kegiatan efisiensi energi, pengelolaan limbah, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengembangan energi terbarukan yang berkontribusi langsung terhadap penurunan emisi.
b) Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik aparatur pemerintah, tenaga teknis, maupun masyarakat, dalam mengimplementasikan program ramah lingkungan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengurangan emisi GRK.
c) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan, seperti fasilitas pengelolaan sampah, transportasi ramah lingkungan, serta teknologi pengendalian emisi yang dimanfaatkan untuk menekan tingkat emisi secara efisien.
d) Pelaksanaan program yang berorientasi pada efisiensi energi dan penggunaan sumber daya berkelanjutan, melalui penerapan

teknologi hemat energi, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, serta peningkatan praktik ekonomi hijau di berbagai sektor.

e) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pengendalian perubahan iklim, melalui sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung target penurunan emisi GRK secara berkelanjutan.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, upaya penurunan intensitas emisi GRK di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus ditingkatkan serta memberikan dampak yang signifikan terhadap pelestarian lingkungan, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

18. Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah terhadap bencana juga didukung oleh optimalisasi sumber daya manusia yang ada di perangkat daerah terkait. Aparatur pemerintah daerah bersama masyarakat dan relawan kebencanaan telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan mitigasi bencana, pengelolaan lingkungan, serta kegiatan edukasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan kesiapsiagaan bencana juga turut meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, karena berbagai program dapat dilaksanakan secara kolaboratif tanpa sepenuhnya bergantung pada sumber daya pemerintah daerah.

Pemanfaatan infrastruktur dan teknologi dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana juga berperan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh pemanfaatan tersebut antara lain:

a) penggunaan sistem informasi kebencanaan untuk pemantauan risiko bencana
b) pengembangan sistem peringatan dini bencana
c) penggunaan teknologi pengelolaan sampah dan limbah.

Dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas program sekaligus mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang.

19. Angka Konflik Bernuansa SARA

Penggunaan sumber daya dalam menjaga stabilitas sosial dinilai cukup efisien, karena dengan alokasi anggaran yang relatif terbatas pemerintah daerah mampu mempertahankan kondisi zero konflik SARA. Efisiensi ini tercermin dari:

a) optimalisasi koordinasi antar lembaga
b) pemanfaatan peran masyarakat
c) pendekatan pencegahan konflik yang lebih murah dibanding penanganan konflik.

20. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)

Penggunaan sumber daya dalam pembangunan kebudayaan dinilai cukup efisien, karena dengan anggaran yang relatif terbatas pemerintah daerah mampu meningkatkan nilai IPK. Efisiensi ini tercermin dari:

a) optimalisasi peran komunitas seni dan budaya
b) pemanfaatan fasilitas publik untuk kegiatan budaya
c) kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga budaya.

Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan pembangunan kebudayaan dilakukan dengan biaya yang relatif rendah namun tetap menghasilkan dampak positif.

21. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)

Penggunaan sumber daya dalam program pengarusutamaan gender dapat dikatakan cukup efisien, karena dengan anggaran yang relatif terbatas pemerintah daerah mampu menurunkan nilai IKG. Efisiensi ini terlihat dari:

a) integrasi program gender dalam berbagai sektor pembangunan
b) pemanfaatan program nasional seperti Pengarusutamaan Gender (PUG)
c) kolaborasi dengan organisasi perempuan dan masyarakat.

Pendekatan integratif tersebut memungkinkan peningkatan kesetaraan gender tanpa memerlukan anggaran yang sangat besar.

22. Indeks Integritas

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

a) Penggunaan anggaran yang mampu mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui pelaksanaan program pencegahan korupsi, penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi, serta pembangunan zona integritas pada perangkat daerah.
b) Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik aparatur sipil negara maupun pengawas internal, dalam menerapkan nilai-nilai integritas, etika pelayanan publik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
c) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan dan pelayanan publik, seperti sistem informasi manajemen, aplikasi pengaduan masyarakat, serta digitalisasi layanan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
d) Pelaksanaan program yang berorientasi pada pencegahan dan pengendalian praktik korupsi, melalui sosialisasi budaya integritas, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.
e) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam penguatan integritas kelembagaan, melalui sinergi antar perangkat daerah, aparat pengawasan internal, serta dukungan instansi

eksternal dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, peningkatan Indeks Integritas di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

23. Indeks SPBE (Indeks)

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan Indeks Integritas:

a) Pelaksanaan program penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui pembangunan Zona Integritas, penguatan reformasi birokrasi, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
b) Pelaksanaan program penguatan pengawasan internal, melalui optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pelaksanaan audit, reviu, serta pengendalian internal guna mencegah terjadinya penyimpangan.
c) Pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui perbaikan standar pelayanan, penyederhanaan proses layanan, serta peningkatan kepuasan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas aparatur.
d) Pelaksanaan program digitalisasi dan transparansi layanan, melalui pengembangan sistem informasi dan aplikasi pelayanan publik untuk meminimalkan interaksi langsung serta mengurangi potensi praktik korupsi.
e) Pelaksanaan program penguatan budaya integritas dan etika aparatur, melalui sosialisasi nilai-nilai integritas, penegakan disiplin, serta peningkatan kesadaran ASN terhadap pentingnya pelayanan yang bersih dan bebas dari korupsi.
f) Pelaksanaan program pengelolaan pengaduan masyarakat, melalui penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses serta tindak lanjut yang responsif terhadap laporan masyarakat.
g) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antara perangkat daerah, aparat pengawas, serta dukungan instansi eksternal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, peningkatan Indeks Integritas di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta meningkatnya kepercayaan masyarakat.

24. Nilai SAKIP (kategori)

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

a) Penggunaan anggaran yang mampu mendukung penguatan akuntabilitas kinerja, melalui pelaksanaan program perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berorientasi hasil.
b) Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik aparatur sipil negara maupun tim pengelola kinerja, dalam menyusun dokumen perencanaan, melakukan cascading kinerja, serta memastikan keterkaitan antara program, kegiatan, dan indikator kinerja.
c) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung sistem kinerja, seperti aplikasi e-SAKIP, sistem informasi perencanaan dan pelaporan, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas data kinerja serta mempermudah monitoring dan evaluasi.
d) Pelaksanaan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas manajemen kinerja, melalui penyelarasan perencanaan dan penganggaran, penguatan budaya kinerja, serta penerapan prinsip value for money dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
e) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam penguatan SAKIP, melalui sinergi antar perangkat daerah serta pembinaan dan evaluasi dari pemerintah pusat guna memastikan implementasi akuntabilitas kinerja berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, peningkatan nilai SAKIP di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

25. Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)

Hingga periode pelaporan ini, data capaian Indeks Pemerintahan Digital Tahun 2025 masih belum rilis.

26. Opini BPK (opini)

Hingga periode pelaporan ini, data capaian Opini BPK Tahun 2025 masih belum rilis.

27. Indeks Pelayanan Publik (Indeks)

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :
a) Penggunaan anggaran yang mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui pengembangan sarana dan prasarana pelayanan, digitalisasi layanan, serta inovasi pelayanan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.
b) Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, khususnya aparatur pelayanan sebagai frontliner, dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan profesional sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
c) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti mall pelayanan publik, sistem layanan berbasis elektronik,

serta fasilitas pelayanan yang ramah pengguna untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat.

d) Pelaksanaan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, melalui penyederhanaan prosedur, penerapan standar pelayanan, serta pengembangan inovasi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
e) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antar perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, peningkatan Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat, kepercayaan publik, serta kualitas tata kelola pemerintahan

28. Predikat Inovasi Daerah (kategori)

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan sumber daya dalam upaya meningkatkan penerapan inovasi dalam pembangunan di Kabupaten Tabalong dapat dikatakan relatif efisien, karena mampu menghasilkan capaian kinerja yang menunjukkan perkembangan positif terhadap peningkatan predikat inovasi daerah. Efisiensi tersebut tercermin dari:

a) Penggunaan anggaran yang mampu mendukung pengembangan inovasi daerah, baik melalui fasilitasi penciptaan inovasi pada perangkat daerah maupun penguatan sistem pembinaan dan pengelolaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
b) Pemanfaatan sumber daya manusia aparatur yang efektif, melalui peningkatan kapasitas aparatur serta dorongan kepada perangkat daerah untuk terus menciptakan dan mengimplementasikan berbagai inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
c) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital, yang mendukung pengembangan berbagai inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta percepatan penyebarluasan praktik baik inovasi di lingkungan pemerintah daerah.
d) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam mendorong budaya inovasi, termasuk pembinaan, monitoring, evaluasi, serta dokumentasi inovasi daerah yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan inovasi.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, diharapkan penerapan inovasi dalam pembangunan di Kabupaten Tabalong dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah.

f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.

1. Harapan Lama Sekolah (tahun)

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan Harapan Lama Sekolah :

a) Program peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, serta penyediaan layanan pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
b) Program wajib belajar dan pencegahan putus sekolah, melalui pemberian bantuan pendidikan, beasiswa, serta intervensi bagi peserta didik yang berisiko putus sekolah agar tetap melanjutkan pendidikan.
c) Program peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, serta pembinaan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.
d) Program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, melalui pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas proses pembelajaran, serta penyediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar.
e) Program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan, melalui sosialisasi, kampanye pendidikan, serta pelibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

2. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS):

a) Pelaksanaan program peningkatan akses dan mutu pendidikan, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat.
b) Pelaksanaan program wajib belajar dan pencegahan putus sekolah, melalui pemberian bantuan pendidikan, beasiswa, serta dukungan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu guna meningkatkan partisipasi sekolah.
c) Pelaksanaan program pendidikan kesetaraan, melalui penyelenggaraan paket A, B, dan C bagi masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan formal untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah.
d) Pelaksanaan program peningkatan kualitas pembelajaran, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi guru serta penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif.
e) Pelaksanaan program penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan, seperti pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas,

penyediaan fasilitas belajar, serta sarana penunjang lainnya guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

f) Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan dukungan lintas sektor, melalui sinergi dengan sektor sosial dan ekonomi dalam memberikan dukungan kepada keluarga agar anak tetap melanjutkan pendidikan.
g) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pembangunan pendidikan, melalui koordinasi antar perangkat daerah untuk memastikan peningkatan akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, peningkatan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

3. Umur Harapan Hidup (tahun)

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH):

a) Pelaksanaan program peningkatan pelayanan kesehatan dasar, melalui penyediaan layanan kesehatan di puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
b) Pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak, melalui kegiatan pemeriksaan kehamilan, persalinan oleh tenaga kesehatan, serta pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
c) Pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui kegiatan imunisasi, deteksi dini penyakit, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular guna menekan angka kesakitan dan kematian.
d) Pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat, melalui pemberian makanan tambahan, pemantauan status gizi, serta edukasi gizi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
e) Pelaksanaan program peningkatan akses air bersih dan sanitasi, melalui penyediaan sarana sanitasi dan air bersih yang layak untuk mendukung kesehatan lingkungan.
f) Pelaksanaan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, melalui edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pelibatan kader kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.
g) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, peningkatan Umur Harapan Hidup di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Prevalensi Stunting

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan penurunan prevalensi stunting:

a) Pelaksanaan program intervensi gizi spesifik, melalui kegiatan pemberian makanan tambahan, suplementasi gizi, pemantauan tumbuh kembang balita, serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan menyusui guna mencegah dan menurunkan stunting.
b) Pelaksanaan program intervensi gizi sensitif, melalui penyediaan air bersih, sanitasi layak, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan gizi masyarakat.
c) Pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak, melalui pemeriksaan kehamilan, pemantauan kesehatan balita, serta edukasi pola asuh yang baik untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
d) Pelaksanaan program edukasi dan perubahan perilaku masyarakat, melalui sosialisasi pola hidup sehat, perbaikan pola konsumsi gizi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting.
e) Pelaksanaan program pemberdayaan keluarga dan masyarakat, melalui pelibatan kader posyandu, pendamping keluarga, serta program berbasis masyarakat dalam mendukung percepatan penurunan stunting.
f) Pelaksanaan program peningkatan kualitas data dan pemantauan, melalui kegiatan pencatatan dan pelaporan status gizi serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan intervensi berjalan efektif.
g) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antar perangkat daerah, pemerintah desa, serta dukungan pemerintah pusat dalam percepatan penurunan stunting.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus dipercepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5. Indeks Ketahanan Pangan

Keberhasilan pencapaian Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Tabalong didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh pemerintah daerah. Program-program tersebut meliputi:

a) Program peningkatan produksi tanaman pangan
b) Program pemberdayaan petani dan kelompok tani
c) Program diversifikasi dan konsumsi pangan lokal
d) Program penguatan distribusi dan stabilitas pasokan pangan
e) Program pengembangan sektor perikanan dan sumber protein lokal.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan di masyarakat sehingga mampu memperkuat

ketahanan pangan daerah.

6. Persentase Penduduk Miskin (%)

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan penurunan persentase penduduk miskin:

a) Pelaksanaan program perlindungan sosial, melalui pemberian bantuan sosial, subsidi, serta jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan guna menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan dasar.
b) Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan keterampilan kerja, serta akses permodalan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
c) Pelaksanaan program peningkatan akses terhadap layanan dasar, melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin guna meningkatkan kualitas hidup.
d) Pelaksanaan program penciptaan lapangan kerja, melalui pengembangan sektor ekonomi produktif, investasi daerah, serta kegiatan padat karya untuk menyerap tenaga kerja.
e) Pelaksanaan program pengendalian inflasi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok, guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.
f) Pelaksanaan program pendataan dan validasi data kemiskinan, melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk memastikan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
g) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antar perangkat daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat

7. Indeks Gini (Indeks)

Pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Tabalong telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari keberhasilan dalam menurunkan persentase penduduk miskin hingga melampaui target yang telah ditetapkan.

Namun demikian, capaian Indeks Gini yang masih berada di atas target menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendapatan masyarakat masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, serta pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh

masyarakat.

8. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Keberhasilan TPT Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 dipengaruhi oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang saling mendukung, yaitu:

a) Program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
b) Program pemberdayaan UMKM dan sektor informal.
c) Penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan dan investasi.
d) Program pendidikan dan kesetaraan kesempatan kerja.
e) Koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan program berjalan efektif.

Sinergi program-program tersebut membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Tabalong relatif stabil meski masih sedikit di atas target.

9. Persentase Penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun

Beberapa program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap penurunan persentase NEET antara lain:

a) Program Pelatihan Kerja dan Pengembangan Kompetensi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi generasi muda sehingga mereka lebih siap memasuki dunia kerja. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
   - pelatihan keterampilan kerja
   - pelatihan berbasis kompetensi
   - pelatihan kewirausahaan.

Program ini membantu meningkatkan peluang kerja bagi pemuda serta mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif.

b) Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
Program ini bertujuan untuk mendorong generasi muda agar mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri melalui kegiatan kewirausahaan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
   - pelatihan kewirausahaan
   - pendampingan usaha pemula
   - fasilitasi akses permodalan bagi usaha pemuda.

Program ini berperan penting dalam mengurangi ketergantungan pemuda terhadap lapangan kerja formal.

c) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Peningkatan kualitas pendidikan vokasi melalui sekolah menengah kejuruan maupun lembaga pelatihan kerja membantu meningkatkan keterampilan generasi muda yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

d) Program Pemberdayaan Pemuda

Program pemberdayaan pemuda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan ekonomi, antara lain melalui:
- kegiatan kepemudaan
- pelatihan kepemimpinan pemuda
- pengembangan organisasi kepemudaan.

10. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB:

a) Pelaksanaan program pengembangan industri pengolahan, melalui peningkatan kapasitas produksi, fasilitasi hilirisasi komoditas, serta penguatan industri berbasis potensi lokal guna meningkatkan nilai tambah produk.
b) Pelaksanaan program pengembangan kawasan industri, melalui penyediaan lahan, infrastruktur pendukung, serta kemudahan akses bagi pelaku industri untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan.
c) Pelaksanaan program pemberdayaan pelaku industri dan UMKM, melalui pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses permodalan guna meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha.
d) Pelaksanaan program peningkatan kualitas dan standar produk industri, melalui sertifikasi, standarisasi, serta pengembangan inovasi produk untuk memperluas akses pasar.
e) Pelaksanaan program peningkatan investasi sektor industri, melalui penyederhanaan perizinan, promosi investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
f) Pelaksanaan program penguatan rantai pasok dan distribusi, melalui pengembangan sistem logistik, kemitraan usaha, serta akses pasar untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran.
g) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengembangan industri pengolahan secara berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus meningkat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

11. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB:

a) Pelaksanaan program peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, melalui penyediaan sarana

produksi, benih unggul, serta dukungan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi.

b) Pelaksanaan program pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui penataan kawasan berbasis komoditas unggulan serta penguatan sentra produksi guna meningkatkan efisiensi dan skala usaha.
c) Pelaksanaan program pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku usaha sektor primer, melalui pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses permodalan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pelaku usaha.
d) Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana pendukung, seperti pembangunan dan rehabilitasi irigasi, jalan usaha tani, serta fasilitas perikanan untuk mendukung kelancaran produksi dan distribusi.
e) Pelaksanaan program peningkatan nilai tambah produk, melalui pengolahan hasil pertanian dan perikanan, diversifikasi produk, serta penguatan pemasaran untuk meningkatkan pendapatan.
f) Pelaksanaan program penguatan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, melalui penerapan praktik ramah lingkungan serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
g) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antara perangkat daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus meningkat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

12. Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%)

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB:

a) Pelaksanaan program pengembangan pariwisata daerah, melalui promosi destinasi wisata, pengembangan objek wisata, serta peningkatan daya tarik daerah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
b) Pelaksanaan program pengembangan usaha akomodasi dan kuliner, melalui pembinaan pelaku usaha perhotelan, restoran, dan usaha kuliner guna meningkatkan kualitas layanan dan daya saing usaha.
c) Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM sektor jasa dan ekonomi kreatif, melalui pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses permodalan untuk mendorong pertumbuhan usaha di sektor akomodasi dan kuliner.
d) Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti infrastruktur akses menuju destinasi wisata,

fasilitas umum, serta kawasan wisata yang nyaman dan representatif.

e) Pelaksanaan program peningkatan kualitas dan standar pelayanan, melalui sertifikasi usaha, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penerapan standar pelayanan yang profesional.
f) Pelaksanaan program promosi dan pemasaran produk lokal, melalui kegiatan event, festival, serta promosi digital guna meningkatkan daya tarik sektor akomodasi dan kuliner.
g) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antara perangkat daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata dan jasa secara berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus meningkat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

13. Nilai Realisasi Investasi Non-Tambang (Rupiah)

Keberhasilan realisasi investasi non-tambang Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar Rp1,64 triliun tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pengembangan investasi. Program pengembangan iklim penanaman modal, promosi investasi, pelayanan perizinan berusaha, serta pengendalian pelaksanaan investasi terbukti mampu meningkatkan minat investor dan mempercepat realisasi investasi. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dinilai efektif dalam mendorong pertumbuhan investasi non-tambang di Kabupaten Tabalong.

14. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

Hingga periode pelaporan ini, data capaian Rasio Kewirausahaan Tahun 2025 masih belum rilis.

15. Indeks Infrastruktur (Indeks)

Peningkatan Indeks Infrastruktur tidak hanya bergantung pada satu perangkat daerah, tetapi merupakan hasil sinergi berbagai perangkat daerah, seperti:

a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan jalan dan infrastruktur dasar
b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pembangunan infrastruktur permukiman dan sanitasi
c) Perangkat daerah terkait lainnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur wilayah.

Koordinasi antar perangkat daerah tersebut turut meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya pembangunan.

16. Indeks Desa (Indeks)

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Desa antara lain:

a) Program pembangunan infrastruktur desa
b) Program pemberdayaan masyarakat desa
c) Program pengembangan ekonomi desa
d) Program peningkatan pelayanan dasar di desa
e) Program yang Perlu Ditingkatkan

17. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK):

a) Pelaksanaan program efisiensi energi dan pengurangan emisi, melalui penerapan teknologi hemat energi pada fasilitas pemerintah, industri, dan rumah tangga guna menekan konsumsi energi berbasis fosil.
b) Pelaksanaan program pengelolaan sampah dan limbah ramah lingkungan, melalui pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah serta pengembangan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan.
c) Pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi lingkungan, melalui kegiatan penanaman pohon, perlindungan kawasan hutan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan serapan karbon.
d) Pelaksanaan program pengembangan energi terbarukan, melalui pemanfaatan energi alternatif seperti tenaga surya dan sumber energi ramah lingkungan lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
e) Pelaksanaan program peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, melalui edukasi dan kampanye lingkungan hidup untuk mendorong perilaku ramah lingkungan dan pengurangan emisi dalam kehidupan sehari-hari.
f) Pelaksanaan program transportasi ramah lingkungan, melalui pengembangan transportasi yang efisien serta pengurangan emisi dari sektor transportasi.
g) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antara perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, penurunan intensitas emisi GRK di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus ditingkatkan serta memberikan dampak yang signifikan terhadap pelestarian lingkungan, ketahanan perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

18. Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)

Beberapa program dan kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

a) Program Pengelolaan Lingkungan Hidup
   Program ini bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan melalui berbagai kegiatan seperti:
   - pengendalian pencemaran lingkungan
   - pengelolaan sampah dan limbah
   - peningkatan ruang terbuka hijau
   - rehabilitasi lahan kritis.

   Program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penurunan emisi gas rumah kaca.
b) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
   Kegiatan rehabilitasi hutan dan penghijauan merupakan salah satu upaya penting dalam mengurangi emisi karbon sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:
   - penanaman pohon
   - rehabilitasi lahan kritis
   - konservasi sumber daya alam.

   Program ini juga membantu mengurangi potensi bencana seperti banjir dan longsor.
c) Program Penanggulangan Bencana Daerah
   Program ini dilaksanakan oleh BPBD melalui berbagai kegiatan seperti:
   - penyusunan dokumen kajian risiko bencana
   - peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
   - pengembangan sistem peringatan dini bencana
   - penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

   Program ini berperan penting dalam menurunkan tingkat risiko bencana di Kabupaten Tabalong.
d) Program Desa Tangguh Bencana
   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana melalui kegiatan seperti:
   - pelatihan kebencanaan
   - simulasi evakuasi bencana
   - pembentukan kelompok relawan kebencanaan.

   Melalui program ini, masyarakat desa diharapkan mampu melakukan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana secara mandiri.

19. Angka Konflik Bernuansa SARA

Beberapa program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:

a) Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama. Program ini dilakukan melalui:

- dialog antar umat beragama
- kegiatan forum kerukunan umat beragama (FKUB)
- sosialisasi moderasi beragama.

b) Program Pencegahan Konflik Sosial. Kegiatan yang dilakukan antara lain:
- deteksi dini potensi konflik sosial
- koordinasi dengan aparat keamanan
- pemantauan dinamika sosial masyarakat.

c) Program Pendidikan Toleransi dan Kebhinekaan. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai toleransi dan keberagaman.

d) Program Penguatan Kelembagaan Sosial. Penguatan peran lembaga masyarakat seperti:
- FKUB
- lembaga adat
- organisasi kemasyarakatan.

20. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)

Beberapa program yang mendukung peningkatan IPK antara lain:

a) Program Pelestarian Warisan Budaya. Kegiatan yang dilakukan meliputi:
- inventarisasi dan perlindungan warisan budaya
- pelestarian tradisi dan adat istiadat
- pengembangan museum dan situs budaya.

b) Program Pengembangan Seni dan Budaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas masyarakat melalui:
- festival seni budaya
- pembinaan kelompok seni
- pelatihan seni tradisional.

c) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif. Program ini mendorong pemanfaatan budaya sebagai sumber ekonomi melalui:
- pengembangan produk kerajinan budaya
- promosi budaya lokal.

d) Program Pendidikan dan Literasi Budaya. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi budaya.

21. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)

Beberapa program yang berkontribusi terhadap peningkatan kesetaraan gender antara lain:

a) Program Pengarusutamaan Gender (PUG). Kegiatan yang dilakukan meliputi:
- penyusunan perencanaan responsif gender
- pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

b) Program Pemberdayaan Perempuan. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan melalui:
- pelatihan kewirausahaan
- pengembangan usaha perempuan.

c) Program Perlindungan Perempuan dan Anak. Program ini mencakup:
   - layanan perlindungan korban kekerasan
   - edukasi kesetaraan gender.
d) Program peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Meliputi:
   - peningkatan keterwakilan perempuan dalam organisasi dan pemerintahan
   - peningkatan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi.

22. Indeks Integritas

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan Indeks Integritas:

a) Pelaksanaan program penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui pembangunan Zona Integritas, penguatan reformasi birokrasi, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
b) Pelaksanaan program penguatan pengawasan internal, melalui optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pelaksanaan audit, reviu, serta pengendalian internal guna mencegah terjadinya penyimpangan.
c) Pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui perbaikan standar pelayanan, penyederhanaan proses layanan, serta peningkatan kepuasan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas aparatur.
d) Pelaksanaan program digitalisasi dan transparansi layanan, melalui pengembangan sistem informasi dan aplikasi pelayanan publik untuk meminimalkan interaksi langsung serta mengurangi potensi praktik korupsi.
e) Pelaksanaan program penguatan budaya integritas dan etika aparatur, melalui sosialisasi nilai-nilai integritas, penegakan disiplin, serta peningkatan kesadaran ASN terhadap pentingnya pelayanan yang bersih dan bebas dari korupsi.
f) Pelaksanaan program pengelolaan pengaduan masyarakat, melalui penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses serta tindak lanjut yang responsif terhadap laporan masyarakat.
g) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antara perangkat daerah, aparat pengawas, serta dukungan instansi eksternal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, peningkatan Indeks Integritas di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta meningkatnya kepercayaan masyarakat.

23. Indeks SPBE (Indeks)

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE):

a) Pelaksanaan program pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, melalui penyediaan jaringan internet, pusat data, serta perangkat pendukung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
b) Pelaksanaan program pengembangan aplikasi dan sistem pemerintahan digital, melalui pembangunan dan integrasi aplikasi pelayanan publik serta sistem administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.
c) Pelaksanaan program penguatan tata kelola SPBE, melalui penyusunan arsitektur SPBE, kebijakan, serta standar operasional prosedur guna memastikan implementasi SPBE berjalan terarah dan terintegrasi.
d) Pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem digital.
e) Pelaksanaan program peningkatan keamanan informasi dan perlindungan data, melalui penerapan sistem keamanan siber serta pengelolaan data yang terstandar untuk menjaga keandalan sistem SPBE.
f) Pelaksanaan program peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital, melalui penyederhanaan proses layanan, peningkatan aksesibilitas, serta pengembangan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
g) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung interoperabilitas sistem serta implementasi SPBE secara menyeluruh.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, peningkatan Indeks SPBE di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

24. Nilai SAKIP (kategori)

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

a) Pelaksanaan program penguatan perencanaan kinerja, melalui penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, penyelarasan indikator kinerja, serta cascading kinerja dari level pimpinan hingga unit kerja.
b) Pelaksanaan program penguatan pengukuran dan pelaporan kinerja, melalui penyusunan indikator yang terukur, pemantauan capaian kinerja secara berkala, serta penyusunan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu.
c) Pelaksanaan program integrasi perencanaan dan penganggaran, melalui penyelarasan antara program, kegiatan, dan alokasi anggaran agar berorientasi pada pencapaian hasil (outcome).

d) Pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntabilitas kinerja, melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan dalam implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah.
e) Pelaksanaan program pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kinerja, seperti aplikasi e-SAKIP untuk mendukung proses perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara terintegrasi.
f) Pelaksanaan program evaluasi dan pengendalian kinerja, melalui monitoring dan evaluasi secara berkala serta tindak lanjut hasil evaluasi guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.
g) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas perangkat daerah, melalui koordinasi dan sinergi antar unit kerja dalam memastikan konsistensi penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh perangkat daerah.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, peningkatan nilai SAKIP di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

25. Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)

Hingga periode pelaporan ini, data capaian Indeks Pemerintahan Digital Tahun 2025 masih belum rilis.

26. Opini BPK (opini)

Hingga periode pelaporan ini, data capaian Opini BPK Tahun 2025 masih belum rilis.

27. Indeks Pelayanan Publik (Indeks)

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan Indeks Pelayanan Publik:
a) Pelaksanaan program peningkatan kualitas standar pelayanan publik, melalui penyusunan dan penyempurnaan standar pelayanan, maklumat pelayanan, serta SOP yang jelas dan terukur pada setiap unit layanan.
b) Pelaksanaan program pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik, melalui penyediaan fasilitas pelayanan yang representatif, ramah disabilitas, serta berbasis kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat.
c) Pelaksanaan program digitalisasi pelayanan publik, melalui pengembangan layanan berbasis elektronik (e-government) untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan transparansi pelayanan.
d) Pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penguatan kompetensi dan etika pelayanan bagi ASN sebagai frontliner pelayanan publik.
e) Pelaksanaan program pengelolaan pengaduan masyarakat, melalui penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses, responsif, serta tindak lanjut yang cepat dan tepat terhadap setiap aduan masyarakat.

f) Pelaksanaan program inovasi pelayanan publik, melalui pengembangan berbagai inovasi layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
g) Pelaksanaan program monitoring dan evaluasi pelayanan publik, melalui survei kepuasan masyarakat, evaluasi kinerja layanan, serta tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan.
h) Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antar perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, peningkatan Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan, kepuasan masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.

28. Predikat Inovasi Daerah (kategori)

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis kinerja Meningkatnya Penerapan Inovasi dalam Pembangunan di Kabupaten Tabalong didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Program-program tersebut meliputi:
a) Program pengembangan dan pembinaan inovasi daerah, melalui fasilitasi penciptaan inovasi pada perangkat daerah serta pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan inovasi daerah.
b) Program penguatan kapasitas aparatur dalam pengembangan inovasi, melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, serta peningkatan kompetensi aparatur dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
c) Program pengelolaan dan dokumentasi inovasi daerah, melalui inventarisasi, pelaporan, serta pengembangan sistem pengelolaan inovasi daerah untuk mendukung penilaian inovasi daerah secara berkelanjutan.
d) Program pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung inovasi pelayanan publik, melalui pengembangan berbagai aplikasi dan sistem digital yang mendukung efektivitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
e) Program monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi daerah, untuk memastikan keberlanjutan, efektivitas, serta pengembangan inovasi yang telah diterapkan pada perangkat daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerapan inovasi dalam pembangunan di Kabupaten Tabalong serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

Kabupaten Tabalong tidak ada mendapat dan/atau melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.

3.1.1 Target Kinerja

Kabupaten Tabalong tidak ada mendapat dan/atau melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.

3.1.2 Realisasi

Kabupaten Tabalong tidak ada mendapat dan/atau melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.

Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tabalong

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	-	-	-	Kabupaten Tabaong	-	-	-	-	-	-	

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

Kabupaten Tabalong tidak ada mendapat dan/atau melaksanakan tugas pembantuan Provinsi Kalimantan Selatan.

3.2.1 Target Kinerja

Kabupaten Tabalong tidak ada mendapat dan/atau melaksanakan tugas pembantuan Provinsi Kalimantan Selatan

3.2.2 Realisasi

Kabupaten Tabalong tidak ada mendapat dan/atau melaksanakan tugas pembantuan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 3.2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten Tabalong.

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3 Permasalahan dan Kendala

Kabupaten Tabalong tidak ada mendapat dan/atau melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Kabupaten Tabalong tidak ada mendapat dan/atau melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan terbagi dua jenjang pendidikan yaitu :

1) Sekolah dasar yang melayani peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
2) Sekolah Menengah Pertama melayani peserta didik yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.1 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2025

4.1.3 Realisasi

Tabel 4.2 Capaian Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja		Satuan	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Jumlah Target SPM (Awal)	Jumlah Target SPM Terlayani	Jumlah Target SPM Perubahan	Persentase Target Perubahan
1	2		3	4	5	7	7	8
Pendidikan Dasar Usia Dini	**Jumlah Yang Harus Dilayani**		***warga negara***	**9,303**	**9,288**	**9,288**	**9,303**	**99.84%**
	1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	*Persentase*	**65**	**35**	**35**	**65**	**53.85%**
	2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	*Persentase*	**65**	**1,128**	**1,128**	**65**	**1735.38%**
Pendidikan Dasar	**Jumlah Yang Harus Dilayani**		***warga negara***	**43,814**	**42,662**	**42,662**	**43,814**	**97.37%**
		SD						
	1	Kemampuan literasi	*Nilai*	**63.99**	**63.99**	**63.99**	**63.99**	**100.00%**
	2	Kemampuan numerasi	*Nilai*	**56.21**	**59.11**	**59.11**	**56.21**	**105.16%**
	3	Indeks iklim keamanan	*Nilai*	**75.81**	**76.71**	**76.71**	**75.81**	**101.19%**
	4	Indeks iklim kebhinekaan	*Nilai*	**71.51**	**72.51**	**72.51**	**71.51**	**101.40%**
	5	Indeks iklim inklusivitas	*Nilai*	**60.62**	**63.12**	**63.12**	**60.62**	**104.12%**
		SMP						
	1	Kemampuan literasi	*Nilai*	**72.46**	**80.45**	**80.45**	**72.46**	**111.03%**
	2	Kemampuan numerasi	*Nilai*	**65.01**	**77.01**	**77.01**	**65.01**	**118.46%**
	3	Indeks iklim keamanan	*Nilai*	**74.04**	**74.04**	**74.04**	**74.04**	**100.00%**
	4	Indeks iklim kebhinekaan	*Nilai*	**72.15**	**72.15**	**72.15**	**72.15**	**100.00%**
	5	Indeks iklim inklusivitas	*Nilai*	**62.58**	**62.58**	**62.58**	**62.58**	**100.00%**
Pendidikan Kesetaraan	**Jumlah Yang Harus Dilayani**		***warga negara***	**1,110**	**1,783**	**1,783**	**1,110**	**160.63%**
	1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	*Persentase*	**48.85**	**48.85**	**48.85**	**48.85**	**100.00%**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2025

4.1.4 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung tercapainya SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Tabalong alokasi anggaran untuk urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan APBD-P TA. 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	**Belanja Operasi**	**509.241.269.173,00**
	Belanja Pegawai	413.136.309.497,00
	Belanja Barang dan Jasa	85.360.543.429,00
	Belanja Hibah	10.744.416.247,00
2	**Belanja Modal**	**85.842.665.750,00**
	Belanja Modal Tanah	5.289.455.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	17.201.935.067,00
	Belanja Modal Gedung & Bangunan	59.305.845.975,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.195.429.708,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	850.000.000,00
	TOTAL	**595.083.934.923,00**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2025

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1	2	3	4	5
1	Golongan IV	46	17	63
2	Golongan III	18	11	29
3	Golongan II	4	2	6
4	Golongan I	-	-	-
	TOTAL	**68**	**30**	**98**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2025

Tabel 4.5 Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Pendidikan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1	2	3	4	5
1	SD	0	0	0
2	SMP	1	0	1
3	SLTA	2	2	4
4	Diploma	2	0	2
5	Sarjana (S1)	46	27	73
6	Megister (S2	17	1	18
7	Doktor (S3)	0	0	0
	TOTAL	**68**	**30**	**98**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2025

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya ketersediaan basis data sebagai dasar penghitungan dalam penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, terlebih untuk data eksternal yang bersifat lintas sektoral.
2) Masih rendahnya capaian partisipasi sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.
3) Masih belum meratanya akses pada Pendidikan Kesetaraan sehingga belum dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

2. Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan basis data sebagai dasar penghitungan dalam penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, terlebih untuk data eksternal yang bersifat lintas sektoral.
2. Masih rendahnya capaian partisipasi sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Masih belum meratanya akses pada Pendidikan Kesetaraan sehingga belum dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, ditetapkan 12 jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu

1. Pelayaaan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terifeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefeciency Virus) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Sebagaimana disebutkan dalam PerMenKes Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pasal 3, capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100%. Berikut adalah target SPM Kesehatan Kabupaten Tabalong tahun 2025.

Tabel 4.6 Target Capaian Kinerja SPM Kesehatan Kabupaten Tabalong

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran		Target Capaian Kinerja
		Perhitungan	Jumlah	
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang ditemukan dilapangan	3093	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang ditemukan dilapangan	3093	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang ditemukan dilapangan	3100	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang ditemukan dilapangan	18808	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-15 tahun berdasarkan data Dukcapil	43561	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada usia lansia	Jumlah penduduk usia ≥ 60 tahun berdasarkan data Dukcapil	170917	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah penduduk usia 15 – 59 tahun berdasarkan data Dukcapil	19000	100%
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang ditemukan dilapangan	17.351	100%
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus	3016	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran		Target Capaian Kinerja
		Perhitungan	Jumlah	
1	2	3	4	5
	mellitus	yang ditemukan dilapangan		
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ yang ditemukan dilapangan	371	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah orang terduga TBCyang ditemukan dilapangan	4587	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terifeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodefeciency Virus*)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manuasia yang ditemukan dilapangan	6214	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tabalong, 2025

4.2.3 Realisasi

Pemerintah wajib memenuhi standar mutu pelayanan setiap pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Mutu Pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan terdiri atas:

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
2. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber data manusia kesehatan; dan
3. Capaian kinerja Pemerintah Daerah

Capaian kinerja setiap jenis pelayanan dasar dalam SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam tabel.

Tabel 4.7 Capaian Pelaksanaan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar			Pendanaan			
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.093	2.720	87,94	136.710.800	128.430.415	93,44	APBD
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.093	3.047	98,51	124.339.400	95.578.000	76,87	APBD
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.100	3.031	97,77	119.130.000	49.791.862	41,80	APBD
4	Pelayanan Kesehatan Balita	18.808	15.346	81,59	75.256.800	65.023.330	86,40	APBD
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan dasar	43.561	42.856	98,38	423.703.000	411.321.000	97,08	APBD
6	Pelayanan Kesehatan Pada	170.917	154.331	90,30	92.753.026	54.053.000	58,28	APBD

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar			Pendanaan			
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Usia Produktif							
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	19.000	18.998	99,99	477.726.000	446.427.000	93,45	APBD
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	17.351	16.717	96,35	49.356.000	23.228.000	47,06	APBD
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.016	4.445	100,00	47.331.000	35.031.000	74,01	APBD
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	371	1.535	100,00	57.988.000	24.830.000	42,82	APBD
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.587	2.525	55,74	94.833.208	84.510.010	89,11	APBD
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.214	6.412	100,00	53.543.000	42.417.316	79,22	APBD

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tabalong, 2025

Tabel 4.8 Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM Kab./Kota)	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3093	2720	70,35	41190	25514	14,98	85,33	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3093	3047	78,81	12683	9627	17,81	96,62	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3100	2903	74,92	68098	60363	16,44	91,35	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	18808	15346	65,27	159087	92888	14,09	79,36	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	43561	42856	78,71	251984	246389	18,41	97,12	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	170917	154331	72,24	7889	3054	18,34	90,57	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	19000	18998	79,99	74500	74514	20,00	99,99	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	17.351	16717	77,08	152	152	20,00	97,08	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3016	4445	80,00	169	169	20,00	100,00	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	371	1535	80,00	196	198	20,00	100,00	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	4587	2557	44,60	5458	3128	18,05	62,64	
12	Pelayanan Kesehatan Orang	6214	6412	80,00	18782	13574	18,32	98,32	

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM Kab./Kota)	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)								

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tabalong, 2025

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2025 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Tabalong dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.9 Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Kegiatan	Anggaran	
		Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	136.710.800	128.430.415
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	124.339.400	95.578.000
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	119.130.000	49.791.862
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	75.256.800	65.023.330
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan dasar	423.703.000	411.321.000
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	92.753.026	54.053.000
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	477.726.000	446.427.000
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	49.356.000	23.228.000
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	47.331.000	35.031.000
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	57.988.000	24.830.000
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	94.833.208	84.510.010
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	53.543.000	42.417.360
	TOTAL	**1.752.670.234**	**1.460.640.977**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tabalong, 2025

4.2.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 terdiri dari dokter umum, dokter gigi, perawat, perawat gigi,

bidan, tenaga teknis kefarmasian, apoteker, sanitarian, nutrisionis, laboratorium, fisioterapi, kesehatan masyarakat dan lainnya.

Selain tenaga kesehatan berstatus PNS dan PPPK, di Puskesmas se-Kabupaten Tabalong juga ada tenaga kesehatan berstatus Tugsus Kabupaten dan Tugsus Provinsi yang terdiri dari profesi dokter umum, dokter gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, bidan, perawat, radiografer, kesehatan lingkungan, perawat gigi, ahli gizi dan kesehatan masyarakat.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.10 Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Jumlah Ibu hamil k1 berkurang sehingga jumlah ibu hamil k6 mengalami penurunan dikarenakan ibu hamilnya belum sampai waktunya k6. 2. Untuk DO SPM ibu hamil menggunakan k6, pada trimester 1 dilayani dokter untuk USG, pada Trimester II ibu hamil mendapatkan kunjungan 2kali, pada trimester 3 ibu hamil harus melakukan kunjungan 3 kali harus dilayani USG 1 kali 3. Ada 3 puskesmas yg tdk melayani USG disebabkan USG rusak (1) dan dokter yang terlatih USG pindah tugas (1) dan mengikuti Tugas Belajar (1) 4. target ibu hamil 3.561 orang	Mengusulkan untuk pengadaan USG dan pelatihan Pelayanan ANC dasar dengan USG Meningkatkan kompetensi petugas dalam pencatatan dan pelaporan yang adekuat sehingga semua ibu hamil
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Masih ada persalinan oleh dukun kampung dan persalinan di rumah	Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap persalinan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja masing-masing
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah kelahiran hidup berkurang dari tahun sebelumnya	Semua bayi baru lahir mendapatkan pelayanan standar
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Masih rendahnya kesadaran masyarakat membawa anak ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan SDIDTK	Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membawa anaknya ke Puskesmas guna mendapatkan pelayanan SDIDTK sesuai standar
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan dasar	Semua sekolah serta semua peserta didik usia Pendidikan dasar sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, tetapi Saat Pelaksanaan kegiatan pelayanan/penjarkes/PKG Sekolah ada beberapa peserta didik yg tdk hadir ke sekolah karena sakit, karena ijin/ada berbenturan dg kegiatan sekolah lainnya/kegiatan keagamaan di sekolah serta berdekatan dg jadwal ulangan sekolah dan pihak sekolah tdk bsa merevisi ulang agar peserta didik bsa lebih konsentrasi dengan ulangannya.	Petugas puskesmas/pihak puskesmas sdh koordinasi dg pihak sekolah untuk menjadwalkan ulang kegiatan pelaksanaan penjarkes/PKG Sekolah bagi peserta didik yg tdk hadir karena sakit, ijin, dan yg ikut pelaksanaan ulangan shg peserta didik bsa dilakukan dan dilayani penjarkes/PKG Sekolah di Sekolah.
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kesehatan masih kurang. Ketersediaan BMHP terbatas	Promosi kesehatan tentang pentingnya deteksi dini kesehatan perlu ditingkatkan. Ketersediaan BMHP sesuai

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
			kebutuhan
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Penyediaan bahan hapis pakai yang masih belum terpenuhi	Pengadaan bhp diminta ke dana desa
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kesadaran penderita Hipertensi untuk rutin memeriksakan kesehatan masih kurang	Promosi kesehatan tentang hipertesi ditingkatkan
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	capaian melebihi target karena layanan di hitung dengan total kunjungan baru lama	
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	capaian melebihi target karena layanan di hitung dengan total kunjungan baru lama	
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	kurangnya alat pemeriksaan sampel TBC dan keterlambatan pengentrian ke aplikasi SITB	penambahan alat pemeriksaan sampel TBC (alat TCM)
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kurangnya alat pemeriksaan rapid HIV	Pengadaan alat pemeriksaan Rapid HIV

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tabalong, 2025

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sudah menjadi tugas pemerintah kabupaten/kota untuk dapat menyediakan fasilitas pelayanan dasar bagi warganya. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 , bahwa jenis pelayanan dasar untuk kabupaten/kota terdiri atas 28 (dua puluh delapan) jenis. Di antaranya yang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa yang dimaksud Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum;
2. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko

Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka ada dua indikator bidang pekerjaan umum yang harus dilaksanakan beserta jenis pelayanan dasar dan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti tertera dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.11 Target Capaian untuk SPM Urusan Pekerjaan Umum 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong, 2025

4.3.3 Realisasi

Capaian untuk layanan dasar air minum maupun air limbah dijabarkan pada table dibawah, dimana dapat diketahui jumlah rumah tangga yang belum terlayani air minum maupun air limbah, untuk kemudian direkapitulasi dalam bentuk persentase layanan.

Tabel 4.12 Capaian Layanan Air Minum

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TARGET	REALISASI		
			TOTAL	TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
1	TANJUNG	JANGKUNG	1607	443	7	1157
2		TANJUNG	1829	1807	300	-278
3		AGUNG	941	809	98	34
4		HIKUN	1281	1085	140	56
5		BANYU TAJUN	569	339	36	194
6		PAMARANGAN KIWA	691	281	38	372
7		PUAIN KIWA	365	232	2	131
8		JUAI	451	316	318	-183
9		MAHE SEBERANG	226	108	35	83
10		KAMBITIN	827	119	392	316
11		WAYAU	1293	740	674	-121
12		GARUNGGUNG	538	390	411	-263

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TARGET	REALISASI		
			TOTAL	TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
13		KITANG	504	161	351	-8
14		SUNGAI PIMPING	641	460	182	-1
15		KAMBITIN RAYA	920	336	615	-31
16	MURUNG PUDAK	BELIMBING RAYA	3832	3510	494	-172
17		BELIMBING	1711	745	352	614
18		SULINGAN	1371	625	117	629
19		MABUUN	4292	4337	373	-418
20		PEMBATAAN	3343	4410	577	-1644
21		MABURAI	1625	2037	545	-957
22		KASIAU	889	80	555	254
23		KAPAR	1619	382	33	1204
24		MASUKAU	592	116	0	476
25		KASIAU RAYA	270	61	35	174
26	TANTA	MURUNG BARU	305	103	177	25
27		LUK BAYUR	437	247	15	175
28		WALANGKIR	392	60	180	152
29		WARUKIN	849	239	587	23
30		BARIMBUN	547	230	340	-23
31		MANGKUSIP	650	442	23	185
32		PAMARANGAN KANAN	362	260	20	82
33		PULAU KU,U	460	217	189	54
34		TANTA	653	452	30	171
35		PADANG PANJANG	798	42	530	226
36		PUAIN KANAN	364	252	5	107
37		PADANGIN	411	181	58	172
38		TAMIYANG	260	0	215	45
39		TANTA HULU	1644	2902	410	-1668
40	KELUA	PULAU	842	429	41	372
41		AMPUKUNG	811	219	26	566
42		TELAGA ITAR	531	245	21	265
43		SUNGAI BULUH	652	216	24	412
44		BINTURU	776	81	362	333
45		PUDAK SETEGAL	783	357	36	390
46		PASAR PANAS	470	58	250	162
47		MASINTAN	834	218	26	590
48		TAKULAT	619	309	64	246
49		PALIAT	657	242	11	404
50		KARANGAN PUTIH	936	373	401	162
51		BAHUNGIN	741	231	154	356
52	MUARA HARUS	MADANG	258	0	80	178
53		TANTARINGIN	463	234	280	-51
54		MURUNG KARANGAN	558	187	200	171
55		PADANGIN	289	92	143	54
56		MANDUIN	282	198	120	-36
57		MANTUIL	329	54	87	188
58		HARUS	240	175	0	65
59	BANUA LAWAS	HAPALAH	358	100	0	258

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TARGET	REALISASI		
			TOTAL	TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
60		BANGKILING	524	209	19	296
61		SUNGAI DURIAN	359	243	66	50
62		PEMATANG	546	175	308	63
63		HARIANG	700	299	353	48
64		BANUA LAWAS	607	228	126	253
65		HABAU	594	281	222	91
66		BENUA RANTAU	602	318	95	189
67		PURAI	591	269	174	148
68		BATANG BANYU	205	98	85	22
69		HABAU HULU	466	156	182	128
70		BUNGIN	285	207	52	26
71		BANGKILING RAYA	338	0	5	333
72		TALAN	333	82	219	32
73		SUNGAI ANYAR	534	302	29	203
74	PUGAAN	PUGAAN	471	64	189	218
75		PAMPANAN	503	0	213	290
76		SEI RUKAM II	221	32	102	87
77		SEI RUKAM I	322	213	47	62
78		JIRAK	406	144	247	15
79		HALANGAN	330	210	60	60
80		TAMUNTI	336	82	171	83
81	MUARA UYA	KUPANG NUNDING	432	72	334	26
82		MANGKUPUM	821	186	556	79
83		PASAR BATU	465	155	229	81
84		UWIE	840	215	490	135
85		MUARA UYA	1156	467	434	255
86		LUMBANG	1182	100	847	235
87		SANTUUN	533	274	218	41
88		SIMPUNG LAYUNG	735	297	466	-28
89		BINJAI	371	134	104	133
90		PALAPI	542	241	430	-129
91		KAMPUNG BARU	431	155	350	-74
92		SALIKUNG	326	186	30	110
93		RIBANG	615	318	319	-22
94		SUNGAI KUMAP	101	86	0	15
95	HARUAI	MARINDI	953	668	769	-484
96		WIRANG	780	48	93	639
97		BONGKANG	844	258	193	393
98		NAWIN	776	525	400	-149
99		HALONG	614	418	203	-7
100		HAYUP	960	155	593	212
101		KEMBANGKUNING	674	235	231	208
102		SERADANG	604	0	138	466
103		MAHE PASAR	486	278	445	-237
104		LOK BATU	409	207	323	-121
105		SUPUT	691	322	268	101
106		SURIYAN	380	0	339	41

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TARGET	REALISASI		
			TOTAL	TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
107		CATUR KARYA	259	117	215	-73
108	BINTANG ARA	WALING	358	162	43	153
109		USIH	594	335	194	65
110		BINTANG ARA	655	267	430	-42
111		BURUM	317	189	0	128
112		PANAAN	458	82	83	293
113		DAMBUNG RAYA	258	66	45	147
114		ARGO MULYO	284	183	220	-119
115		BUMI MAKMUR	203	189	0	14
116		HEGAR MANAH	175	156	0	19
117	UPAU	BILAS	521	193	231	97
118		KAONG	386	180	0	206
119		PANGELAK	530	194	170	166
120		KINARUM	294	276	0	18
121		MASINGAI II	516	156	324	36
122		MASINGAI I	557	273	138	146
123	JARO	TERATAU	569	424	478	-333
124		NAMUN	540	73	1350	-883
125		JARO	1179	103	872	204
126		SOLAN	814	22	524	268
127		MUANG	554	0	488	66
128		LANO	339	109	194	36
129		PURUI	220	0	211	9
130		GARAGATA	662	177	434	51
131		NALUI	653	172	502	-21
TOTAL :			89677	47284	30697	11696

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong, 2025

Tabel 4.13 Capaian Layanan Air Limbah Domestik

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TARGET	REALISASI							
			TOTAL	AKSES DASAR / AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TANJUNG	JANGKUNG	1607	1585	19	0	0	0	1380	19	0
2		TANJUNG	1829	1801	25	0	30	0	1471	25	0
3		AGUNG	941	925	11	0	0	0	881	11	0
4		HIKUN	1281	1278	3	0	0	0	769	3	0
5		BANYU TAJUN	569	569	0	0	0	0	555	0	0
6		PAMARANGAN KIWA	691	687	4	0	0	0	645	4	0
7		PUAIN KIWA	365	339	1	25	0	0	337	1	25
8		JUAI	451	426	0	25	0	0	451	0	25
9		MAHE SEBERANG	226	224	2	0	0	0	302	2	0
10		KAMBITIN	827	824	2	0	0	0	532	2	0
11		WAYAU	1293	1284	9	0	0	0	674	9	0
12		GARUNGGUNG	538	537	1	0	0	0	430	1	0
13		KITANG	504	503	1	0	0	0	572	1	0
14		SUNGAI PIMPING	641	641	0	0	0	0	633	0	0
15		KAMBITIN RAYA	920	920	0	0	0	0	664	0	0
16	MURUNG PUDAK	BELIMBING RAYA	3832	3697	111	0	0	0	4073	111	0
17		BELIMBING	1711	1611	44	50	0	0	1601	44	50
18		SULINGAN	1371	1198	5	166	0	96	972	5	166
19		MABUUN	4292	4031	178	50	0	226	2433	178	50
20		PEMBATAAN	3343	3140	82	102	0	188	2629	82	102

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TARGET	REALISASI							
			TOTAL	AKSES DASAR / AKSES LAYAK PERDESAAN	**AKSES AMAN SPALD-S**	**AKSES AMAN SPALD-T**	**TANPA AKSES**	**AKSES DASAR**	**AKSES LAYAK**	**AKSES AMAN SPALD-S**	**AKSES AMAN SPALD-T**
1	2	3	4	5	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
21		MABURAI	1625	1544	65	0	0	68	811	65	0
22		KASIAU	889	846	2	40	0	73	787	2	40
23		KAPAR	1619	1612	5	0	0	0	1362	5	0
24		MASUKAU	592	592	0	0	0	0	575	0	0
25		KASIAU RAYA	270	270	0	0	0	0	248	0	0
26	TANTA	MURUNG BARU	305	305	0	0	0	0	548	0	0
27		LUK BAYUR	437	429	8	0	0	0	692	8	0
28		WALANGKIR	392	392	0	0	0	0	227	0	0
29		WARUKIN	849	821	3	25	0	0	888	3	25
30		BARIMBUN	547	546	0	0	0	0	571	0	0
31		MANGKUSIP	650	650	0	0	0	0	846	0	0
32		PAMARANGAN KANAN	362	360	2	0	0	0	634	2	0
33		PULAU KU,U	460	460	0	0	0	0	466	0	0
34		TANTA	653	628	25	0	0	0	715	25	0
35		PADANG PANJANG	798	796	1	0	0	0	814	1	0
36		PUAIN KANAN	364	329	10	25	0	0	596	10	25
37		PADANGIN	411	410	0	0	0	0	1335	0	0
38		TAMIYANG	260	259	1	0	0	0	337	1	0
39		TANTA HULU	1644	1588	47	0	0	0	1568	47	0
40	KELUA	PULAU	842	842	0	0	0	0	958	0	0
41		AMPUKUNG	811	811	0	0	0	0	834	0	0
42		TELAGA ITAR	531	530	1	0	0	0	598	1	0
43		SUNGAI BULUH	652	652	0	0	0	0	741	0	0
44		BINTURU	776	736	0	40	0	0	472	0	40
45		PUDAK SETEGAL	783	783	0	0	0	0	881	0	0
46		PASAR PANAS	470	470	0	0	0	0	497	0	0
47		MASINTAN	834	834	0	0	0	0	816	0	0
48		TAKULAT	619	616	3	0	0	0	693	3	0
49		PALIAT	657	655	2	0	0	0	627	2	0
50		KARANGAN PUTIH	936	935	1	0	0	0	821	1	0
51		BAHUNGIN	741	741	0	0	0	0	698	0	0
52	MUARA HARUS	MADANG	258	258	0	0	0	0	223	0	0
53		TANTARINGIN	463	463	0	0	0	0	398	0	0
54		MURUNG KARANGAN	558	556	1	0	0	0	571	1	0
55		PADANGIN	289	287	0	0	0	0	284	0	0
56		MANDUIN	282	281	1	0	0	0	252	1	0
57		MANTUIL	329	327	2	0	0	0	225	2	0
58		HARUS	240	240	0	0	0	0	250	0	0
59	BANUA LAWAS	HAPALAH	358	358	0	0	0	368	0	0	0
60		BANGKILING	524	524	0	0	0	414	80	0	0
61		SUNGAI DURIAN	359	359	0	0	0	303	27	0	0
62		PEMATANG	546	546	0	0	0	501	4	0	0
63		HARIANG	700	700	0	0	0	614	3	0	0
64		BANUA LAWAS	607	607	0	0	0	531	26	0	0
65		HABAU	594	594	0	0	0	698	58	0	0
66		BENUA RANTAU	602	602	0	0	0	533	27	0	0
67		PURAI	591	590	1	0	0	462	61	1	0
68		BATANG BANYU	205	205	0	0	0	113	81	0	0
69		HABAU HULU	466	466	0	0	0	431	0	0	0
70		BUNGIN	285	285	0	0	0	255	2	0	0
71		BANGKILING RAYA	338	338	0	0	0	231	80	0	0
72		TALAN	333	333	0	0	0	275	0	0	0
73		SUNGAI ANYAR	534	534	0	0	0	523	6	0	0
74	PUGAAN	PUGAAN	471	469	2	0	0	0	404	2	0
75		PAMPANAN	503	503	0	0	0	0	74	0	0
76		SEI RUKAM II	221	221	0	0	0	0	251	0	0
77		SEI RUKAM I	322	322	0	0	0	0	300	0	0
78		JIRAK	406	406	0	0	0	0	305	0	0
79		HALANGAN	330	330	0	0	0	0	323	0	0
80		TAMUNTI	336	336	0	0	0	0	304	0	0
81	MUARA UYA	KUPANG NUNDING	432	432	0	0	0	0	423	0	0
82		MANGKUPUM	821	821	0	0	0	0	51	0	0
83		PASAR BATU	465	465	0	0	0	0	369	0	0
84		UWIE	840	840	0	0	0	0	735	0	0
85		MUARA UYA	1156	1153	3	0	0	0	904	3	0
86		LUMBANG	1182	1182	0	0	0	0	1035	0	0
87		SANTUUN	533	532	1	0	0	0	469	1	0

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TARGET	REALISASI							
			TOTAL	AKSES DASAR / AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88		SIMPUNG LAYUNG	735	735	0	0	0	0	0	0	0
89		BINJAI	371	371	0	0	0	0	360	0	0
90		PALAPI	542	542	0	0	0	0	485	0	0
91		KAMPUNG BARU	431	430	1	0	0	0	343	1	0
92		SALIKUNG	326	326	0	0	0	0	295	0	0
93		RIBANG	615	615	0	0	0	0	521	0	0
94		SUNGAI KUMAP	101	101	0	0	0	0	85	0	0
95	HARUAI	MARINDI	953	953	0	0	0	0	888	0	0
96		WIRANG	780	777	3	0	0	0	968	3	0
97		BONGKANG	844	843	1	0	0	0	863	1	0
98		NAWIN	776	776	0	0	0	0	826	0	0
99		HALONG	614	613	0	0	0	0	768	0	0
100		HAYUP	960	959	1	0	0	0	827	1	0
101		KEMBANGKUNING	674	674	0	0	0	0	472	0	0
102		SERADANG	604	603	1	0	0	0	451	1	0
103		MAHE PASAR	486	485	1	0	0	0	637	1	0
104		LOK BATU	409	409	0	0	0	0	388	0	0
105		SUPUT	691	691	0	0	0	0	587	0	0
106		SURIYAN	380	330	0	50	0	0	529	0	50
107		CATUR KARYA	259	259	0	0	0	0	364	0	0
108	BINTANG ARA	WALING	358	357	0	0	0	0	357	0	0
109		USIH	594	593	0	0	0	0	434	0	0
110		BINTANG ARA	655	655	0	0	0	0	502	0	0
111		BURUM	317	316	0	0	0	0	246	0	0
112		PANAAN	458	458	0	0	0	0	371	0	0
113		DAMBUNG RAYA	258	258	0	0	0	0	206	0	0
114		ARGO MULYO	284	284	0	0	0	0	259	0	0
115		BUMI MAKMUR	203	203	0	0	0	0	199	0	0
116		HEGAR MANAH	175	175	0	0	0	0	154	0	0
117	UPAU	BILAS	521	518	3	0	0	0	466	3	0
118		KAONG	386	386	0	0	0	0	225	0	0
119		PANGELAK	530	530	0	0	0	0	447	0	0
120		KINARUM	294	294	0	0	0	0	290	0	0
121		MASINGAI II	516	516	0	0	0	0	527	0	0
122		MASINGAI I	557	555	2	0	0	0	571	2	0
123	JARO	TERATAU	569	569	0	0	0	0	600	0	0
124		NAMUN	540	540	0	0	0	0	1216	0	0
125		JARO	1179	1179	0	0	0	0	1335	0	0
126		SOLAN	814	814	0	0	0	0	782	0	0
127		MUANG	554	554	0	0	0	0	544	0	0
128		LANO	339	289	0	50	0	0	331	0	50
129		PURUI	220	220	0	0	0	0	214	0	0
130		GARAGATA	662	662	0	0	0	0	646	0	0
131		NALUI	653	653	0	0	0	0	640	0	0
TOTAL :	89677		88197	832	648	**648**	**30**	**6778**	**75359**	**698**	**648**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong, 2025

Tabel 4.14 Rekapitulasi Layanan Air Minum dan Layanan Air Limbah Domestik

No	Jenis Pelayanan Dasar	Total Rumah di Kabupaten/Kota	Realisasi		
			Sudah Terlayani	Belum Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	89,677	47,284	30,697	86,96%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	89,677	84,947	4,730	94,73%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong, 2025

Analisis Hasil Capaian:

1. Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – hari

Indikator : Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Target SPM untuk pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yaitu 100%, dimana direalisasikan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota baik menggunakan dana APBD maupun dana DAK Fisik Bidang Air Minum.

Target SPM 2025 adalah 100%, yang berarti melayani seluruh rumah tangga di Kabupaten-Kota, dimana jumlah rumah tangga menurut data Disdukcapil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yaitu sebanyak 89677 KK.

Sedangkan Hasil Capaian air minum sampai dengan 2025 yaitu : 84947 SR, yang berarti melayani 84947 KK.

Sehingga Hasil Capaian dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\%\ \text{Hasil Capaian} = \frac{\Sigma\ \text{Rumah tangga terlayani}}{\Sigma\ \text{Rumah tangga di Kabupaten Tabalong}}\ \text{x } 100\ \%$$

$$\%\ \text{Hasil Capaian} = \frac{84947\ \text{KK}}{89677\ \text{KK}}\ \text{x } 100\ \%$$

$$\%\ \text{Hasil Capaian} = 86{,}96\%$$

Artinya :

1. Secara kumulatif pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sampai dengan Tahun 2025 adalah 86,96% dimana melayani 84947 KK dari jumlah rumah tangga di Kabupaten sebanyak 89677 KK, hal ini dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tabalong sehingga persentase capaian belum mencapai 100%. Namun untuk tahun 2024 sendiri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum memiliki target tahunan 300 SR terpasang dan telah terealisasi sebanyak 1954 SR yang berarti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Tabalong telah melebihi target tahun 2025 tersebut. Untuk tahun-tahun ke depan kinerja pelayanan kebutuhan pokok air minum akan terus ditingkatkan agar target 100% akses air minum tercapai.

2. Pelayanan Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik

Indikator : Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik

Target SPM untuk pelayanan Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik yaitu 100%, dimana direalisasikan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Daerah Kabupaten/Kota baik menggunakan dana APBD maupun DAK bidang sanitasi.

Target SPM 2025 adalah 100%, yang berarti melayani seluruh rumah tangga di Kabupaten-Kota, dimana jumlah jumlah rumah tangga data Disdukcapil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yaitu sebanyak 89677 KK.

Sedangkan Hasil Capaian pengolahan air limbah domestik sampai

dengan 2025 yaitu : 84947 SR, yang berarti melayani 84947 KK.

Sehingga Hasil Capaian dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\%\ \text{Hasil Capaian pengolahan air limbah domestik pada Kabupaten Tabalong adalah} = \frac{\Sigma\ \text{rumah yang sudah terlayani akses air limbah (terlayani akses dasar atau akses layak perdesaan + terlayani akses aman SPALD} - \text{S} + \text{terlayani akses aman SPALD} - \text{T)}}{\Sigma\ \text{rumah di Kabupaten Tabalong}} \text{x} 100\ \%$$

$$\%\ \text{Hasil Capaian} = \frac{84367 + 832 + 648}{89677}\ \text{x}\ 100\ \%$$

$$= \frac{84947}{89677}\ \text{x}\ 100\ \%$$

$$= 94{,}73\ \%$$

Artinya :

Secara kumulatif pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal pelayanan penyediaan pengolahan air limbah domestik sampai dengan Tahun 2025 adalah 94,73% dimana melayani 84947 KK dari jumlah rumah tangga di Kabupaten sebanyak 89677 KK, hal ini dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tabalong sehingga persentase capaian belum mencapai 100%. Untuk tahun 2025 sendiri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kegiatan Penyelenggaraan Insfrastruktur pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota memiliki target tahunan 54 unit tangki septik terpasang dimana mampu melayani 54 KK secara individual dan telah terealisasi sebanyak 43 unit tangki septik individual dimana melayani 43 KK. Hal ini karena ada kenaikan harga material pada saat proses konstruksi sehingga dana tidak mampu mengakomodir keseluruhan target. Untuk tahun-tahun ke depan kinerja pelayanan penyediaan pengolahan air limbah domestik akan terus ditingkatkan agar target 100% akses sanitasi tercapai.

Adapun capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong berdasarkan Permen PU Nomor 29 Tahun 2018 tentang standar teknis SPM PUPR yaitu :

1. Data penerima pelayanan dasar :
    a. Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S sebanyak 83467 SR / melayani 83467 KK.
    b. Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T adalah 648 SR / melayani 648 KK.
    c. Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T yaitu sebanyak 84947 SR.
    d. Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja adalah sebanyak 832 SR / melayani 832 KK.
    e. Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja adalah adalah sebanyak 832 SR / melayani 832 KK.
    f. Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik adalah sebanyak 832 SR / melayani 832 KK, dimana 832 SR atau rumah yang lumpur tinjanya diolah di IPLT dan

ditambah dengan 648 SR merupakan rumah yang menggunakan SPALD-T melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.

2. Data Kinerja Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik

a. Untuk Kinerja pelayanan SPALD-S akses dasar

$$= \frac{\Sigma \text{ rumah yg memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik}}{\Sigma \text{ rumah di Wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25 \text{ jiwa/Ha}} x100\ \%$$

$$= \frac{75106}{80673} \text{ x } 100\ \% = 93{,}34\%$$

Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik sebanyak 75106 rumah dari 80673 rumah tangga di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/Ha, sehingga kinerja pelayanan SPALD-S akses dasar yaitu 93,34%. Kepadatan penduduk < 25 jiwa/ha ini ada disemua desa/kelurahan kecuali Kelurahan Tanjung, Kelurahan Belimbing Raya dan Kelurahan Pembataan yang memiliki kepadatan penduduk melebihi 25 jiwa/Ha

b. Untuk Kinerja pelayanan SPALD-S akses aman

$$= \frac{\Sigma \text{ rumah yg lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\Sigma \text{ rumah di Wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/Ha}} x100\ \%$$

$$= \frac{832}{9004} \text{ x } 100\ \% = 9{,}24\%$$

Data jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT adalah 832 SR, serta jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/Ha sebanyak 9004 KK yaitu di Kelurahan Tanjung, Kelurahan Belimbing Raya dan Kelurahan Pembataan, sehingga kinerja pelayanan SPALD-S akses aman yaitu 9,24 %.

c. Untuk Kinerja pelayanan SPALD-T akses aman

$$= \frac{\Sigma \text{ rumah yg memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\Sigma \text{ rumah di Wilayah pengembangan SPALD} - \text{T (jumlah seluruh rumah di Kabupaten/Kota)}} x100\ \%$$

$$= \frac{648}{21049} \text{ x } 100\ \% = 3{,}08\ \%$$

Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD sebanyak 648 rumah dengan jumlah rumah diwilayah pengembangan SPALD-T sebanyak 21049 rumah sehingga kinerja pelayanan SPALD-T akses aman sebesar 3,08%.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki alokasi anggaran guna melaksanakan dan mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tabalong, antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.15 Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 2. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	 Rp 21.380.515.464,- Rp. 28.667.314.000,-
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program: Pengembangan Permukiman Kegiatan : Penyelenggaraan Insfrastruktur pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 4. Sub Kegiatan Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 5. Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	 Rp 923.329.000,- Rp 134.890.000,- Rp. 87.833.000,- Rp.4.091.199.400,- Rp. 1.084.126.000,-
	TOTAL			**47.494.897.469**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong, 2025

4.3.5 Dukungan Personil

Dalam melakukan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), semua Aparatur Sipil Negara (SPM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ikut mendukung, terutama dalam hal ini khususnya adalah ASN yang ada pada bidang Cipta Karya. Bidang Cipta Karya terdiri dari 10 (sebelas) orang yang terbagi :

1. Kepala Bidang Cipta Karya (1 orang)

2. Jabatan Fungsional (1 orang)
3. Staf PNS Bidang Cipta Karya (6 orang)
4. Staf PPPK Bidang Cipta Karya (1 orang)
5. Staf PPPK Paruh Waktu Bidang Cipta Karya (1 orang)

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

   a. Permasalahan Air Bersih:
   Jaringan perpipaan air bersih belum mencakup seluruh wilayah.
   b. Permasalahan Sanitasi:
   - Masyarakat belum familiar dengan sistem jaringan perpipaan air kotor / SPALD sehingga dianggap hal yang menjijikan / kotor.
   - Lahan untuk penempatan SPALD agak sulit karena berada dilokasi masyarakat.

2. Solusi

   a. Solusi Permasalahan Air Bersih:
   Diperlukan penganggaran atau pendanaan untuk memperluas jaringan perpipaan air bersih hingga ke desa-desa.
   b. Solusi Permasalahan Sanitasi:
   - Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem pengelolaan air limbah (SPAL).
   - Menyediakan anggaran atau pendanaan untuk pengadaan lahan SPAL.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

Tabel 4.16 Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	2	3
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong, 2025

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.17 Batas Waktu Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan	Nilai Capaian Tahun 2024	Tahun
1	2	3	4
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong, 2025

4.4.3 Realisasi

Tabel 4.18 Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
1	2	3	4
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	8 Unit	8 Unit
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	2 Unit	2 Unit

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong, 2025

Adapun capaian SPM Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yang telah direalisasikan pada tahun 2025 sebanyak 8 (delapan) unit rumah, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2025 ada sebanyak 8 (delapan) unit rumah, oleh karena itu kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni berbagi korban bencana berjalan dengan sesuai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten dilaksanakan sebanyak 2 (dua) unit. Dimana pada kegiatan RTLH terbangun dengan target 2 (dua) unit pada Tahun 2025. Kegiatan RTLH terbangun dan tertangani sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 100%. Oleh karena itu total fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten dilaksanakan 2 (dua) unit.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

Tabel 4.19 Alokasi Anggaran Kegiatan Terkait SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Program Pengembangan Perumahan	1.110.365.000
2	Program Kawasan Permukiman	19.960.211.225
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.618.900.000

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong, 2025

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

1. PNS;
2. PPPK

Tabel 4.20 Jumlah Pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kepangkatan Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah
1	2	3	4
1	Pembina Tk.I	(IV/b)	1 Orang
2	Pembina	(IV/a)	4 Orang
3	Penata Tk. I	(III/d)	6 Orang
	TOTAL		**11 Orang**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong, 2025

Tabel 4.21 Jumlah Pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	Strata 2 (S2)	5 Orang
2	Strata 1 (S1)	28 Orang
	TOTAL	**33 Orang**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong, 2025

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan hambatan yang dihadapi dalam penerapan serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik yang bersifat eksternal maupun internal, serta langkah-langkah penyelesaiannya. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang dialami dalam penerapan SPM

a) Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada daerah memiliki SPM yang dikeluarkan oleh kementerian.
b) Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM.
c) Indikator SPM masih banyak yang belum diinternalisasikan sebagai target kinerja (output/outcome) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
d) Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.
e) Belum sinerginya upaya implementasi SPM.

f) Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM.
g) Belum tersedianya data base yang akurat di setiap urusan.
h) Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahunnya.

Solusi untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan peningkatan koordinasi dengan kementerian teknis terkait penyediaan regulasi SPM, serta penguatan pemahaman aparatur melalui sosialisasi dan bimbingan teknis. Indikator SPM perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagai target kinerja yang jelas, didukung oleh peningkatan kualitas perencanaan dan pemrograman agar lebih efektif dan terarah. Pelaksanaan SPM juga harus dilakukan secara sinergis lintas perangkat daerah dengan dukungan pedoman operasional yang jelas. Selain itu, penyediaan basis data yang akurat dan terintegrasi serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin menjadi langkah penting untuk mengukur capaian SPM dan mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

   a. Pelayanan Kententeraman dan Ketertiban Umum
   b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

   Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar terdiri dari :

   a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

      Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain sebagai berikut: Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

      Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas. Khusus untuk penanganan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza.

Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tabel 4.22 Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025 – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target SPM 2025
1	2	3	4
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong, 2025

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 4.23 Target Pelayanan Informasi Rawan Bencana

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	3000 Org	3172 Org	100 %
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	7 Keg	7 Keg	100 %
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat Bencana.	2 Keg	2 Keg	100 %

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong, 2025

Tabel 4.24 Program dan Kegiatan tahun 2025

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan Tempat	3000 Org	3172 Org	100 %

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	2	3	4	5	6
		Tinggalnya			
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	7 Keg	7 Keg	100 %
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat Bencana.	2 Keg	2 Keg	100 %

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong, 2025

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Ket.
1	2	3	4	5
A.	**Program Penanggulangan Bencana**	**8.056.168.381,-**	**5.824.653.086,-**	
1	**Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota**	**302.664.920,-**	**283.891.591,-**	
-	Sub Keg Sosialisasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	302.664.920,-	283.891.591,-	
2	**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**6.008.922.709,-**	**4.078.705.497,-**	
	Sub Keg Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2.323.740.000	514.620.000	
	Sub Keg Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	3.097.278.349	3.038.851.501	
	Sub Keg Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	76.322.350	60.027.750	
	Sub Keg Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	83.225.650	74.850.899	

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Ket.
1	2	3	4	5
	Sub Keg Penyusunan Rencana Kontigensi	200.000.000	200.000.000	
	Sub Keg Gladi Kesiapsiagaan Bencana	68.186.960	65.854.788	
	Sub Keg Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	139.224.500	124.500.559	
	Sub Keg Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20.944.900	0	
3	**Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.376055.364**	**1.143.907.201**	
	Sub Keg Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	996.223.964	829.081.041	
	Sub Keg Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	80.000.000	79.400.000	
	Sub Keg Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana Kab/Kota	260.327.900	235.426.160	
	Sub Keg Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	39.503.500	0	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong, 2025

4.5.3 Realisasi

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tabel 4.25 Capaian SPM 2025 – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target SPM 2025	Realisasi SPM 2025
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketenteraman dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target SPM 2025	Realisasi SPM 2025
1	2	3	4	5
	Ketertiban Umum	layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota		
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong, 2025

Adapun Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umun

Berdasarkan kegiatan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong pada tahun 2025, tidak terdapat warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada.

b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*respone time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis tentang kegiatan pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran.

Dalam penyelamatan dan pelayanan evakuasi korban kebakaran paling sedikit memuat:

1) Layanan respon cepat (*Respone Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
2) Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
3) Layanan pelaksanaan dan penyelamatan evakuasi;
4) Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran;
5) Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Tingkat waktu tanggap (*response time*) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran atau operasi penyelamatan (non kebakaran). Adapun waktu tanggap (*response time*) adalah rentang waktu terhitung sejak diterimanya informasi / laporan sampai tiba di

lokasi dan siap memberikan layanan yaitu 15 (lima belas) menit.

Teknis penghitungan pencapaian SPM sub urusan kebakaran dilihat dari dua indikator, yaitu indikator utama layanan SPM dan indikator penunjang layanan capaian SPM.

a. Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran

1) Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Rumus:
Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten Tabalong pada tahun 2025 dalam tingkat waktu tanggap (*Respon Time*) oleh Bidang Pemadam Kebakaran x100%
Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada tahun 2025
= $\frac{45}{45}$x 100% =100%

b. Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM

1) Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rumus:
Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Bidang Pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten/Kota tahun 2025. Selama Tahun 2025 terdapat layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap keadaan yang membahayakan kondisi manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 102 (Seratus Dua) kali, terdiri dari evakuasi Ular 77 (Tujuh Puluh Tujuh) kali, Evakuasi Tawon 9 (Sembilan) kali, Evakuasi Cincin 3 (Tiga) kali, Evakuasi Kucing 6 (Enam) kali, dan lainnya 7 (Tujuh) kali.

Jadi, Pencapaian SPM Sub urusan kebakaran adalah sebagai berikut :

a) Capaian SPM Layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran di kabupaten tabalong adalah 100% (seratus) persen;
b) Layanan penunjang berupa penyelamatan dan evakuasi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 102 kali, terdiri dari :
   - Penanganan evakuasi Ular disekitar pemungkiman warga 77 (Tujuh Puluh Tujuh) kali
   - Penanganan evakuasi Tawon 9 (Sembilan) kali
   - Penanganan evakuasi Cincin 3 (Tiga) kali
   - Penanganan evakuasi Kucing 6 (Enam) kali
   - Dan lainnya 7 (Tujuh) kali

Dari data tersebut diketahui bahwa target pencapaian SPM Sub urusan kebakaran sudah mencapai 100%

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Analisa capaian realisasi SPM bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sub Urusan Bencana pada tahun 2025 dapat diuraikan dengan lebih ringkas sebagai berikut :

1) Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang dimiliki.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong memiliki 1 Layanan Data satu pintu yang bernama Pudalops (Pusat Pengendalian Operasi), yang mana fungsi utama layanan, yaitu :

- Penerimaan dan pengelolaan informasi
- Peringatan dini (Early Wearning System)
- Koordinasi dan komunikasi
- Fasilitasi pengerahan sumber daya
- Dukungan Operasi
- Edukasi dan mitigasi

2) Dalam rangka Kesiapsiagaan Penanganan Bencana pada Tahun Anggaran 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong telah menyiapkan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana sebagai berikut :

a. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.

Jumlah Personil untuk TRC PB sebanyak 19 (sembilan belas) orang.

b. Kendaraan Rescue.

Kendaraan Rescue yang dimiliki untuk Operasioanal Penanganan Bencana sebanyak 4 (lima) unit Kendaraan Rescue, Mobil Tanki Sebanyak 6(Enam) Unit, Sepeda Motor Trail Sebanyak 13 (Tiga Belas) Unit.

c. Alat Evakuasi.

Alat Evakuasi yang dimiliki untuk Operasional Penanganan Bencana ada 5 (Lima) unit perahu yaitu 1 (satu) unit Perahu Karet, 4 (empat) unit perahu Polyethelene, dan tenda sebanyak 10 (sepuluh) buah.

d. Sistem Komunikasi.

Sistem Komunikasi yang dimiliki untuk Operasioanal Penanganan Bencana ada 18 (delapan belas) unit HT.

e. Mitra Kerja dengan Dinsos dan Para Relawan.

f. Gudang.

Gudang yang dimiliki untuk penyimpanan persediaan permakanan dan persediaan sandang dalam rangka ketersediaan buffer stock saat bencana ada 1 (satu) Unit dan Gudang untuk penyimpanan peralatan kesiapsiagaan sebanyak 1 (satu) unit.

4.5.4 Alokasi Anggaran

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tabel 4.26 Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025

No	Jenis Dasar	Indikator	APBD 2025 (Rp)	APBN (RP)	Sumber Dana Lain yg Sah
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	0	-	-
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	8.863.051.335	-	-

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong, 2025

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung setelah perubahan terakhir yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

4.5.5 Dukungan Personil

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tabel 4.27 Dukungan Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Jenis Dasar	Indikator	Dukungan Personil		
			PNS	PPPK	NON PNS
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Personil Satpol PP 13 orang PNS	-	-
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	Terdiri dari Kabid Damkar 1 orang Kasi 2 orang	Terdiri dari Analis Kebakaran 1 Orang	-

No	Jenis Dasar	Indikator	Dukungan Personil		
			PNS	PPPK	NON PNS
1	2	3	4	5	6
		penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Penata Layanan Operasional 2 Orang Operator Layanan Operasional (Petugas Damkar) 24 Orang	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong, 2025

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 4.28 Dukungan Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025

PNS	PPPK	Non-ASN
1	2	3
17 orang	11 orang	32 orang

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong, 2025

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tabel 4.29 Permasalahan dan Solusi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Jenis Dasar	Indikator	Hambatan	Solusi
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Masih adanya Peraturan Daerah yang masih kurang dipahami/dilanggar	Lebih sering memberikan sosialisasi terhadap perda tersebut
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Minimnya jumlah sarana dan kualitas sarana operasional damkar dan terkendalanya pelayanan kejadian kebakaran untuk jarak yang jauh sehingga banyak yang tidak dapat tertangani sesuai dengan waktu tanggap respon Terbatasnya jumlah personel damkar dan kurangnya kualitas standar personel	Perlunya penambahan unit sarana damkar dan penambahan wilayah manajemen kebakaran untuk pelayanan bencana serta perlunya penambahan personel dan dilakukanya pelatihan/diklat untuk standar kualitas personel tentang penanggulangan bencana

No	Jenis Dasar	Indikator	Hambatan	Solusi
1	2	3	4	5
			damkar	kebakaran

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong, 2025

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Permasalahan

Penerapan SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah terpenuhi untuk melayani subjek sasaran SPM, hanya saja perlu lebih ditingkatkan lagi baik dari segi pemberian pelayanan, pendampingan dan anggaran.

b. Solusi

Perlunya komitmen seluruh personil di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong untuk lebih meningkatkan penerapan SPM sesuai dengan ketentuan.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah Pusat adalah :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target dan Pencapaian SPM Bidang Sosial untuk pemenuhan pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.30 Pemenuhan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Tabalong

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Program Rehabilitasi Sosial				
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti.	58 orang	58 orang	100 %
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia	695 orang	695 orang	100 %

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	2	3	4	5	6
		Terlantar di luar panti.			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis diluar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di luar panti.	124 orang	124 orang	100 %
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	Kegiatan Penjangkauan Anak anak terlantar dalam dan luar panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar dalam dan luar panti.	493 anak	493 anak	100 %
3	Program Penanganan Bencana				
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/kota.	- Penerima bantuan santunan bencana sebanyak 1.225 Keluarga. - penerima bantuan permakanan dan sandang korban bencana sebanyak 1.352 keluarga. - penyediaan permakanan untuk korban banjir sebanyak 1.098 Keluarga di daerah wilayah Tengah dan Utara	- Penerima bantuan santunan bencana sebanyak 1.225 Keluarga. - penerima bantuan permakanan dan sandang korban bencana sebanyak 48 keluarga. - penyediaan permakanan untuk korban banjir sebanyak 1.098 Keluarga di daerah wilayah Tengah dan Utara	100 %

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tabalong, 2025

4.6.3 Realisasi

Analisa capaian realisasi SPM bidang Sosial pada tahun 2025 dapat diuraikan dengan lebih ringkas sebagai berikut :

1. Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang dimiliki.

   Dinas Sosial Kabupaten Tabalong memiliki 1 Layanan Data satu pintu yang bernama BAHTERA SOSIAL (Bantuan Kesejahteraan Sosial), yang mana didalamnya berisi 3 Layanan, yaitu :

   - Data Kemiskinan. Data ini berfungsi sebagai data dasar pelaksanakan penerapan SPM.
   - Layanan Pengaduan Online melalui https://bahtera.tabalongkab.go.id
   - Layanan Pengaduan Offline melalui :
     1) Fasilitator Desa atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersebar di 12 Kecamatan dan Desa di Wilayah Kab. Tabalong.

2) Unit SLRT SERASI yang bertempat di Kantor Dinas Sosial Kab. Tabalong atau di Mall Pelayanan Publik Kab. Tabalong.

2. Dalam rangka Kesiapsiagaan Penanganan Bencana pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Kabupaten Tabalong telah menyiapkan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Bantuan Sosial lainnya antara lain sebagai berikut :
   a. TAGANA, Sahabat TAGANA DAN Tim Reaksi Cepat.
      Jumlah Personil untuk TAGANA (Taruna Siaga Bencana) sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
   b. Kampung Siaga Bencana.
      Kampung Siaga Bencana yang sudah terbentuk ada pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu di Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Haruai dan Kecamatan Banua Lawas.
   c. Kendaraan Siaga Bencana.
      Kendaraan Siaga Bencana yang dimiliki untuk Operasioanal Penanganan Bencana sebanyak 5 (lima) unit yaitu 1 (satu) unit RTU, 4 (empat) unit Sepeda trail, 1 (satu) unit Truck Barang, 1 (satu) unit Truck Dapur Umum dan 1 (satu) unit VIAR.
   d. Alat Evakuasi.
      Alat Evakuasi yang dimiliki untuk Operasional Penanganan Bencana ada 4 (empat) unit perahu yaitu 1 (satu) unit Perahu Karet, 1 (satu) unit perahu fiber, 1 (satu) unit perahu floating dan 1 (satu) unit perahu dolphin dan tenda sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah.
   e. Sistem Komunikasi.
      Sistem Komunikasi yang dimiliki untuk Operasioanal Penanganan Bencana ada 10 (sepuluh) unit HT, 1 (satu) unit radio reg.
   f. Mitra Kerja dengan BPBD dan DAMKAR.
   g. Gudang.
      Gudang yang dimiliki untuk penyimpanan persediaan permakanan dan persediaan sandang dalam rangka ketersediaan buffer stock saat bencana ada 1 (satu) buah.
   h. Bantuan untuk Santunan Bencana.
      Penerima bantuan santunan bencana sebanyak 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) keluarga. Penerima bantuan makanan dan sandang korban bencana sebanyak 1.352 (seribu tiga ratus lima puluh dua) keluarga. Penyediaan Permakanan untuk korban banjir sebanyak 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) keluarga didaerah wilayah Tengah dan Utara.

3. Penerapan SPM untuk pelayanan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng dapat dijelaskan sebagai berikut :
   a. Penyandang Disabilitas Terlantar
      Penyandang Disabilitas Terlantar di Kabupaten Tabalong yang mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp. 300.000,- per orang per bulan sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang. Bantuan tunai tersebut digunakan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan permakanan, sandang dan perbekalan kesehatan nya.
   b. Lanjut Usia Terlantar.
      Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Tabalong yang mendapatkan

bantuan tunai sebesar Rp. 250.000,- per orang per bulan sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) orang. Bantuan tunai tersebut digunakan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan permakanan, sandang dan perbekalan kesehatan nya.

c. Gelandangan dan Pengemis
Gelandangan dan Pengemis yang ditangani oleh Dinas Sosial mendapatkan layanan bantuan permakanan, sandang, cek kesehatan dan transportasi untuk kembali ke tempat asalnya sebanyak 124 (serratus dua puluh empat) orang. Gelandangan dan Pengemis tersebut sebagian adalah warga Kab. Tabalong dan bukan warga Kab. Tabalong.

4. Rumah Singgah yang tersedia berada di Jl. Tanjung Selatan RT. 07. Kamar yang tersedia sebanyak 12 (dua belas) kamar, Ruang Tamu sebanyak 1 (satu) buah dan Dapur sebanyak 1 (satu) buah. Petugas Kesehatan yang disediakan 1 (satu) orang.
5. Alat bantu yang tersedia di rumah singgah berupa Kursi Roda sebanyak 1 (satu) buah, Tongkat Walker sebanyak 1 (satu) buah dan Alat Bantu Dengar sebanyak 1 (satu) buah.
6. Penerima Bantuan yang memanfaatkan alat bantu sebanyak 1 (satu) orang.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.31 Anggaran dan Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**5.584.500.000**	**5.398.350.000**
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak terlantar	5.584.500.000	5.398.350.000
	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar	5.584.500.000	5.398.350.000
2	**Program Penanganan Bencana**	**194.004.400**	**169.748.551**
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	194.004.400	169.748.551
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	122.925.740	106.253.620
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	71.078.660	63.494.931
3	**Program Rehabilitasi Sosial**	**3.482.485.436**	**3.013.089.549**
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar, Penyandang Disabilitar Terlantar, Anak Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	3.482.485.436	3.013.089.549
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	600.000.000	522.926.251
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	106.700.436	66.897.207
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.775.785.000	2.423.266.091

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tabalong, 2025

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM khusus bidang sosial dengan status ASN sebanyak 18 (delapan belas) orang PNS, 16 (enam belas) orang PPPPK, 56 (lima puluh enam) orang PPPK PW dan Non ASN sebanyak 6 (enam) orang. Personil yang diperlukan terlibat dalam pencapaian SPM ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.32 Data Personil pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong

No	Bidang	Jumlah Personil
1	2	3
1.	**Sekretariat**	**19 orang**
	ASN PNS	7 orang
	PPPK	4 orang
	PPPK PW	1 orang
	NON ASN	7 orang
2.	**Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**9 orang**
	ASN PNS	5 orang
	PPPK	3 orang
	PPPK PW	1 orang
3.	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**6 orang**
	ASN PNS	3 orang
	PPPK	3 orang
4.	**Bidang Pemberdayaan Sosial**	**57 orang**
	ASN PNS	1 orang
	PPPK	6 orang
	PPPK PW	50 orang
5	**Tenaga Kesejahteraan Sosial :**	**205 orang**
	TKSK	12 orang
	Fasilitator	131 orang
	SLRT	
	Tagana	30 orang
	Pendamping PKH	32 orang
	TOTAL	**243 orang**

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tabalong, 2025

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

   Penerapan SPM pada Dinas Sosial telah terpenuhi untuk melayani subjek sasaran SPM, hanya saja perlu lebih ditingkatkan lagi baik dari segi pemberian pelayanan, pendampingan dan anggaran.

2. Solusi

   Perlunya komitmen seluruh personil di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong untuk lebih meningkatkan penerapan SPM sesuai dengan ketentuan.

4.7 Program dan Kegiatan

4.7.1 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

Dalam rangka percepatan pencapaian SPM, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 melaksanakan

berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan terutama pendidikan dasar. Adapun program kegiatan yang mendukung ketercapaian SPM pada tahun 2025 antara lain yaitu:

Tabel 4.33 Realisasi Program Kegiatan Penunjang SPM Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Realisasi
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**147,862,877,357.97**
I	**1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**68,118,504,880.00**
1	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	390,297,500.00
2	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	995,909,490.00
3	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	9,787,768,415.00
4	1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	946,194,450.00
5	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	1,327,200,289.00
6	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	832,501,034.00
7	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	123,500,000.00
8	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	425,251,700.00
9	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1,170,265,769.00
10	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24,117,132,593.00
11	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	77,012,000.00
12	1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	54,955,000.00
13	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	55,570,382.00
14	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6,960,000.00
15	1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	42,835,000.00
16	1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	127,800,000.00
17	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	25,320,000.00
18	1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	181,500,429.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Realisasi
19	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	574,197,728.00
20	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	5,558,151,753.00
21	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,784,658,619.00
22	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	276,166,870.00
23	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6,564,437,050.00
24	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	7,104,250,000.00
25	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4,568,668,809.00
II	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	47,985,556,020.97
1	1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1,145,495,000.00
2	1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	986,068,000.00
3	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	2,205,318,577.65
4	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	5,278,712,001.28
5	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3,050,774,000.00
6	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	5,054,951,550.00
7	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	7,854,649,026.00
8	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	1,429,944,683.00
9	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	212,000,000.00
10	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	428,645,160.00
11	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1,188,866,399.00
12	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8,420,964,280.00
13	1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-
14	1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	129,549,750.00
15	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	81,470,500.00
16	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	5,477,310,873.04

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Realisasi
17	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	309,050,903.00
18	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4,731,785,318.00
III	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28,828,203,480.00
1	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	2,653,855,838.00
2	1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	264,019,050.00
3	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	9,616,910,000.00
4	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	232,621,300.00
5	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	225,778,000.00
6	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	4,971,475,878.00
7	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	4,796,729,000.00
8	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	4,227,870,414.00
9	1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,838,944,000.00
IV	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,930,612,977.00
1	1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	118,801,000.00
2	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1,908,507,677.00
3	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	903,304,300.00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2025

4.7.2 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan tahun 2025 yang terkait dengan pencapaian SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
   b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
   c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
   d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
   e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
   f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
   g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
   h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
   i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
   j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinveksi HIV

4.7.3 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Pekerjaan Umum maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan penganggaran untuk jenis pelayanan :

1. Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

- Indikator : Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : 1. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 2. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Tabel 4.34 Realisasi Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2025

No	Paket Pekerjaan	Anggaran	Capaian
1	3	4	5
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Desa Bahungin Kec.Kelua (lanjutan)	401.609.620	90 SR Pipa HDPE 63mm (2") = 437 m
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Desa Banua Rantau	965.378.596	100 SR Pipa HDPE 90mm (3") = 1477 m
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Desa Batang Banyu Kec.Banua Lawas	541.036.356	45 SR Pipa HDPE 90mm (3") = 1238 m
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Desa Habau Hulu	1.000.235.280	161 SR Pipa HDPE 90mm (3") = 1916 m Pipa HDPE 32mm (1") = 500 m
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Desa Lumbang	954.770.040	18 SR Pipa HDPE 110mm (4") = 1142 m Pipa HDPE 63mm (2") = 1792 m

No	Paket Pekerjaan	Anggaran	Capaian
1	3	4	5
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Desa Sungai Rukam 1 RT. 04 Kec.Pugaan	386.454.540	Pipa HDPE 90mm (3") = 916 m
7	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Desa Sungai Rukam 2 RT. 02 Kec.Pugaan	386.454.540	Pipa HDPE 90mm (3") = 1392 m
8	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Desa Tamunti RT. 01 Kec.Pugaan	394.032.080	25 SR Pipa HDPE 160mm (6") = 300 m Pipa HDPE 90mm (3") = 300 m Pipa HDPE 32mm (1") = 100 m
9	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Jl. Flamboyan Dalam Arah Asri Kec.Murung Pudak	394.032.080	29 SR Pipa HDPE 63mm (2") = 1129 m
10	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Jl. Harung Kel.Pembataan	639.544.376	49 SR Pipa HDPE 110mm (4") = 717 m Pipa HDPE 63mm (2") = 365 m Pipa HDPE 32mm (1") = 500 m
11	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Jl. Nan Sarunai dan sekitarnya Kec. Murung Pudak	8.292.859.776	100 SR Pipa HDPE 200mm (8") = 4068 m Pipa HDPE 110mm (4") = 7351 m
12	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Jl. Padat Karya Simp. 3 Permata Arah Puri Gardena	609.234.216	137 SR Pipa HDPE 90mm (3") = 578 m Pipa HDPE 32mm (1") = 957 m
13	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Jl. Pertamina Gang Muhajirin RT.07 Kel. Mabuun	500.117.640	72 SR Pipa HDPE 32mm (1") = 500 m Pipa HDPE 90mm (3") = 826 m
14	Pengadaan dan Pemasangan Pipa	2.385.409.592	25 SR Pipa HDPE 300mm (12") = 679 m Pipa HDPE 110mm (4") = 1319 m

No	Paket Pekerjaan	Anggaran	Capaian
1	3	4	5
	Distribusi Lanjutan Arah Desa Wayau		Pipa HDPE 90mm (3") = 2 m
15	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Perumahan Pesona Tanjung Regency Kalahang	401.609.620	53 SR Pipa HDPE 90mm (3") = 638 m Pipa HDPE 63mm (2") = 96 m Pipa HDPE 15mm (1/2") = 115 m
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Komplek Anugrah Regency 3 Kel. Belimbing Raya (APBDP)	6,000,000,000	425 SR Pipa HDPE 160mm (6") = 2118 m Pipa HDPE 90mm (3") = 5461 m
2	Pemasangan SR Kecamatan Banua Lawas TA 2025 (APBDP)	700,000,000	250 SR Pipa HDPE 32mm (1") = 440 m
3	Pemasangan SR Kecamatan Murung Pudak TA 2025 (APBDP)	500,000,000	176 SR Pipa HDPE 32mm (1") = 300 m
4	Pemasangan SR Kecamatan Tanjung TA 2025 (APBDP)	200,000,000	64 SR Pipa HDPE 32mm (1") = 200 m
5	Pemasangan Sambungan Rumah Desa Sungai Rukam dan Sekitarnya (lanjutan) (APBDP)	600,000,000	76 SR Pipa HDPE 32mm (1") = 700 m Pipa HDPE 20mm (1/2") = 959 m
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Arah Desa Hayup dan sekitarnya (APBDP)	9.226.500.000	367 SR Pipa HDPE 200mm (8") = 4845 m Pipa HDPE 160mm (6") = 2780 m Pipa HDPE 63mm (2") = 700 m Pipa HDPE 32mm (1") = 700 m
7	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Arah Balikpapan (APBDP)	9.500.000.000	115 SR Pipa HDPE 250mm (10") = 1252 m Pipa HDPE 200mm (8") = 10 m Pipa HDPE 160mm (6") = 1198 m Pipa HDPE 90mm (3") = 7835 m

No	Paket Pekerjaan	Anggaran	Capaian
1	3	4	5
			Pipa HDPE 63mm (2") = 308 m Pipa HDPE 32mm (1") = 210 m

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong, 2025

2. Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

- Indikator : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
- Program : Program Pengembangan Permukiman
- Kegiatan : Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
  a) Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
  b) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
  c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
  d) Sub Kegiatan Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
  e) Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

Tabel 4.35 Realisasi Pelayanan Dasar Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Paket Pekerjaan	Anggaran (Rp)	Output
1	2	3	4
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Desa Barimbun Kec. Tanta	194.400.000	14 unit
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Desa Madang Kec. Muara Harus	194.400.000	15 unit
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Desa Kinarum Kec. Upau	194.400.000	14 unit

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong, 2025

4.7.4 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.36 Program dan Kegiatan Penerapan SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	530.465.000,00
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	579.900.000,00
2	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.263.531.325,00
			Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	11.723.756.900,00,-
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Peningkatan Keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan dan layak huni serta kesadaran hukum hukum tentang kepemilikan rumah	4.972.923.000,00,-
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.618.900.000,00,-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong, 2025

4.7.5 Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

   PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
   Kegiatan :
   a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
      1) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
4) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup/Walikota

PROGRAM PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program dan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan tujuan pemenuhan kebutuhan dasar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 adalah :

Tabel 4.37 Program, Kegiatan, Target, dan Capaian SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6
A.	**Program Penanggulangan Bencana**	**8.056.168.381,-**	**5.824.653.086,-**		
1	**Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota**	**302.664.920,-**	**283.891.591,-**		
-	Sub Keg Sosialisasi,Komunikasi,Infor	302.664.920,-	283.891.591,-	3000 Org	3172 Org

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6
	masi dan Edukasi Rawan Bencana				
2	**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**6.008.922.709,-**	**4.078.705.497,-**		
	Sub Keg Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2.323.740.000	514.620.000	12 Laporan	12 laporan
	Sub Keg Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	3.097.278.349	3.038.851.501	40 Unit	40 Unit
	Sub Keg Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	76.322.350	60.027.750	3 Kawasan	3 Kawasan
	Sub Keg Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	83.225.650	74.850.899	30 Orang	30 Orang
	Sub Keg Penyusunan Rencana Kontigensi	200.000.000	200.000.000	1 Dok	1 Dok

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Sub Keg Gladi Kesiapsiagaan Bencana	68.186.960	65.854.788	1000 Org	1000 Org
	Sub Keg Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	139.224.500	124.500.559	3 Kawasan	3 Kawasan
	Sub Keg Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20.944.900	0	50 KK	-
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**1.376055.364**	**1.143.907.201**		
	Sub Keg Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	996.223.964	829.081.041	2 Dok	2 Dok
	Sub Keg Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	80.000.000	79.400.000	20 Org	5320 Org

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Sub Keg Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana Kab/Kota	260.327.900	235.426.160	500 Org	500 Org
	Sub Keg Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	39.503.500	0	1 Dok	-

Sumber : Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong, 2025

4.7.6 Program dan Kegiatan Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan tujuan pemenuhan kebutuhan dasar pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 adalah :

Tabel 4.38 Program, Kegiatan, Target dan Capaian Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Penerima Manfaat	Capaian Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6
1	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**5.584.500.000,-**	**5.398.350.000,-**	493	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak terlantar	5.584.500.000,-	5.398.350.000,-		
	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-anak terlantar	5.584.500.000,-	5.398.350.000,-		
2	**Program Penanganan Bencana**	**194.004.400,-**	**169.748.551,-**	1.000	100%
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	194.004.400,-	169.748.551,-		
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	122.925.740,-	106.253.620,-		
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	71.078.660,-	63.494.931,-		
3	**Program Rehabilitasi**	**3.482.485.436,-**	**3.013.089.549,-**	858	100%

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Penerima Manfaat	Capaian Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6
	Sosial				
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar, Penyandang Disabilitar Terlantar, Anak Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	3.482.485.436,-	3.013.089.549,-		
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	600.000.000,-	522.926.251,-		
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	106.700.436,-	66.897.207,-		
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.775.785.000,-	2.423.266.091,-		

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tabalong, 2025

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada Bab I Pendahuluan, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tabalong memiliki fondasi yang kokoh dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Secara yuridis, keberadaan Kabupaten Tabalong telah sah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965. Secara geografis, wilayah ini menempati posisi strategis dengan karakteristik topografi yang beragam dan potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Potensi tersebut didukung oleh kondisi demografis dengan jumlah penduduk yang terus meningkat secara stabil, mencapai 269.405 jiwa pada tahun 2025, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Murung Pudak.

Dari sisi kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah memiliki struktur perangkat daerah yang lengkap dengan total 5.494 personel Aparatur Sipil Negara (ASN). Distribusi SDM aparatur ini terkonsentrasi pada sektor pelayanan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan, yang mencerminkan prioritas daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut juga tercermin dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 yang menunjukkan kinerja positif, dengan pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp3,46 triliun atau melampaui target, sementara belanja daerah difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan pelayanan publik.

Arah pembangunan Kabupaten Tabalong untuk periode 2025–2029 telah dirumuskan secara jelas melalui visi "MENUJU TABALONG SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan)". Visi ini dijabarkan ke dalam empat misi serta tujuh program prioritas utama yang selaras dengan dokumen perencanaan, baik jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Secara operasional, seluruh program prioritas tersebut telah diintegrasikan ke dalam 39 urusan pemerintahan dengan total 157 program, 438 kegiatan, dan 1.285 sub-kegiatan yang didukung pagu anggaran sebesar Rp3,38 triliun dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Lebih lanjut, komitmen Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam memberikan pelayanan dasar yang berkualitas diwujudkan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada enam urusan wajib, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Strategi pencapaian SPM ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi diimplementasikan secara sistematis dengan dukungan kebijakan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat dan berbasis pada prinsip money follow program.

Berdasarkan uraian pada Bab II mengenai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 menunjukkan kinerja pembangunan yang sangat progresif dan berada pada jalur yang tepat menuju target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Keberhasilan ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 76,94 (101,13% dari target tahunan), disertai penurunan angka kemiskinan yang signifikan sebesar 17,20% menjadi

4,67%. Pencapaian ini didukung oleh intervensi strategis di sektor pendidikan melalui program beasiswa "1.000 Sarjana" dan peningkatan alokasi dana BOS-P, serta di sektor kesehatan melalui modernisasi layanan Smart Hospital dan layanan homecare.

Dari sisi ekonomi makro, meskipun laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,69% (86,85% dari target), struktur ekonomi daerah menunjukkan diversifikasi yang semakin kuat. Sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh impresif sebesar 12,68%, disusul oleh Industri Pengolahan (9,56%) dan sektor Pertanian (8,31%). Capaian paling menonjol adalah realisasi investasi non-tambang yang mencapai Rp1,63 triliun atau 257,33% dari target, yang mengindikasikan efektivitas kebijakan diversifikasi ekonomi dan iklim investasi yang kondusif. Hal ini sejalan dengan penguatan kontribusi sektor industri pengolahan dan pertanian terhadap PDRB yang telah melampaui target akhir RPJMD, masing-masing sebesar 103,04% dan 108,04%.

Pada aspek tata kelola pemerintahan dan fungsi penunjang, Kabupaten Tabalong menunjukkan fondasi yang kokoh dengan tingkat kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran mencapai 100%, serta penerapan inovasi di seluruh perangkat daerah. Kualitas pengawasan internal sangat mumpuni dengan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP berada pada level maksimal (Level 5). Tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK yang mencapai 87,21% dan opini WTP yang terus dipertahankan menjadi bukti komitmen daerah terhadap kepatuhan regulasi finansial. Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 105,14% dari target akhir RPJMD, sementara predikat inovasi daerah tetap dipertahankan pada kategori "Sangat Inovatif".

Meskipun kinerja secara umum sangat baik, terdapat beberapa catatan evaluatif yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan berkelanjutan. Indeks Gini yang mengalami kenaikan menjadi 0,310 (113,55% dari target) mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang perlu diatasi melalui kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Prevalensi stunting yang mencapai 23,1% (135,88% dari target) memerlukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas intervensi gizi di tingkat lapangan. Nilai SAKIP yang masih bertahan di kategori "B" (sementara target akhir RPJMD adalah "A") serta indeks SPBE yang stagnan di angka 3,7 menunjukkan bahwa percepatan transformasi digital dan akuntabilitas kinerja masih memiliki ruang perbaikan yang signifikan.

Secara keseluruhan, Kabupaten Tabalong telah berhasil membangun fondasi yang kuat melalui penguatan investasi, pembangunan manusia, dan inovasi daerah. Sinergi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program-program prioritas, baik pada urusan wajib pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur) maupun urusan penunjang, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Ke depan, diperlukan fokus berkelanjutan pada penguatan pemerataan ekonomi, percepatan penurunan stunting, akselerasi transformasi digital, serta peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja untuk memastikan seluruh target pembangunan jangka menengah dapat tercapai secara paripurna pada akhir periode RPJMD. Hal ini merupakan wujud nyata dari visi "MENUJU TABALONG SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan)" yang menjadi kompas pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian pada Bab III mengenai Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, dapat disimpulkan bahwa selama Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Tabalong tidak menerima penugasan dan/atau

melaksanakan tugas pembantuan, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal ini tercermin dari tidak adanya program, kegiatan, maupun alokasi anggaran yang dikelola melalui mekanisme tugas pembantuan. Seluruh indikator kinerja, target, realisasi anggaran, serta capaian kegiatan dalam matriks pelaporan menunjukkan kondisi nihil. Dengan demikian, tidak terdapat permasalahan, kendala, maupun rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilaporkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan pada periode ini.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa segenap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan sepenuhnya melalui skema dekonsentrasi dan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Kabupaten Tabalong. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Tabalong tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi guna memastikan kesiapan kelembagaan dan kapasitas fiskal daerah apabila di kemudian hari terdapat penugasan pembantuan yang perlu dilaksanakan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Tabalong pada Tahun 2025 berjalan sesuai dengan kondisi faktual bahwa tidak terdapat penugasan yang diterima, sehingga seluruh fokus dan sumber daya daerah diarahkan sepenuhnya pada optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Berdasarkan uraian pada Bab IV mengenai Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Tabalong, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menyelenggarakan enam urusan pelayanan dasar. Capaian kinerja rata-rata keenam urusan SPM mencapai 98,23%, yang mengindikasikan bahwa komitmen daerah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat telah berjalan secara optimal dan terintegrasi.

Keberhasilan ini dicapai melalui sinergi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada pelayanan publik. Berikut adalah rincian capaian kinerja masing-masing urusan:

1. Urusan Pendidikan mencapai capaian 99,04%. Keberhasilan ini didukung oleh optimalnya pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, serta peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, meskipun tantangan dalam pemerataan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan masih terus diupayakan penanganannya.
2. Urusan Kesehatan mencapai capaian 91,81%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan intervensi pada berbagai pelayanan kesehatan ibu, anak, serta pengendalian penyakit tidak menular dan menular. Meskipun capaian ini baik, beberapa indikator seperti pelayanan ibu hamil dan deteksi tuberkulosis masih menjadi fokus peningkatan untuk mencapai target ideal.
3. Urusan Pekerjaan Umum mencapai capaian 98,53%. Keberhasilan ini didorong oleh percepatan pembangunan dan perluasan akses infrastruktur dasar, khususnya penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik yang berhasil menjangkau sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Tabalong.
4. Urusan Perumahan Rakyat berhasil mencapai capaian 100,00%. Seluruh target rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan fasilitasi rumah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah telah terealisasi sepenuhnya.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) mencapai capaian 100,00%. Hal ini menunjukkan efektivitas penegakan Perda, kesiapsiagaan dalam penanganan kebakaran, serta optimalnya sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
6. Urusan Sosial mencapai capaian 100,00%. Seluruh sasaran penerima manfaat, termasuk penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, serta gelandangan dan pengemis, telah menerima layanan rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan SPM di Kabupaten Tabalong merupakan hasil dari tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, didukung oleh komitmen seluruh perangkat daerah, serta sinergi antara perencanaan pembangunan (RPJMD dan RKPD) dengan kebijakan penganggaran (APBD). Meskipun capaian secara umum telah melampaui ekspektasi, Pemerintah Kabupaten Tabalong akan terus melakukan pemutakhiran basis data, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di masa mendatang. Upaya ini merupakan wujud nyata dari visi "MENUJU TABALONG SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan)" dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, secara keseluruhan, Kabupaten Tabalong telah menunjukkan fondasi pemerintahan yang kokoh, kinerja pembangunan yang progresif, serta komitmen yang tinggi dalam pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Sinergi antara perencanaan pembangunan, penganggaran yang berpihak pada pelayanan publik, serta inovasi berkelanjutan telah membawa daerah ini berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan visi 'MENUJU TABALONG SMaRT' sebagai daerah yang sejahtera, maju, religius, dan terdepan.


TABALONG
SMART